

## **BAB 5**

### **PROSES TERBENTUKNYA PRAKTIK DUALISME PILIHAN POLITIK TAREKAT CUKIR PADA PEILBUB JOMBANG 2018**

Pada bab 5 ini peneliti sajikan proses terbentuknya dualisme pilihan politik Tarekat Cukir dalam kasus Pilbub Jombang 2018. Ada dua poin yang perlu dijelaskan terkait proses terbentuknya praktik dualisme pilihan politik yang dilakukan oleh Tarekat Cukir. *Pertama*, proses terbentuknya praktik Tarekat Cukir yang mendukung dan memilih PPP sebagai saluran aspirasi politiknya, tetapi dalam kasus Pilbup Jombang 2018 mereka menolak untuk mendukung kandidat bupati yang merupakan kader PPP dan diusung oleh partai tersebut. *Kedua*, proses terbentuknya praktik dukungan Tarekat Cukir terhadap Bupati Jombang sebagai kandidat *incumbent*, yang merupakan kader Golkar dan diusung oleh partai tersebut. Untuk hal ini, peneliti merasa perlu menengahkan sub bab tentang relasi antar pelaku di internal Tarekat Cukir, yakni antara murid dengan guru mursyid. Karena praktik tersebut tidak lepas dari pengaruh relasi yang terjadi di internal tarekat. Kemudian peneliti juga sajikan tentang relasi antara Tarekat Cukir dengan PPP, dan kemudian relasi antara Tarekat Cukir dengan Bupati Jombang.

#### **5.1. Relasi Murid - Mursyid di Internal Tarekat Cukir**

Tindakan Tarekat Cukir memilih PPP, sekaligus menolak kandidat bupati Jombang yang dicalonkan mereka, tidak datang secara tiba-tiba. Ia mengalami proses yang panjang untuk dijelaskan agar bisa dipahami. Proses tersebut, setidaknya bisa dijelaskan berawal dari adanya relasi antara murid dengan mursyidnya yang kemudian membentuk praktik kepatuhan.

##### **5.1.1. Habitus dan Modal dalam Pembentukan Praktik Kepatuhan Murid terhadap Guru Mursyid**

Mursyid Tarekat Cukir yang ada saat ini, dulunya ia berposisi sebagai murid, sebagaimana juga murid yang ada saat ini. Sadar atau tidak sadar, mereka terdominasi secara simbolis dengan cara “memaksa diri” atau “dipaksa” menerima aturan-aturan berupa adab, yang mengatur individu mursyid dan individu murid, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri, murid dengan mursyidnya

dan sesama ikhwan. Mereka memiliki orientasi yang sama, yaitu akhirat, yang tentu hal ini terkait erat dengan tujuan utama, yakni ketaatan kepada Allah SWT. Ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang disebut sebagai *ihsân*.

Tata adab tersebut direproduksi secara terus menerus dan turun temurun, diperuntukkan bagi diri seorang mursyid agar mengatur dan mendisiplinkan diri sendiri, sehingga ia menjiwai dan mampu mempraktikkan aturan-aturan tersebut dalam kehidupannya. Begitu juga, tata adab yang berlaku untuk si murid, dan aturan-aturan ketika murid berhubungan guru mursyidnya. Tata adab tersebut diinternalisasi ke dalam diri masing-masing, dan kemudian diekspresikan dalam bentuk praktik kepatuhan kepada mursyid dan ketaatan kepada Allah SWT. Proses internalisasi tata adab tersebut ke dalam diri mursyid ditujukan agar ia mampu mengekspresikannya dalam bentuk praksis sosial sedekat mungkin dengan praktik yang dilakukan Rasulullah SAW, baik secara ruhaniyah maupun habitus. Begitu juga, bagi si murid ditujukan agar ia menginternalisasikannya ke dalam diri, dan ia mampu mengkespresikannya sedekat mungkin dengan praktik yang dilakukan oleh para sahabat. Tentu, yang demikian itu tanpa harus ada tekanan terlebih dahulu dari pihak mursyid terhadap murid.

Relasi antara mursyid dan murid diandaikan sebagai relasi antara para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada kebergantungan dan ikatan spiritual yang menghubungkan antara murid dengan mursyid. Schimmel memandang relasi ini dipandang sebagai tradisi yang turun temurun sebagai bentuk pengamalan ala para sahabat terhadap Nabinya pada saat itu (Schimmel, 1986: 104). Relasi ini diandaikan posisi murid sebagai sahabat yang terbimbing, dan mursyid sebagai Nabi yang membimbing. Dalam hal ini, adab seorang murid kepada mursyidnya terwujud dalam rasa cinta yang sebenar-benarnya oleh seorang murid kepada mursyidnya (Al-Sya'rani, Tth: 114).

Lembaga Tarekat Cukir telah mereproduksi tata adab yang mengatur bagaimana menjadi pribadi mursyid dan murid sesuai dengan posisinya, dan bagaimana mestinya seorang murid berelasi dengan mursyidnya. Tata adab itu dibuat untuk merekonstruksi dan menormalisasi para individu melalui pendisiplinan dan

pengontrolan yang bertujuan untuk menciptakan para murid yang patuh dan tunduk terhadap otoritas dan bersedia menerima kontrol sosial di satu sisi dan kontrol spritual di sisi yang lain. Kepatuhan nantinya akan berujung pada kekuasaan. Artinya, dengan adanya tata adab untuk mengatur hubungan murid - mursyid, si murid menjadi tahu bagaimana si murid harus tunduk dan patuh kepada mursyidnya untuk mencapai tujuannya. Reproduksi tata adab ketarekatan biasanya disampaikan pada acara-acara dalam skala yang lebih kecil, misalnya khususiyah di level daerah masing-masing melalui khalifah/ wakil. Karena pendistribusian/ sosialisasi tata adab kepada jama'ah tarekat dalam skala yang lebih kecil berdampak pada efektifitas (Kasmuri, 14-07-2018). Peneliti tidak menemukan tata adab tersebut disampaikan dalam acara "Senenan" yang dihadiri jama'ah dalam jumlah yang lebih besar.

Di antara hasil sosialisasi doktrin tersebut, para murid meyakini bahwa mursyid selalu mengontrol apa yang dialami oleh murid dalam setiap harinya, termasuk rutinitas zikirnya. Pihak murid selalu merasa gurunya hadir di dalam dirinya, terutama saat melaksanakan *râbitah*; yakni suatu kondisi di mana murid menghubungkan, atau mempertautkan diri dengan mursyid secara spiritual. Relasi murid-mursyid yang meniscayakan seorang murid selalu mengingat mursyidnya dalam sekilas (*râbitah*), minimal lima kali harus dilakukan dalam sehari, tepatnya setelah usai menunaikan salat fardlu dalam proses zikir *sirri* (zikir dalam hati). Tentu "mengingat sekilas" yang dimaksud di sini berbeda dengan "mengingat terus" atau "sering mengingat". Dalam keterangannya saat prosesi pembaiatan massal di Masjid Jami' Cukir, Kiai Mad (15-10-2018) menjelaskan:

"*râbitah* iku elinge sekilas ae...lha lek eling terus iku jenenge ketok-ketok'en". Terjemahnya: "*râbitah* itu ingatnya (terhadap mursyid) sekilas saja...adapun jika ingat terus, itu namanya terbayang-bayang..."

*Râbitah* bukan saja bisa menjadi kontrol sosial bagi murid, tetapi juga menjadi kontrol spiritual. Dengan demikian, praktik kepatuhan dan ketundukan murid tidak hanya pada gerak tubuh yang sosial tetapi juga pada gerak hati yang spiritual. Prosesi *râbitah* bisa juga dimaknai sebagai upaya kontrol mursyid terhadap muridnya,

sekaligus penghubung batiniyah antara murid dan mursyid, yang selanjutnya dihubungkan kepada Allah SWT. Seorang murid harus dengan jelas mengidentifikasi siapa yang mengawasi dalam tangga *râbitah*, yaitu mursyidnya. Dengan begitu, setiap kali seorang murid mengingat mursyid, maka saat itu pula ia kemudian berzikir kepada Allah SWT, sehingga bisa memalingkan dari hal-hal yang menjauhkan dari mengingat Allah SWT. Demikian juga bagi diri mursyid yang berfungsi hanya sebagai perantara, ia juga selalu merasa diawasi oleh para almarhum gurunya. Seperti halnya Kiai Mad (30-06-2018) pernah menceritakan pengalaman mistisnya, dalam suatu kegiatan membaiai para jama'ah, ternyata di tempat itu hadir pula Kiai Adlan Aly yang sebenarnya sudah wafat sekian tahun yang lalu. Kiai Mad sadar bahwa Kiai Adlan memang sudah wafat, tetapi kesaksiannya tersebut tidak bisa dibantahnya sendiri. Pengalaman seperti ini sekaligus merupakan modal mistis spiritual bagi Kiai Mad yang memperkuat posisi tertingginya ketika berelasi dengan pihak lain di arena katarokatan.

Selain merasa diawasi oleh para gurunya, mursyid juga merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Jadi, setiap gerak badan dan gerak batin tidak ada yang luput dari *monitoring* dan pengontrolan. Kondisi seperti ini berlangsung secara terus menerus. Murid yang hendak bermaksiat diyakini akan terbaca dan dalam kondisi tertentu akan diingatkan oleh mursyidnya, kadang berupa lintasan bayangan si mursyid dalam benak si murid tersebut, dan kadang berupa sindiran tanpa menyebut personal murid. Demikian juga si mursyid akan diingatkan Allah SWT melalui cara yang dikehendakiNya dan seringkali tak terduga, sehingga mereka semua menginternalisasikan rezim disiplin bagi diri mereka sebagai subyek. Hal demikian pada akhirnya, akan terbentuk habitus-habitus murid dan mursyid yang tunduk dan patuh kepada guru mursyid dan taat kepada Allah SWT.

Secara kelembagaan, Tarekat Cukir memiliki dua orang mursyid yang biasa membaiai, yaitu Kiai Mad sebagai mursyid dan Kiai Maftuh Makki sebagai badal (pengganti) mursyid jika mursyid utama berhalangan. Masing-masing mursyid memiliki habitus yang berbeda. Kiai Mad lebih cenderung mengurus masalah spiritual, berdakwah menembus kaum muda nakal yang cenderung belum taat

beragama, dan mengajak mereka berzikir, mendekat ke jalan menuju Tuhan SWT. Kiai Mad juga melakukan pembaiatan dan lanjutan *murâqabah*, serta rutinitas khususiyah di daerahnya, yaitu desa Brangkal. Secara modal spiritual, Kiai Mad, memiliki ilmu hikmah, ilmu *ruqyah* (suwuk), dan mistis lainnya, juga ketajaman mata batin. Dalam hal ini misalnya, Kiai Mad (30-06-2018) menerima amplop berisi uang Rp. 500.000 dari utusan bupati Jombang, lalu diberikan isterinya. Hanya saja ia berpesan, bahwa uang tersebut jangan sampai dipergunakan utamanya untuk konsumsi, sebagai strategiantisipasi terhadap keragu-raguan. Suatu hari, masyarakat membutuhkan dana untuk merenovasi pagar tembok kuburan. Uang tersebut diberikan dan menyisakan puluhan ribu. Selesai direnovasi, tembok roboh karena tertimpa pohon jati yang roboh karena hembasan angin kencang. Sisa uang tersebut diberikan kepada orang untuk transportasi. Di tengah perjalanan, ban sepeda motor orang tersebut meletus, dan uang tersebut didistribusikan untuk servis tanpa sisa.

“Iki duwek oopo sing digawe...” Terjemah: “Ini uang aaapa yang dipakai”.

Artinya, Kiai Mad sejak awal sudah curiga dan meragukan “kehalalan” uang yang diberikan utusan bupati tersebut. Masih banyak cerita yang lain yang tidak perlu peneliti tuliskan di disertasi ini. Tetapi paling tidak, cerita tentang ketajaman mata batinnya tersebut bisa menjadi modal mistis spiritual bagi Kiai Mad ketika berelasi dengan pihak lain. Dengan modal yang tidak banyak dimiliki orang lain, memungkinkan Kiai Mad memperoleh posisi unggul di kalangan masyarakat sosial keagamaan.

Kiai Mad, menjauhkan diri dari urusan perpolitikan, meskipun pihak PPP Jombang mengakuinya sebagai salah satu pengurusnya. Berbeda dengan Kiai Maftuh yang darah politik ayahnya mengalir dalam tubuhnya. Ia seringkali terlibat dalam aktifitas politik, mulai menjadi pengurus DPC PPP Jombang dan DPW PPP Jawa Timur. Selain aktif di PPP, Kiai Maftuh juga terlibat politik dukung mendukung calon tertentu, baik di arena Pilbup Jombang maupun Pilgub Jawa Timur. Tidak hanya itu, Kiai Maftuh juga tampil sebagai seorang yang ahli dalam bidang olah batin dan spiritual. Beberapa kali, peneliti melihat orang-orang datang menghadap

seraya mengadakan permasalahan keluarga untuk dicarikan solusinya. Bimbingan spiritual, berupa tingkatan-tingkatan *murâqabah* juga dilaksanakan di rumahnya Tegalsari, Mojowarno, utamanya hari Senin sebelum Kiai Maftuh berangkat ke Cukir menghadiri rutinan “Senenan”.

Dengan kata lain, dilihat dari sisi modal, Kiai Mad dalam berelasi dengan para murid memiliki modal mistis spritual, modal budaya utamanya terkait dengan ilmu keagamaan, modal simbolik dan modal sosial. Sementara Kiai Maftuh dalam berelasi dengan para murid membawa modal mistis spiritual, modal sosial dan politik, modal budaya terutama terkait dengan pengetahuan keagamaan, dan modal simbolik. Lebih jelasnya bisa dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Sumber-Sumber Modal Kekuasaan Kiai Maftuh**

| <b>Jenis Kapital</b>    | <b>Bentuk</b>   |
|-------------------------|---|
| <b>Ekonomi</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aset yayasan pesantren</li> <li>- Mobil operasional</li> <li>- Travel haji dan umroh</li> <li>- Uang bisyaroh, sedekah dan infaq</li> </ul>  |
| <b>Simbolik</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badal mursyid/ Mudir di Tarekat Cukir</li> <li>- Pengurus DPC PPP Jombang</li> <li>- Pengurus DPW PPP Jatim</li> <li>- Pengasuh sekaligus mursyid di yayasan pesantrennya</li> <li>- Penasehat spiritual bagi banyak orang termasuk Nyono Suharli.</li> <li>- Dikenal sebagai ahli hikmah</li> <li>- Putra salah satu pendiri Tarekat Cukir</li> </ul> |
| <b>Budaya</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguasaan literatur klasik keagamaan, politikus</li> </ul>  |
| <b>Sosial</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan sosial melalui jama'ah tarekat, para santri dan politik</li> </ul>  |
| <b>Mistis Spiritual</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki ilmu hikmah, spiritual</li> </ul>   |

*Sumber: Kiai Maftuh saat wawancara (10-02-2019) dan pengamatan selama penelitian*

**Tabel 2. Sumber-Sumber Modal Kekuasaan Kiai Ahmad Sholihuddin (Kiai Mad)**

| <b>Jenis Kapital</b>    | <b>Bentuk</b>   |
|-------------------------|---|
| <b>Ekonomi</b>          | - Sawah pribadi<br>- Uang bisyaroh, sedekah dan infaq   |
| <b>Simbolik</b>         | - Mursyid/ Rais di Tarekat Cukir<br>- Pembina bagi “wong ratan” (anak-anak muda jalanan/ nakal)<br>- Status Kiai di desanya.<br>- Dikenal sebagai ahli ilmu hikmah<br>- Putra mursyid Tarekat Cukir |
| <b>Budaya</b>           | - Penguasaan literatur klasik keagamaan: tauhid, fiqh dan tasawuf   |
| <b>Sosial</b>           | - Jaringan sosial melalui jama’ah tarekat dan jama’ah istighatsah   |
| <b>Mistis Spiritual</b> | - Memiliki ilmu hikmah, spiritual   |

*Sumber: Kiai Maftuh saat wawancara (30-06-2018) dan pengamatan selama penelitian*

Modal mistis spiritual yang dimiliki oleh dua orang mursyid dan badal mursyid di atas, menunjukkan adanya empat jenis modal yang ditawarkan Bourdieu (1996: 114; 1992: 119), yaitu 1) modal sosial, 2) modal ekonomi, dan 3) modal budaya. Kemudian Bourdieu (1992: 119) menambahkannya satu modal lagi, yaitu 4) modal simbolik. Temuan tentang adanya modal mistis spiritual dalam penelitian ini sekaligus melengkapi teori modal yang dikembangkan oleh Bourdieu di atas.

Perbedaan habitus dua mursyid tersebut di atas berpengaruh terhadap kecenderungan sikap politik para murid. Sebagian mereka berpandangan bahwa mereka netral terhadap urusan politik dan memilih urusan akherat, dan tidak mengurus masalah politik. Sikap seperti ini merupakan cerminan yang memantul dari sikap Kiai Mad dalam hal politik. Seperti diungkapkan oleh Sunari, seorang jama’ah yang datang dari wilayah Kediri dan umurnya sekitar 65 tahun, di sela-sela acara “Senenan” di Masjid Jami’ Cukir (15-10-2018) berujar:

“...kulo namung kepingen belajar merek dumateng gusti Alloh”. Terjemahnya: “...saya hanya ingin belajar mendekati diri kepada Allah”.

Sebagian yang lain berpolitik praktis; selain sebagai pendukung juga menjadi pengurus PPP. Hal demikian merupakan pengaruh dari generasi sebelumnya dan juga Kiai Maftuh yang terlibat aktif dalam politik praktis sebagai fungsionaris PPP.

Pihak murid, sebagai pihak yang terpengaruhi. Karena secara habitus dan modal dalam arena katarekatan “menguntungkan” pihak mursyid, apalagi tarekat dikenal sebagai majelis miliknya mursyid, sehingga segala sesuatunya “opo jare mursyid” (apa kata mursyid). Lihat perbandingan di bawah ini:

**Tabel 3. Pihak yang Berelasi dan Sumber Kekuasaan**

| <b>Indikator</b>        | <b>Kiai Mad dan Kiai Maftuh</b>  | <b>Para Jama'ah/<br/>Murid</b>   |
|-------------------------|--|--|
| <b>Peran</b>            | ✓ Mursyid dan Badal Mursyid  | ✓ Murid  |
| <b>Basis Pengaruh</b>   | ✓ Para jama'ah tarekat dan masyarakat sekitar kediamannya  | ✓ Keluarga, teman, tetangga  |
| <b>Ranah/<br/>Arena</b> | ✓ Tarekat: Haul, Senenan, sewelasan, dan istighatsah.<br>✓ Politik: dalam kaitannya dengan Pilbup Jombang 2018, mursyid tidak memaklumkan secara khusus untuk memilih kandidat tertentu.   |  |
| <b>Habitus</b>          | ✓ Memiliki orientasi hidup hanya taat untuk beribadah, dan bermanfaat bagi yang lain, mengantarkan murid kepada <i>ihsân</i> , menuntun dalam urusan kehidupan para murid, baik urusan dunia maupun akhirat, dan lainnya. Gaya hidup yang sederhana, dan praktik keagamaan yang kuat. Gaya bahasa yang halus dan sopan. Ranah gerakannya meliputi spiritual keagamaan, dan sosial politik. | ✓ Memiliki orientasi hidup hanya taat untuk beribadah, dan bermanfaat bagi yang lain, patuh kepada guru mursyid. Siap diarahkan mencapai <i>ihsân</i> . Gaya hidup yang sederhana, gaya bahasa yang halus dan sopan. Patuh kepada mursyid. Ranah gerakannya meliputi spiritual keagamaan, dan sosial dan sebagian politik. |



|                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>Kapital</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ekonomi: hasil dari bisyarah, infaq dan sedekah</li> <li>✓ Sosial: jaringan antar kiai dan kelompok tarekat, jaringan di PPP</li> <li>✓ Budaya: penguasaan pengetahuan keislaman; tauhid, fikih, tasawuf</li> <li>✓ Simbolik: Kiai, mursyid yang membaiat, pengasuh pesantren, pengurus PPP</li> <li>✓ Spiritual: mata batin yang tajam, ilmu hikmah/ mistik-supranatural</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ekonomi: umumnya hasil dari pertanian, wiraswasta, berdagang, dan pensiunan</li> <li>✓ Sosial: jaringan antar jama'ah/ ikhwan, masyarakat masing-masing</li> <li>✓ Budaya: keahlian di beberapa bidang.</li> <li>✓ Simbolik: murid</li> <li>✓ Spiritual: semangat, kemauan, tunduk dan patuh, siap menerima ilmu, siap dituntun/dibina dan diarahkan, kehidupannya. Murid ibarat mayit di hadapan orang yang mengkafaninya.</li> </ul> |
|----------------|---|---|

Tabel adanya relasi antara murid dan mursyid menunjukkan habitus mursyid lebih kuat, dan lebih pas, modalnya juga lebih banyak dibanding modal milik murid. Apalagi mursyid memiliki modal mistis spiritual yang tidak dimiliki oleh kebanyakan murid, dan permainan terjadi di dalam ranah tarekat: yaitu sebuah ranah yang identik dengan miliknya mursyid. Pada akhirnya, dari relasi tersebut pihak mursyid tampil sebagai pihak dominan, yang kemudian melahirkan praksis social dalam bentuk kepatuhan murid terhadap mursyid.

Zaman terus berubah dan berkembang bersamaan dengan persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi para pengamal tarekat. Situasi dan kondisi perpolitikan pada level nasional di Indonesia sangat berdampak terhadap hubungan murid dan mursyid, sehingga suatu ketika, tema tentang kepatuhan murid terhadap mursyidnya menimbulkan persoalan baru, yaitu apakah kepatuhan seorang murid terhadap mursyidnya termasuk dalam ranah politik atau hanya dalam ranah spiritual keagamaan saja?

Persoalan krusial tersebut sebenarnya pernah dibahas dalam Mukatamar IX JATMAN di Pekalongan, tanggal 26 – 28 Pebruari

tahun 2000. Sebagaimana catatan Jamil (2005: 122-123), menyebutkan bahwa di dalam muktamar tersebut terjadi perdebatan sengit mengenai ketaatan murid kepada mursyidnya. Hal ini bermula dari pertanyaan di dalam forum *bahts al-masâil* (diskusi tentang masalah-masalah kontemporer), apakah seorang mursyid boleh memaksa muridnya dalam penyaluran aspirasi politik. Dan apakah seorang murid harus taat kepada mursyidnya tersebut? Pertanyaan yang menimbulkan perdebatan tersebut muncul karena adanya realitas baru perkembangan sosial politik di Indonesia sebagai akibat dari dampak dari reformasi.

Bibit-bibit yang mendasari pertanyaan tersebut sebenarnya telah muncul sejak dihelatnya Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo. Keputusan muktamar yang mengharuskan NU kembali ke Khittah 1926, dan memaksa warganya tidak lagi harus menyalurkan aspirasi politiknya melalui PPP. Pluraritas pilihan politik warga NU pada akhirnya menyebar ke beberapa partai yang ada ketika itu, yaitu PPP, Golkar dan PDI. Lebih dari itu, kembalinya NU ke Khittah 1926 ternyata juga berdampak yang cukup serius terjadinya konflik di internal kelompok Tarekat Cukir. Dari konflik internal ini, lahirlah kelompok tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* anti politik yang sekarang berpusat di Pondok Pesantren Seblak, desa Kwaron berlokasi yang tidak jauh dari pusat Tarekat Cukir.<sup>1</sup>

Era reformasi yang ditandai dengan kebebasan menyampaikan pendapat telah melahirkan banyaknya partai baru. Di antara partai-partai itu adalah partai yang berlabel Islam. Setidaknya ada PPP dan PKS yang tampil dengan label keislamannya. Ditambah lagi dengan adanya PKB yang terbentuk dari kalangan NU sebagai wadah penyaluran aspirasi politik warganya. PPP yang dulunya memiliki basis massa dari kalangan NU semakin terpinggir. Para petinggi kelompok Tarekat Cukir yang didominasi oleh orang-orang ahli tarekat dan memiliki militansi yang tinggi di PPP menjadikan kelompok tersebut sebagai benteng terakhir, apalagi pasca 1984

---

<sup>1</sup> Tarekat ini sekarang mursyidnya Kiai Taufiq, sekaligus pimpinan PP. Sunan Ampel Jombang. Data tentang konflik ini, tidak perlu peneliti tampilkan dalam tulisan ini, menghindari pembiasan kajian. Barangkali akan peneliti tuangkan dalam bentuk artikel baru.

telah menyempal kelompok khittah 1926 dari Tarekat Cukir. Itulah mengapa perdebatan sengit di antara para ulama tarekat pada Muktamar IX tahun 2000 tak terelakkan. Perbedaan tersebut tidak hanya didukung oleh faktor adanya dalil-dalil keagamaan, tetapi juga didukung oleh kepentingan politis dari pihak-pihak yang berdebat. Jamil (2005) yang mengamati jalannya perdebatan tersebut dalam sidang pleno mencatat bahwa tokoh-tokoh yang mendukung pendapat tentang wajibnya seorang murid mengikuti pilihan politik mursyidnya adalah Kiai Makki Ma'shoem dari Tarekat Cukir (Jombang) dan Kiai Abdurrahman Badawi dari Tarekat Mranggen (Demak). Sementara itu, tokoh yang menonjol dalam mendukung pendapat tidak wajibnya mengikuti mursyid dalam urusan politik adalah Kiai Muhaimin Gunardo dari Temanggung. Ia tidak sendirian. Ada Kiai Jufri yang merupakan utusan dari Jember tampak memberi dukungan kepada orang-orang yang berpendapat seperti Kiai Muhaimin tersebut. Faktor kepentingan politik dari masing-masing pihak tersebut bisa diketahui dari identifikasi bahwa keduanya aktif di partai politi yang berbeda. Kiai Makki Ma'shoem dan Kiai Abdurrahman Badawi merupakan aktifis PPP, sementara Kiai Muhaimin Gunardo merupakan aktivis PKB.

Gambaran di lapangan menunjukkan bahwa Tarekat Cukir mengikuti pandangan bahwa murid wajib mematuhi guru mursyidnya, dalam urusan agama dan politik yang sebenarnya termasuk urusan privasi. Hanya saja, sebagaimana disebutkan di atas bahwa dua mursyid Tarekat Cukir saat ini memiliki habitus yang berbeda: Kiai Mad lebih dominan mengurus persoalan spiritual dan netral dalam urusan politik, sementara Kiai Maftuh selain mengurus persoalan spiritual juga terlibat aktif dalam politik praktis sebagai pengurus PPP, baik tingkat cabang maupun wilayah. Demikian juga jama'ah, sebagian mereka tidak terlalu peduli terhadap urusan politik dan lebih mementingkan urusan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, apalagi secara umum didominasi oleh mereka yang berumur di atas kepala lima. Sebagian mereka respek terhadap urusan politik, termasuk terlibat dalam mendukung kandidat bupati dalam Pilbup Jombang 2018. Tetapi secara umum, persoalan politik dipandang telah menjadi urusan

pribadi jamaah. Menurut sebagian jama'ah yang sempat peneliti tanya, bahwa para jama'ah diyakini sudah sama-sama mengerti. Artinya, urusan politik sudah menjadi ranah pribadi dan tidak perlu sesama ikhwan saling mempengaruhi. Pandangan semacam ini juga diperkuat pandangan Gus H, seorang pengurus Tarekat Cukir dan juga pengurus PPP, ia mengatakan (06-02-2019), bahwa urusan tarekat lebih penting daripada urusan politik yang cenderung temporal:

“...semua sudah pada tau, urusan politik diserahkan ke masing-masing (jama'ah), yang terpenting itu toriqohnya. Kondisi politik sekarang tidak seperti dulu (Orde Baru)”.

Beberapa wawancara menunjukkan dua pandangan yang berbeda. Dalam kasus Pilbup Jombang 2018 misalnya, sebagian dari mereka berpandangan bahwa karena mursyid tidak memerintah kepada para murid untuk memilih kandidat tertentu, maka hal itu berarti mereka dibebaskan untuk memilih sesuai pilihannya masing-masing. Sebagian lagi, misalnya Kiai Shofwan (04-07-2018) dari pengurus *Ghusniyah* kecamatan Ngoro berpandangan bahwa kepatuhan murid kepada gurunya termasuk dalam urusan politik. Ini artinya murid harus mengikuti guru mursyidnya yang mendukung kandidat tertentu. Dalam hal ini, Kiai Maftuh mengutip redaksi kalimat dari kitab “*manâqib*” yang biasa dibaca oleh warga NU, utamanya kaum tarekat bahwa “*wa al-mukhâlafatu sabab al-firâq*”. Kiai Maftuh mereproduksi maknanya, bahwa pilihan murid yang bertentangan dari pilihan guru, termasuk dalam urusan politik, bisa menjadi penyebab putusannya hubungan spiritual/ rohani antara keduanya. Guru yang dimaksud di sini adalah guru mursyid. Sebutan mursyid lebih bersifat umum, sementara guru mursyid adalah mursyid secara khusus yang mempunyai hubungan batiniyah secara langsung dengan muridnya.

Temuan di atas menjelaskan secara lebih spesifik temuan Mudin (2015) yang menemukan bahwa dalam relasi antara mursyid dengan murid, pihak mursyid memberikan pengaruh yang kuat terhadap murid dalam pendidikan ruhani. Demikian juga temuan Musthofa (2017) bahwa dalam relasi antara mursyid dan murid, pihak mursyid memberikan pengaruh yang kuat kepada murid tidak hanya pada ranah spiritual ruhani saja, tetapi juga pada ranah sosial

secara lebih luas. Meskipun temuan keduanya tidak menjelaskan secara spesifik tentang pengaruh mursyid terhadap pilihan politik, baik partai politik maupun politik elektoral. Memang Tarekat Syadziliyah Tulungagung yang menjadi fokus unit kajian Musthofa, memang dikenal tidak pernah terlibat aktif dalam politik praktis. Sementara pola komunikasi yang terbangun di antara kedua belah pihak di Tarekat Cukir, tidak jauh beda dengan temuan Salahudin (2013) di lokal lain, yang menunjukkan adanya pola komunikasi yang terbangun di internal TQN di Suryalaya sebagai pola sentralistik terintegrasi, yaitu pola komunikasi yang terpusat pada satu figur mursyid, dan terintegrasi pada ajarannya yang dianggap sebagai sebuah “ideologi”.

Hubungan murid – mursyid membentuk pola hubungan kerjasama yang saling mengikat (*cooperation contract*) dan saling ketergantungan (*simbiosis mutualism*). Ada kontrak kerjasama antara kedua belah pihak yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di dalam tata adab ketarekatan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Jika murid mengambil sikap yang berlawanan dengan tata adab tersebut, maka hal itu bisa menyebabkan terputusnya hubungan antara keduanya: suatu hal yang tentu tidak diinginkan oleh keduanya. Sebaliknya, jika si mursyid melanggar apa yang telah ditentukan di atas, maka bisa saja kemursyidannya menjadi batal dan wajib bagi si murid untuk meninggalkannya atau mencari guru baru yang lebih baik. Seorang murid membutuhkan petunjuk guru, dan guru pun membutuhkan ketaatan si murid dalam menyampaikan reproduksi ilmu untuk mengantarkannya menuju *ihsân*. Relasi murid dengan guru mursyid tidak hanya terbatas pada tanggung jawab di kehidupan duniawi saja, tetapi berpengaruh hingga di alam nanti pasca kematian.

**Tabel 4. Pola Relasi Antarpelaku di Internal Tarekat Cukir**

| Subyek yang Berinteraksi | Pola Relasi   |
|--------------------------|---|
| <b>Antarpengurus</b>     | ✓ Rois/ Mursyid adalah posisi tertinggi di Tarekat Cukir, sehingga bisa memberhentikan pengurus yang posisinya lebih rendah |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | ✓ Pengurus kedudukannya sama dengan murid di hadapan mursyid dalam urusan spiritual.   |
| <b>Murid-Mursyid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jam'iyah tarekat adalah milik mursyid</li> <li>✓ Jama'ah tergantung kepada mursyidnya</li> <li>✓ Jama'ah taat dan patuh kepada mursyid</li> </ul> |

### **5.2.1. Dominasi Mursyid atas Murid Melalui Kekerasan Simbolik**

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa seseorang yang ingin menjadi murid Tarekat Cukir harus dilakukan bai'atan terlebih dahulu: bisa dilakukan di Masjid Cukir maupun di rumah mursyid. Setelah menjadi murid, berarti si murid harus siap menerima aturan-aturan yang ada di dalamnya. Murid sebagai pihak yang butuh, sementara mursyid sebagai pihak yang dibutuhkan, dan oleh karena itu setiap murid harus siap menerima apa yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, si murid menyerahkan diri sebagai pihak yang terdominasi. Akan tetapi ia tidak merasa bahwa ia telah didominasi atau ditindas. Baginya, hal ini sebagai hal yang lumrah dan normal harus dijalani. Apalagi si mursyid pun juga menerima aturan atau tata adab untuk mengontrol dirinya sendiri dan untuk mengatur ketika berelasi dengan pihak lain. Sebenarnya si mursyid pun juga mengalami penindasan simbolik, sebagaimana juga dialami oleh murid. Masing-masing pihak telah menyetujui penindasan ini dijalankan. Dominasi simbolik ini begitu longgar, tidak bersifat represif, sehingga tidak menimbulkan resistensi dari pihak terdominasi. Jadi, ini merupakan penindasan simbol-simbol.

Keinginan murid untuk lebih dekat kepada Allah SWT sebenarnya bukanlah semata-mata keinginan si murid itu sendiri. Akan tetapi juga tidak lepas dari pengaruh pihak mursyid, dan oleh lingkungan ketarekatan. Oleh karena itu, si murid sebenarnya tidak benar-benar terbebas dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Si mursyid pun, dalam mengekspresikan praktiknya tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi ia dipengaruhi oleh kondisi jama'ah yang umumnya tergolong awam. Oleh karena itu, mursyid dalam menyampaikan pengajian dalam rangka pembai'atan menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh jama'ah (observasi, 15-10-2018). Temuan semacam ini telah memperkuat pandangan Bourdieu (1990: 31), yang berupaya menyatukan

dimensi dualitas pelaku dan struktur. Agen bisa mempengaruhi struktur, demikian juga sebaliknya, atau dikenal dengan istilah internalisasi eksterior dan eksternalisasi eksterior. Terjadi hubungan dialektis antara struktur objektif dengan fenomena subjektif. Hal ini berbeda dengan teori strukturasi yang diajukan oleh Giddens (1984), bahwa hubungan antara agensi dan struktur adalah dualitas. Dualitas terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Baginya, agen memiliki kemampuan menciptakan perbedaan di dunia sosial. Lebih kuat lagi, agen tidak mungkin ada tanpa kekuasaan struktur dalam.

Jama'ah Tarekat Cukir dikenal patuh kepada apa yang dikatakan mursyid (Kiai Maftuh, 11-07-2018). Masyarakat tidak berani bersikap kritis terhadap pandangan atau perilaku mursyid, meskipun sebenarnya ingin bersikap kritis, tapi tidak menghasilkan keberanian. Hal ini terkait erat dengan tata adab yang harus dijalankan oleh murid, yaitu tidak boleh mengkritik mursyid. Seperti yang dialami oleh Kiai AA, secara politik sama-sama aktif di PPP Jombang, demikian juga Kiai Maftuh yang juga sama-sama menjadi pengurus, tetapi Kiai AA menjadi murid di arena tarekat. Dualisme jabatan tersebut, rupanya telah menyebabkan kebingungan Kiai AA:

“Kate ngritik, tp kok mursyid. Kate gak dikritik, tp beliau aktif no PPP”. Terj: “Mau saya kritik, tapi kok statusnya mursyid. Mau tidak mengritiknya, faktanya dia aktif di PPP”. (11-07-2018)

Itulah salah satu ungkapan jama'ah Tarekat Cukir yang menjadi beban pikirannya, karena sebenarnya ia ingin menyampaikan sesuatu kepada mursyid tersebut. Hal ini terkait erat dengan etika atau adab antara murid dan mursyid yang sudah terdoktrinkan sebagai suatu kebenaran dan wajib dilaksanakan di kalangan para jama'ah. Itulah mengapa, menurutnya menyalahinya merupakan sesuatu yang nista. Di satu sisi, ia ingin menyampaikan kritiknya kepada si mursyid yang kapasitasnya sebagai politisi, karena memang sama-sama di PPP nya. Tetapi di sisi lain, sebagai seorang jama'ah, ia merasa *sungkan* karena dianggap tidak beradab jika menyampaikan pendapatnya karena ia merupakan guru yang menuntunnya. Sikap Kiai AA ini menampilkan kepatuhannya terhadap mursyid, dan merupakan praksis sosial dari hasil relasinya

dengan pengetahuan tentang tata adab ketarekatan yang direproduksi oleh pihak Tarekat Cukir.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa posisi mursyid sangat dominan, sementara murid sebagai pihak terdominasi tidak bisa berbuat banyak, kecuali hanya bisa menerima. Ini merupakan resiko bagi murid yang hidup di arena yang cenderung dikuasai mursyid. Sebab, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa jam'iyah (kumpulan) tarekat adalah milik mursyid. Pihak mursyid pun tidak "memaksa" masyarakat untuk masuk ke dalam sistem ketarekatan. Muridlah yang membutuhkan ajaran-ajaran tarekat melalui guru mursyid. Berani masuk ke dalam sistem tarekat, berarti harus siap diatur atau siap menerima tata adab yang ada di dalamnya. Berani menentang, berarti siap menerima resiko terputusnya hubungan antara keduanya, sebagaimana yang berlaku. Hal demikian cukup disadari dan diterima oleh para jama'ah.

Rezim Tarekat Cukir menciptakan simbol yang mencerminkan kekuasaannya. Ia mereproduksi tata adab/ aturan yang sudah berlaku di kalangan *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* sebagai simbol yang bertujuan untuk mendisiplinkan jama'ah tarekat, sehingga secara ekonomis (tidak perlu mengeluarkan biaya) memudahkan bagi mursyid dalam mendidik spiritualnya menuju *ihsân*. Pemilik simbol bisa mewujudkan dirinya sebagaimana yang ada di dalam tata adab; bagaimana diperlakukan dan memperlakukan murid ketika berelasi. Oleh karena itu, pemilik simbol dapat menjalankan praktik kekuasaannya atas nama tata adab atau aturan yang direproduksinya. Ia juga memiliki kewenangan untuk menjadi tata adab (simbol) itu benar-benar terejawentah dan memperoleh pengakuan bahwa pemilik simbol/ mursyid memiliki mandat untuk bertindak sesuai dengan tata adab yang direproduksinya itu.

Wacana kepatuhan murid terhadap guru mursyid meliputi urusan agama dan politik, sebagai wacana yang dominan di kalangan Tarekat Cukir. Sebagaimana telah ditunjukkan di atas, bahwa pandangan Kiai Makki Ma'shoem dalam Mukhtamar Tarekat di Pekalongan tahun 2000 tentang wajibnya murid mengikuti pilihan politik guru mursyidnya, direproduksi oleh putranya, yaitu Kiai Maftuh dan diikuti lainnya, seperti Kiai Ikhsan (29-01-2019) dan



Kiai Sofwan (04-07-2018). Hanya saja, Kiai Maftuh tidak memerintahkan secara jelas, baik melalui lisan maupun maklumat berupa tulisan, kepada jama'ahnya untuk mengikuti pilihan politiknya.

“...ketepatan mulai Mbah Yai Adlan sampai sekarang yang mendominasi Thoriqoh di Cukir itu orang PPP semua. Ndak ada hubungan dengan partai. Dan dari kamipun memberi kebebasan”.

Pemberian kebebasan ini lahir dari pengaruh gaya pemerintahan pasca reformasi yang cenderung tidak represif. Meskipun bebas, tetapi tampaknya sudah dipandang mafhum bahwa doktrin yang direproduksi di tarekat adalah murid tidak boleh bertentangan dengan guru mursyid, karena implikasinya yang fatal. Kiai Maftuh (11-07-2018) mengatakan:

“...Itu karena hubungannya dengan *nûr*. Karena di *manâqib* kan ada *wa al-mukhâlafatu sabab al-firâq*. Kalau kita *khilâf* (bertentangan) dengan guru (mursyid), di sana pisahnya mas. Kalau toriqoh sih, bukan toriqohnya PPP...”

Jadi, sebenarnya terjadi pembebasan sekaligus pengekangan. Artinya, kebebasan sebagaimana yang dikatakan Kiai Maftuh tetap akan dicegat oleh doktrin yang direproduski tersebut. Wacana ini menyebar di seluruh jama'ah, terutama disebarakan melalui sosialisasi di arena yang lebih kecil, yakni di tiap-tiap *khalîfah* dengan pertimbangan efektifitas (Kiai Kasmuri, 04-07-2018). Tentu saja, hal ini diharapkan mampu membawa mereka kepada sebuah dampak pemahaman bahwa murid harus mengikuti guru mursyid dalam urusan agama dan politik.

Hanya saja perlu dicatat keterangan dari Kiai Maftuh (11-07-2018) bahwa terdapat perbedaan antara mursyid dan guru mursyid. Jika mursyid lebih bersifat umum dan lebih luas, maka guru mursyid lebih bermakna sempit, yakni hanya mursyid yang memiliki hubungan rohani dengan muridnya. Implikasinya adalah, seorang murid tidak harus mengikuti pilihan politik mursyid, karena tidak adanya ikatan baiat. Ia hanya harus patuh dan mengikuti pilihan politik guru mursyidnya, karena memiliki ikatan rohani melalui baiat. Hal ini berarti, mursyid (umum) mendominasi murid hanya dalam arena ketarekatan, dan tidak dalam urusan politik. Berbeda dengan guru mursyid (khusus), yang mendominasi murid pada arena

agama dan politik. Dominasi yang demikian, di Tarekat Cukir terbilang dominasi yang longgar yang tidak melahirkan resistensi dari kalangan murid.

Kemudian muncul pertanyaan, mengapa pihak murid menerima begitu saja tanpa memberikan catatan kritis? Hal itu karena sebuah aturan, konsep, bahasa atau wacana dipandang sebagai sesuatu yang legal tergantung kepada siapa yang memproduksinya atau mereproduksinya. Lembaga Tarekat Cukir memiliki otoritas untuk memproduksi atau mereproduksi tata adab ketarekatan, dan oleh karena itu hal tersebut dipandang sebagai suatu kebenaran. Siapapun yang berada di dalamnya harus patuh dan tunduk terhadap tata adab tersebut. Dengan demikian, dominasi mursyid atas murid terjadi pada dua ranah, yaitu ranah tarekat dan ranah politik melalui kekerasan simbolik. Di dua ranah itulah, pihak murid sebagai pihak terdominasi secara sadar atau tidak, harus patuh terhadap guru mursyidnya.

Secara hubungan *patron-client*, pola hubungan murid-mursyid memposisikan pihak mursyid sebagai *patron* karena kedudukannya lebih tinggi secara spiritual. Mursyid bisa saja menggunakan pengaruh dan berbagai modalnya untuk melindungi, dan mengantarkan spiritualitas murid sebagai *client* yang tentu kedudukannya lebih rendah menuju *ihsân*. Pada gilirannya nanti, pihak murid “membalas” dengan jasa-jasanya termasuk bantuan dukungan politik sesuai yang dikehendaki pihak *patron* (mursyid). Sebenarnya pihak *client* merupakan pihak yang terdominasi secara simbolik, yaitu terpengaruhi secara tidak sadar bahwa hal itu merupakan bentuk penindasan.

Kekerasan simbolik yang terjadi di lapangan menunjukkan operasinya melalui kekerasan secara tidak kelihatan, lembut tidak terasa, sehingga pihak murid terdorong menerima apa adanya. Apalagi pihak murid cenderung merasa sebagai pihak yang mengakui bahwa ia tidak tahu. Selain itu, kekerasan simbolik bekerja melalui doktrin ketarekatan yang sama-sama telah diketahui oleh pihak mursyid dan murid. Meskipun demikian, pada kasus Pilbub Jombang 2018, di lapangan tidak ditemukan adanya instruksi secara jelas dari guru mursyid terhadap murid agar memilih salah satu kandidat tertentu. Hal ini karena pihak mursyid (Kiai Maftuh)

berpandangan bahwa pihak murid telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya.

Temuan ini berbeda dengan temuan Setyawati (2017: 85-164) di lokasi lain tentang adanya upaya pemenangan salah satu kandidat tertentu pada kasus Pilbup Rokan Hulu 2011. Pada kasus itu, yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan doktrin tentang aturan adab tarekat kepada jama'ah agar tunduk dan patuh dengan instruksi Tuan Guru. Pada kasus tersebut, Tarekat *Naqsyabandiyah* mendukung salah satu kandidat disertai dengan arahan dari si mursyid terhadap jama'ahnya.

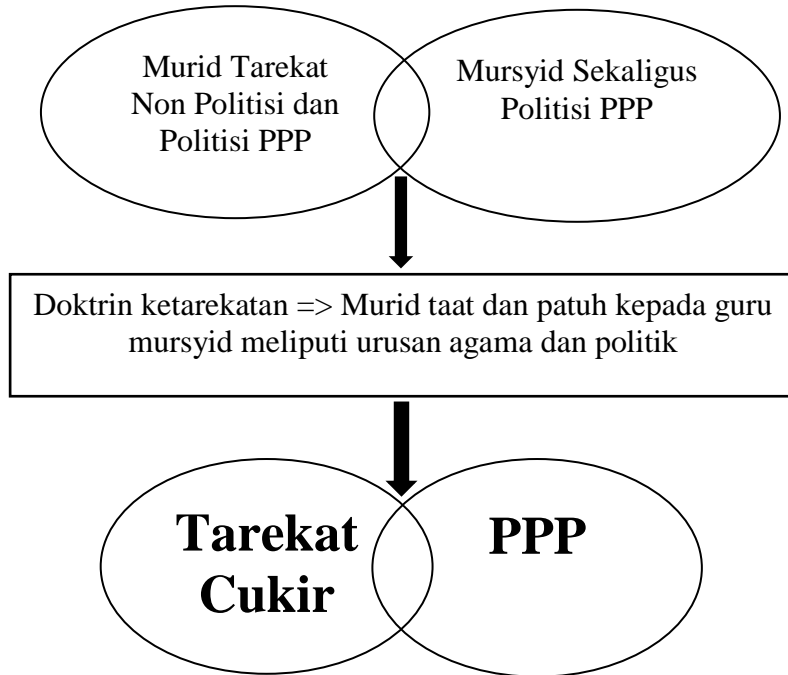
Kekerasan simbolik juga terjadi pada kasus lain pada kelompok tarekat, misalnya kasus pemberontakan petani Banten 1888 yang dimotori oleh kaum Tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*. Setidaknya ada 4 doktrin ajaran yang direproduksi Syekh Abdul Karim Banten, seorang petinggi Tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*, yang melahirkan terjadinya pemberontakan Banten 1888, yaitu tentang kedatangan Imam Mahdi (*Mahdiisme*), reproduksi peringatan terakhir Nabi Muhammad SAW saat khotbah Haji Wada', mendirikan Negara Islam, dan perang sabil atau *fi sabilillâh*. Begitu juga temuan Noupal (2016) yang hanya sedikit mengulang dari kajian Isnaeni di atas, yaitu gerakan Pan Islamisme yang ditampilkan kaum Tarekat di Banten 1888 menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kaum penjajah kolonial. Melalui doktrin-doktrin tersebut, mursyid mampu mendorong jama'ah melakukan pemberontakan terhadap penjajah. Begitu juga temuan, temuan Abdul Syukur (2014) bahwa doktrin *mahdiisme* dan *imâmah* dalam Tarekat Syafawi memberikan pengaruh yang kuat terhadap terbentuknya gerakan politik keagamaan di Iran pada abad ke 13.

Temuan-temuan di atas sekaligus memperkuat teori yang dikembangkan oleh Bourdieu bahwa dominasi simbolik melalui kekerasan simbolik seringkali berkerja tanpa disadari sebagai bentuk kekerasan oleh pihak terdominasi (1980:186).

Gambar di bawah ini menunjukkan apa yang terjadi di Tarekat Cukir, yaitu adanya relasi antara mursyid yang juga merupakan politisi PPP dengan para murid yang non politisi dan politisi PPP, kemudian melahirkan ekspresi melalui reproduksi doktrin ketarekatan bahwa murid harus patuh kepada mursyid dalam urusan

agama/ tarekat dan politik, yang mana keduanya merupakan dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisah. Dari ekspresi ini kemudian melahirkan relasi baru antara Tarekat Cukir dengan PPP, dan akan dibahas di bawah nanti.

**Bagan 5. Relasi Murid-Mursyid**



### 5.3.1. Simpulan

Praktik kepatuhan murid terhadap mursyid lahir dari adanya interaksi antara murid dengan mursyid. Masing-masing pihak dalam berinteraksi membawa habitus dan berbagai modalnya di arena tarekat. Mursyid cenderung memiliki habitus ketarekatan yang kuat dan modal yang cenderung lebih lengkap, dibanding dengan murid. Kasus di internal Tarekat Cukir menunjukkan pihak mursyid memiliki modal ekonomi, sosial, budaya, simbolik, dan mistis spiritual. Sementara murid memiliki modal ekonomi, sosial, budaya, simbolik. Di arena tarekat, modal yang paling dominan digunakan oleh mursyid adalah modal mistis spiritual dan budaya untuk mempengaruhi pihak murid.

Kehadiran habitus jama'ah Tarekat Cukir yang cenderung patuh kepada mursyid terbentuk dari proses sosialisasi tata adab ketarekatan dengan jama'ah tarekat dalam skala kecil, yaitu melalui perwakilan di setiap daerah kekuasaannya (*khalîfah*) dengan pertimbangan efektifitas. Selain itu, kekuasaan mursyid juga tampak menonjol pada berbagai acara-acara ritual Tarekat Cukir. Wujud kepatuhan menunjukkan adanya proses mendominasi dan didominasi, karena pihak yang memiliki habitus dan modal yang lengkap dan diekspresikan di arena yang tepat.

Di internal Tarekat Cukir, mursyid bermain dua kaki; satu kaki bermain di Tarekat dan kaki lainnya bermain di partai politik PPP, demikian halnya jama'ah yang umumnya menjadi pengurus tarekat. Proses interaksi antara mursyid yang politisi dan pengurus yang juga politisi menghasilkan sebuah pandangan bahwa murid harus patuh kepada mursyid dalam hal agama/ tarekat dan politik, yang selanjutnya menghasilkan interaksi baru, yaitu antara Tarekat Cukir dengan PPP.

## **5.2. Adanya Relasi antara Tarekat Cukir dengan PPP**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa adanya relasi antara Tarekat Cukir dengan PPP hari ini, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh internal Tarekat Cukir, utamanya terkait relasi murid mursyid, yang secara terdominasi murid tunduk dan patuh terhadap guru mursyid pada dua ranah, yaitu ranah tarekat dan ranah politik. Pada ranah politik, murid harus mengikuti pilihan politik guru mursyidnya. Para mursyid pendiri Tarekat Cukir merupakan orang-orang yang memiliki militansi yang tinggi terhadap PPP, sehingga membentuk relasi yang berkelanjutan, yakni sejak berdirinya tahun 1978. Dari relasi tersebut, tidak hanya terjadi proses saling memperkuat, tetapi juga terjadi proses persaingan untuk saling mempengaruhi, dan saling berupaya mendominasi dengan berbagai permainan strategi. Pada gilirannya, relasi ini melahirkan praktik sosial baru yaitu pilihan Tarekat Cukir terhadap PPP. Pada sub bab ini peneliti narasikan tentang habitus dan modal yang dimiliki Tarekat Cukir dalam proses terbentuknya praktik sosial Tarekat Cukir memilih PPP.

### **5.2.1. Habitus dan Modal dalam Proses terbentuknya Praktik Memilih PPP**

Fanatisme pilihan politik Tarekat Cukir terhadap PPP tidaklah terjadi begitu saja. Tetapi melalui proses panjang yang melibatkan pemerintah Orde Baru. Pada masa itu, strategi utama Orde Baru adalah deideologisasi dan deparpolisasi. Deparpolisasi telah memaksa partai-partai Islam terkumpul dalam satu partai PPP (Fachry dan Bachtiar, 1985). Ketika itu, partai Golkar yang didukung oleh penguasa, dengan segala modal dan strateginya mampu merebut suara kelompok-kelompok tarekat yang sebenarnya telah didukung kuat oleh masyarakat yang awalnya mendukung PPP. Salah satu kelompok tarekat yang tidak lagi mendukung PPP adalah Tarekat Rejoso. Tentu saja PPP merasa kecolongan dengan bergabungnya Tarekat Rejoso ke Golkar. Hal ini rupanya telah membuat orang-orang NU di PPP yang telah bertarekat memainkan strateginya untuk bertahan dengan membentuk kelompok tarekat tandingan di desa Cukir, yang sudah ada sebelumnya sebagai bagian dari kelompok Tarekat Rejoso. Oleh karena itu, sebenarnya tarekat ini jama'ahnya kebanyakan juga berasal dari Tarekat Rejoso yang tidak puas terhadap bergabungnya Kiai Musta'in Romli dengan Golkar. PPP merasa tertekan dengan kondisi ini, yang kemudian melahirkan resistensi. Kemudian PPP memainkan strateginya dengan meminjam orang-orang NU Cabang Jombang yang kesetiaannya terhadap PPP tidak diragukan lagi, di samping juga memiliki reputasi ilmu ketarekatan yang mumpuni. Melalui surat resmi dari NU Cabang Jombang bernomor 2095/Kpts/Tanf/B-I/1978 tentang pembentukan pengurus Thoriqot Al-Mu'tabaroh Cabang kabupaten Jombang. Surat tersebut ditandatangani oleh KH. Najib Wahab sebagai rois I, H. Mochammad Baidlowi sebagai ketua dan Drs. Hafidh Ma'shoem sebagai sekretaris. Hafidh Ma'shoem (09-02-2018) mengakui keterlibatannya:

“...itu saya yang membuat suratnya...”.

Dengan kata lain, sejak lahirnya Tarekat Cukir tahun 1978 sudah memiliki hubungan politis dengan PPP, sehingga saat ini Tarekat Cukir oleh masyarakat secara umum dipersepsikan sebagai Tarekat PPP, meskipun pihak Tarekat Cukir menolak sebutan itu.

Era Reformasi telah hadir di tengah masyarakat dan membawa arah angin politik berubah. Jika era Orde Baru di antara tandanya adalah penuh dengan tekanan dan pengekanan dari penguasa, maka era Reformasi cenderung membawa angin kebebasan. Arus informasi yang begitu cepat, baik melalui media cetak maupun media sosial, kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemerintahan reformasi telah sampai kepada para jama'ah Tarekat Cukir. Kebebasan berpolitik dan menyalurkan aspirasi politiknya telah dipahami oleh para jama'ah. Hal ini kemudian berpengaruh kuat terhadap sikap Tarekat Cukir. Jika era Kiai Makki yang mewajibkan kepada para jama'ahnya dalam urusan pilihan politik, maka tidak lagi diterapkan secara tegas pada era putranya, yaitu Kiai Maftuh Makki. Urusan pilihan politik diserahkan kepada para individu jama'ah. Seorang mursyid tidak bisa memaksa hak individu dalam hal pilihan politik. Tetapi murid juga harus mengerti apa yang menjadi pilihan politik gurunya. Apalagi, perbedaan pilihan politik si murid dari guru mursyidnya diyakini bisa berakibat pada putusannya hubungan spiritual antara keduanya.

Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi Tarekat Cukir tidak lagi mewajibkan jama'ahnya dalam kasus pilihan politik. *Pertama*, karena jama'ah dipandang sudah memahami apa yang harus dilakukan, terkait pilihan politik. *Kedua*, situasi dan kondisi negara pasca reformasi yang tidak memungkinkan untuk memaksa individu lain. *Ketiga*, partai Islam sebagai tempat penyaluran aspirasi politik yang tidak lagi tunggal. Jika masa Orde Baru hanya ada PPP, maka pasca reformasi ada PKS. *Keempat*, partai yang lahir dari NU tidak lagi tunggal: ada PKB, bahkan pada masa awal reformasi ada PKU, PKNU, dan PNU.

Struktur sosial obyektif yang demikian, disadari atau tidak, telah diinternalisasi oleh Tarekat Cukir, dan nantinya sedikit banyak berpengaruh terhadap situasi dan kondisi politik di internal Tarekat Cukir. Apalalagi beberapa tahun setelah itu, Tarekat Cukir ditinggalkan oleh salah seorang pendirinya, yaitu Kiai Makki Ma'shoem karena wafat. Dari proses internalisasi tersebut, Tarekat Cukir mengekspresikan sikap politiknya terhadap pemerintah juga berubah. Jika pada masa Orde Baru, Tarekat Cukir cenderung bersikap antagonis terhadap pemerintah, maka pada masa Reformasi

cenderung bersikap adaptatif. Sementara sikapnya terhadap PPP masih tetap sebagai pendukung PPP, meskipun dalam beberapa hal ada terjadi perbedaan. Misalnya Kiai Maftuh di masa-masa awal Reformasi menyeberang dan masuk dalam jajaran kepengurusan PKB, tetapi kemudian kembali lagi ke PPP.

Hal di atas menandakan, bahwa sebenarnya relasi antara Tarekat Cukir dengan PPP tidak begitu mulus adanya, melainkan ada proses pertarungan, dominasi dan resistensi, yang melibatkan habitus dan modal yang dibawa oleh masing-masing kelompok. Habitus erat kaitannya dengan modal, yang berfungsi sebagai sebagai pengganda dari jenis modal.

Proses terbentuknya habitus mendukung dan memilih PPP tidak lepas dari habitus yang telah terbentuk, yaitu patuh dan taatnya murid Tarekat Cukir kepada mursyid sekaligus politisi PPP, dan habitus PPP yang selalu menempatkan ulama (tarekat) di atas orang biasa berdasarkan pandangan kebenaran bahwa ulama merupakan warisan para Nabi (Gus JS, 07-07-2018). Jama'ah umumnya, masuk berbaiat tarekat tidak untuk memilih PPP, tidak untuk kepentingan dan tujuan politik, tetapi untuk memperoleh bimbingan spiritual untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT (15-10-2018). Umumnya para pengikut tarekat yang umurnya rata-rata 50 tahun ke atas masih ingat bagaimana militansi dan fanatik para tokohnya dalam mendukung PPP (15-10-2018). Demikian juga para pengikut yang umurnya di bawah mereka sesegera mungkin mengetahui bahwa mayoritas jama'ah Tarekat Cukir mendukung PPP. Hal ini juga tidak lepas dari pengaruh para pengurusnya yang mayoritas orang PPP. Tidak perlu mengeluarkan banyak energi sekedar untuk kampanye agar mencoblos PPP, tetapi cukuplah pengetahuan jama'ah bahwa pengurus Tarekat Cukir merupakan orang-orang PPP sebagai kampanye simbolis. Kemudian jama'ah menginternalisasi lingkungan yang ada di sekitarnya tersebut, dan dari proses tersebut timbullah keinginan untuk menyesuaikan dengan yang dikehendaki oleh pemimpinnya.

Habitus erat kaitannya dengan modal. Kelompok Tarekat Cukir yang memiliki habitus mendukung PPP, dan memiliki berbagai modal yang barangkali bisa dipertukarkan dengan apa yang dimiliki oleh PPP. Di bawah ini peneliti tampilkan berbagai modal



yang dimiliki oleh kelompok Tarekat Cukir. Oleh karena habitus mendukung PPP tidak hanya hadir dari internal tarekat tapi juga pengaruh dari pihak PPP, maka peneliti juga mengetengahkan beberapa modal dari PPP.

**Tabel 6. Sumber-Sumber Modal Kekuasaan Tarekat Cukir**

| <b>Jenis Kapital</b> | <b>Bentuk</b>  |
|----------------------|--|
| <b>Ekonomi</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keuangan dari infaq/ sedekah orang-orang yang minta keluarganya dido'akan</li> <li>- Keuangan dari kotak amal</li> <li>- Mobil operasional</li> </ul>   |
| <b>Simbolik</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para pengurusnya banyak yang berstatus sebagai kiai dan alumni pesantren salaf.</li> <li>- Para pengurusnya memiliki jabatan politik moyoritas di PPP atau sebagian kecil di partai lainnya, juga ada dari kalangan intelektual (dosen)</li> </ul>  |
| <b>Budaya</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki penguasaan liateratur klasik, baik tentang tauhid, fikih, maupun tasawuf.</li> <li>- Politik terapan (pelaku politik)</li> </ul>   |
| <b>Sosial</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan pengajian kaum perempuan (<i>muslimat tariqiyah</i>).</li> <li>- Jaringan ikhwan dan akhawat tarekat yang juga terlink dengan PPP.</li> <li>- Jaringan para kiai</li> <li>- Jaringan masyarakat pesantren di luar kaum tarekat.</li> </ul>   |
| <b>Spiritual</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi penasehat spiritual bagi bupati Jombang</li> <li>- Menjadi rujukan permohonan bantuan do'a bagi calon legislatif dari PPP khususnya dan partai lain pada umumnya</li> <li>- Menjadi tempat untuk dimintai pertolongan doa bagi keluarga jama'ah dan masyarakat.</li> <li>- Mengawal perkembangan ruhaniyah para murid tarekat.</li> </ul> |

Sumber: Temuan di lapangan, *Kiai Maftuh (11-07-2018)*, *Kiai Ikhsan (02-10-2018)*, *Kiai Kasmuri (14-08-218)*

**Tabel 7. Sumber-Sumber Modal Kekuasaan PPP**

| <b>Jenis Kapital</b> | <b>Bentuk</b>  |
|----------------------|--|
| ✓ Ekonomi            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aset tidak bergerak berupa gedung sekretariat.</li> <li>✓ Harta benda milik perorangan</li> </ul>   |
| ✓ Simbolik           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Berdirinya Tarekat Cukir merupakan peran dan jasa dari PPP</li> <li>✓ Organisasi politik resmi berasas Islam peserta Pemilu</li> <li>✓ Kepengurusannya banyak dihuni oleh para kiai NU/ Tarekat dan juga keturunan dari pendiri Ormas NU</li> </ul> |
| ✓ Budaya             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Para pengurusnya kebanyakan alumni pesantren dan sarjana.</li> <li>✓ Sebagian pengurusnya merupakan ahli dakwah/ muballigh</li> </ul>   |
| ✓ Sosial             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ jaringan simpatisan PPP, sebagian Muslimat NU</li> </ul>  |

Sumber: Temuan di lapangan, dan wawancara Gus JS (07-07-2018)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Tarekat Cukir memiliki modal sosial, budaya, simbolik, mistis spiritual, sementara modal ekonomi tidak terlalu signifikan. Modal sosial yang dimaksud adalah kepemilikan jaringan yang menghubungkan dengan para jama'ah. Modal budaya yang dimiliki Tarekat Cukir yaitu penguasaan keilmuan agama; termasuk ilmu tauhid, fikih dan ketarekatan, dan juga pelaku politik praktis. Secara simbolis mereka merupakan Kiai, minimal berstatus Kiai di kampungnya, alumni pesantren, memiliki jabatan di PPP, dan sebagian lagi sebagai dosen. Secara mistis spiritual, memiliki kemampuan mengobati yang bersifat rohani (batiniah), ilmu hikmah, ruqyah, dan lainnya. Sementara pihak PPP, terdapat modal sosial, ekonomi, budaya dan simbolik. PPP memiliki jaringan sosial melalui Organisasi Muslimat NU, yang kebanyakan anggotanya juga aktif di tarekat (Kiai LB, 08-07-2018). Secara simbolik, PPP menjadi icon bagi gerakan politik Tarekat Cukir. Hanya saja yang perlu menjadi catatan adalah sumber kekuasaan PPP yang terkait dengan modal ekonomi lebih bersifat pribadi/ perorangan.

Dari berbagai modal yang dimiliki oleh masing-masing kelompok ada yang dipertukarkan atau diberikan oleh satu pihak saja. Misalnya, Tarekat Cukir memiliki modal mistis spiritual yang dibutuhkan oleh sebagian kelompok PPP yang menginginkan belajar ketarekatan, meniti jalan menuju Allah SWT, terbukti dengan adanya pengurus PPP yang kemudian berbaiat di bawah naungan Tarekat Cukir (Kiai AA, 11-07-2018). Selain itu, Tarekat Cukir memberikan modal sosialnya dengan mengarahkan dukungan politiknya kepada PPP. Sebaliknya, bagi pihak Tarekat Cukir, mereka merasa tidak memperoleh manfaat dari PPP utamanya modal ekonomi (Kiai Maftuh, 11-07-2018), kecuali manfaat spiritual karena dengan memilih PPP berarti telah taat dan patuh kepada para guru mursyid, dan kekhawatiran putusannya ikatan rohani dengan guru menjadi hilang. Jelasnya, dalam hal ini modal sosial yang dimiliki oleh Tarekat Cukir tidak bisa ditukarkan dengan modal ekonomi dari PPP.

Selain habitus dan modal di atas, arena atau ranah merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam pembentukan praktik sosial dukungan Tarekat Cukir terhadap PPP. Ia merupakan ajang

perlombaan dan persaingan, di mana berbagai jenis modal yang dimiliki masing-masing kelompok disebarkan didayagunakan untuk saling mempengaruhi, sehingga lahir praktik mendukung PPP. Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa ranah atau arena yang membentuk relasi antara Tarekat Cukir dengan PPP terdapat permainan di dua ranah, yaitu ranah politik dan ranah tarekat/ spiritual, karena kedua kelompok tersebut bertemu dan saling mempengaruhi di kedua arena tersebut. Di dalam arena politik, PPP cenderung lebih mendominasi sementara dalam ranah tarekat/ spiritual Tarekat Cukir cenderung lebih mendominasi. Dominasi ini tidak begitu dirasakan oleh jama'ah Tarekat Cukir sebagai sebuah bentuk dominasi. Sebagaimana diungkapkan Kiai Maftuh (11-07-2018) tentang kepengurusan Tarekat Cukir yang mayoritas PPP tanpa mengekspresikan beban di wajahnya. Begitu juga konfirmasi Gus H (06-01-2019) dan Kiai AA (11-07-2018). Secara tidak sadar Tarekat Cukir telah dan sedang didominasi secara simbolik oleh pihak PPP.

Praktik memilih PPP sebagaimana yang terjadi di Tarekat Cukir, terdapat kemiripan dengan kasus yang terjadi pada kasus Tarekat *Qadiriyah wa Naqsyabandiyah* di Praya Lombok Tengah yang memiliki pola hubungan yang cenderung akomodatif dengan partai Golkar (Nasir, 2006). Nasir menjelaskan bahwa tarekat tersebut menjadi pendukung Golkar sejak 1970-an hingga penelitiannya dilakukan, yakni tahun 2005. Bahkan Akbar Tanjung mengunjunginya dua kali menjelang Pemilu Legislatif 2004, dan kemudian Golkar memperoleh kemenangan, jauh mengungguli partai-partai lainnya dalam perolehan kursi legislatif di Lombok Tengah. Hanya saja, Nasir secara jelas menyatakan bahwa ia kesulitan memperoleh informasi tentang kompensasi yang diperoleh elit tarekat tersebut. Kemungkinan Nasir ragu atau segan menanyakan tentang hal itu, sebagaimana yang sempat pernah peneliti (saya) alami di masa-masa penelitian ini dilakukan. Dalam hal ini, Tarekat Cukir tidak menerima bantuan berarti dari pihak PPP meskipun dukungan terus mengalir dari mereka.

Dari uraian di atas bisa dipahami bahwa Tarekat Cukir memiliki habitus patuh terhadap guru mursyid dalam persoalan agama dan politik, dan mereka juga cenderung berupaya taat

terhadap ajaran agama. Tarekat Cukir secara politik memiliki habitus kecenderungan memilih partai yang berideologi Islam, yaitu PPP. Dan secara agama cenderung ketat. Sementara PPP memiliki habitus meletakkan ulama/ Kiai tarekat sebagai pengurus PPP yang berdampak pada perekrutan orang-orang Tarekat Cukir menjadi pengurus PPP. Habitus kepatuhan murid kepada guru mursyid, telah menuntun Tarekat Cukir untuk memilih PPP sebagai wadah penyaluran aspirasi politiknya sesuai dengan pilihan politik guru mursyinya, berdasarkan keyakinan bahwa murid harus patuh kepada guru mursyid dalam urusan pilihan politik. Sementara pihak PPP memperkuatnya dengan mengemukakan isu historis bahwa memang Tarekat Cukir didirikan oleh orang-orang tarekat yang memiliki militansi yang tinggi terhadap PPP.

Secara modal, Tarekat Cukir memiliki modal ekonomi, budaya, sosial, simbolik, dan mistis spiritual. Dari kelima tersebut Tarekat Cukir lebih dominan menggunakan modal mistis spiritual dan modal simboliknya ketika berelasi dengan pihak lain. Sementara pihak PPP memiliki modal sosial, ekonomi, budaya, simbolik. Dari keempat tersebut, PPP lebih dominan menggunakan modal budayanya (sosial-politik) ketika berelasi dengan pihak lain.

### **5.2.2. Dominasi Simbolik PPP di Kepengurusan Tarekat Cukir, dan di Legislatif**

PPP dengan segala pendayagunaan modalnya, berupaya mampu mempertahankan dominasinya pada Tarekat Cukir. Sebaliknya, Tarekat Cukir juga berupaya mewarnai PPP, dan mampu menjadi filter bagi perilaku politik partai tersebut (Kiai Maftuh, 11-07-2018). Pada akhirnya, terjadi upaya saling mendominasi. Hanya saja, dalam kondisi tertentu Tarekat Cukir melakukan resistensi dan perlawanan terhadap dominasi PPP, utamanya dalam kasus Pilbup Jombang 2018.

Informasi awal dari beberapa kajian sebelumnya menyebutkan bahwa terdapat wasiat dari pendiri Tarekat Cukir untuk memilih PPP (Nur Syam, 2004). Kata “wasiat” sengaja peneliti bubuhkan tanda petik, dimaksudkan untuk menyebut pesan dari para pendiri Tarekat Cukir terdahulu yang kini sudah wafat. Pada masa hidupnya, mereka berpesan agar para jama'ah Tarekat Cukir

memilih PPP. Tentang hal ini, Kiai Maftuh (11-07-2018) kemudian mengonfirmasi:

“...Itu sifatnya perorangan. Suatu contoh kami dengan Abah (Kiai Makki Ma’shoem). Jadi, orang tua kepada anak. Tapi kalau dari organisasi tidak ada...”

Hanya saja, secara lebih detail, Kiai Maftuh (11-07-2018) menjelaskan bahwa sebenarnya yang terpenting bukanlah nama partainya, tetapi wadah politik yang berasaskan Islam. Kemudian Kiai Maftuh membandingkannya dengan PKB yang tidak berasaskan Islam, meskipun sama-sama memiliki basis massa yang sama, yaitu NU:

“...Kalau wasiatnya Abah, Kiai Adlan cuma gini: lek ancene PPP wes ndak enek, yo miliho partai seng asase Islam. PKB kan bukan partai yang asase Islam...” Terjemah: “...Kalau wasiatnya Abah, (dan) Kiai Adlan hanya seperti ini: kalau memang PPP sudah tidak ada, maka pilihlah partai yang asasnya Islam...”

Kiai Maftuh adalah putra salah satu pendiri Tarekat Cukir yang telah memberi wasiat secara personal kepada Kiai Maftuh agar memilih PPP yang berasaskan Islam. Pada saat itu, partai yang berasaskan Islam hanya PPP, dan oleh karena itu untuk menyalurkan suara politik harus melalui wadah yang berasaskan Islam. PPP sendiri di era ini masih menjadi peserta Pemilu 2018 dan berasaskan ideologi Islam. Oleh karena itu, proses relasi cenderung dilanjutkan. Hal ini berbeda dengan PKB yang berasaskan Pancasila, meskipun memiliki *garssroot* yang sama, yaitu orang-orang NU, akan tetapi tidak dijadikan sebagai bidikan pilihan penyaluran aspirasi.

Bagi Tarekat Cukir agama dan politik merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Kiai Maftuh (11-07-2018) menyatakan:

“...kita harus bisa membedakan antara politik dengan agama. Beda, tapi tidak boleh dipisah, tidak boleh berat salah satunya”.

“...*al-dîn wa al-mulûk ka jismin wâhid*. Dadi lek pemerintah dan agama tidak bisa dipisah...” terj. “...agama dan pemerintahan seperti satu jasad. Jadi kalau pemerintah dan agama tidak bisa dipisah...”.

Tarekat Cukir meyakini bahwa antara agama dan pemerintah ibarat satu tubuh. Keduanya merupakan dua bagian yang tak terpisah, meskipun keduanya berbeda dan tidak boleh berat salah satunya.

Secara politik aliran, Tarekat Cukir bisa dikatakan sebagai kelompok politik aliran Islam Tradisional (Feith, 1970). Artinya Tarekat Cukir yang integral dalam ormas NU, memiliki partai PPP sebagai pemersatu dalam negara, sehingga Tarekat Cukir bisa dikatakan sebagai kelompok penganut partai yang memang dijadikan pemersatu dalam negara Indonesia. Dalam konteks politik Islam Indonesia, Tarekat Cukir bermazhab Formalisme Islam. Sebagaimana diketahui bahwa dalam konteks politik Islam Indonesia, setidaknya ada tiga mazhab yang berkembang dalam persoalan politik Islam, yaitu Formalisme Islam, Substansialisme Islam, dan Sekulerisme Islam (Qodir, 2012: 8-59). Formalisme Islam merupakan paham yang menghendaki Islam sebagai dasar negara. Tentu saja yang dimaksud adalah berdasarkan Alquran dan Alhadis, bukan Pancasila yang merupakan buatan manusia. Substansialisme Islam yaitu mazhab yang berpandangan bahwa sebuah negara tidak harus secara formal berbentuk negara Islam, tetapi secara substansial etika Islam memberikan warna dalam pengelolaan kenegaraan. Sekulerisme Islam yaitu mazhab yang berpandangan bahwa Islam dan negara merupakan dua bagian yang terpisah. Dalam hal ini, negara tidak perlu mengurus masalah ibadah dan akidah yang menjadi urusan agama. Sebaliknya, agama tidak perlu mengurus persoalan sosial kemasyarakatan yang menjadi urusan negara.

Pandangan di atas tampaknya berangkat dari kerangka besar teori hubungan Islam dan Negara. Syadzali (1990: 1-3) dan juga Kamsi (2017: 87) memerikan setidaknya ada tiga pandangan tentang hubungan Islam dan negara. *Pertama*, perspektif integralistik. Islam merupakan agama yang memiliki tata adab yang lengkap di semua lini kehidupan manusia; termasuk di dalamnya aspek kehidupan berpolitik. Pandangan ini menitikberatkan pada tatanegara atau politik yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh Muhammad SAW dan empat sahabat yang menjadi khalifah setelahnya. *Kedua*, sekuleristik Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan tata-politik atau ketatanegaraan. Pandangan ini meyakini

bahwa Nabi Muhammad memiliki misi tunggal, yaitu mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia, akhlaqul karimah, dan tidak mendirikan negara. *Ketiga*, simbiotik. Pandangan ini menolak pandangan yang pertama dan kedua. Pandangan ini meyakini bahwa Islam itu memiliki seperangkat tata nilai dan etika dalam berbangsa dan bernegara, namun tidak memiliki satu sistem ketatanegaraan yang jelas.

Penganut tarekat oleh para ahli seperti Geertz (1989), Gaffar (1990), dan Jakson (1990), dikategorikan sebagai Islam santri, Islam taat atau *strong* santri. Bagi pengikut tarekat, Islam merupakan pedoman bagi totalitas kehidupan, sehingga segala persoalan hidup bisa diselesaikan oleh Islam, baik kaitannya dengan hubungan sesama manusia maupun hubungan dengan Tuhan. Perjuangan politik bagi para pengikut tarekat dipandangan sebagai bagian dari aktifitas keagamaan, dan oleh karena itu berpolitik adalah bagian dari ajaran Islam yang harus dijalankan.

Tarekat Cukir termasuk kelompok yang mengikuti model hubungan agama dan negara yang berpandangan bahwa Islam itu agama yang sempurna, di dalamnya ada tata-aturan yang mengatur di semua lini kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Tarekat Cukir berpandangan bahwa terdapat hubungan formal antara agama dan politik. Dengan kata lain, Islam sebagai agama tidak bisa dipisahkan dari Islam sebagai ideologi politik. Tarekat Cukir lebih memandang tarekat sebagai *wadah* daripada *cara*. Tarekat sebagai cara, meniscayakan tidak bisa dipisahkannya tarekat dari politik. Sebab, politik itu merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan, sebagaimana halnya juga tarekat yang merupakan cara untuk beribadah mendekati diri kepada Allah SWT. Oleh karena politik itu merupakan cara untuk mencapai sebuah tujuan, maka tidak ada larangan bagi kaum tarekat untuk berpolitik, dengan catatan tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu kepentingan Islam. Sementara itu, tarekat sebagai wadah meniscayakan terpisahnya wadah tarekat dari wadah politik (partai). Tarekat merupakan wadah untuk beribadah mendekati diri kepada Allah SWT, sedangkan politik adalah wadah untuk mencapai kepentingan duniawi. Itulah mengapa keduanya tidak bisa dicampurkan. Hanya saja, dalam berpolitik umat Islam harus

memiliki wadah yang bersimbolkan Islam atau partai yang memiliki asas Islam (Sujuthi, 2001: 158-159).

Temuan ini cenderung mengkonfirmasi temuan Sujuthi, bahwa Tarekat Cukir memaknai tarekat sebagai wadah, yaitu sebuah wadah untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT, demikian halnya politik merupakan wadah untuk mencapai kepentingan duniawi. Jadi, antara tarekat yang berorientasi keakhiratan dan politik yang berorientasi keduniaan tidak boleh dicampur. Tetapi dalam mencapai cita-cita kepentingan Islam, umat Islam harus menyalurkannya melalui wadah atau alat yang Islami, misalnya partai yang berasas Islam. Sehingga, relasi tarekat dan politik itu bersifat formal. Hanya saja, temuan Sujuthi di atas, terkait erat dengan pilihan PPP, belum menyentuh masalah pilihan kepala daerah seperti dalam kajian ini. Sebab, Kiai Maftuh sendiri membedakan antara kasus memilih partai politik dan memilih kepala daerah (Kiai Maftuh, 11-07-2018). Oleh karena itu temuan ini sekaligus melengkapi temuan Sujuthi tersebut.

Pandangan semacam ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pihak PPP. Secara strategis, pihak PPP menempatkan mursyid dan beberapa jajaran pengurus Tarekat Cukir sebagai pengurus di DPC PPP Jombang, dengan alasan bahwa ulama merupakan pewaris para Nabi dan oleh karena itu harus diletakkan di atas (Gus JS, 07-07-2018). Hal yang demikian ini disambut secara positif oleh pihak Tarekat Cukir. Tidak mengherankan jika terdapat banyak pengurus Tarekat Cukir menjadi pengurus di PPP. Apalagi Kiai Maftuh sebagai mursyid berposisi sebagai ketua Majelis Syari'ah di DPC PPP Jombang, tentu akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pilihan politik para jama'ah.

Sebagai pemilik otoritas, Kiai Maftuh juga mereproduksi makna di balik pesan yang disampaikan oleh Kiai Adlan, dengan tekanan bahasa yang agak berbeda, bahwa kecenderungan Tarekat Cukir terhadap PPP bukan hanya soal partai yang berasaskan Islam, tetapi karena adanya kesamaan kultural:

“...Itu dari kulturalnya saja mas. Kalo Mbah Adlan sampai sekarang, gak ada yang mewajibkan. Cuma bahasane Mbah Adlan, lek aku nduk kene, lek awakmu pengen tetep kepetuk aku yo...”. Terjemah: “...Itu dari kulturalnya saja mas. Kalau



(zaman) Mbah Adlan sampai sekarang, tidak ada (mursyid) yang mewajibkan. Hanya saja bahasa Mbah Adlan, kalau aku di sini (PPP), kalau kamu masih tetap ingin bertemu denganku...” (Kiai Maftuh, 11-07-2018)

Redaksi “kepethuk” (bertemu) pada kalimat di atas bisa dimaknai secara jasmani dan rohani. Karena kalimat tersebut diucapkan oleh seorang guru spiritual; mursyid sekaligus seorang politisi. Secara jasmani, jika jama’ah memilih memilih PPP, itu artinya mereka masih bisa bertemu, karena Kiai Adlan posisinya sebagai petinggi PPP. Sebaliknya, jika ada jama’ah yang memilih selain PPP (terutama saat itu), maka ia dipandang telah keluar dari kelompok di bawah pimpinan Kiai Adlan. Perjumpaan secara rohani, bisa dimaknai jika ada jama’ah yang memilih partai selain PPP, maka ia telah terputus hubungan rohaninya dengan Kiai Adlan al-Mursyid. Jadi, meskipun saat ini Kiai Adlan telah wafat, tetapi efek dari pesan tersebut masih menghegemoni jama’ah Tarekat Cukir, dan pengaruhnya masih bisa terlihat. Kiai Maftuh menyatakan:

“...Itu karena hubungannya dengan *nûr* (cahaya). Karena di (kitab) *Manâqib* kan ada “*wa al-mukhâlafatu sabab al-firâq*”. Kalau kita khilaf dengan guru, di sana pisahnya mas. Kalau thoriqoh sich, bukan thoriqohnya PPP...” (11-07-2018)

Peneliti memahami kalimat di atas sebagai bahasa sindiran yang memuat kekerasan simbolik. Dengan kata lain, antara guru tarekat/ mursyid - murid tidak hanya berlaku hubungan lahiriyah, tetapi juga hubungan batiniyah. Dalam hubungan ini, si murid tidak boleh menentang guru tarekat, termasuk dalam pilihan politik. Berbeda pilihan politik berarti bertentangan guru mursyid. Inilah yang menjadi pegangan kebenaran bagi kelompok Tarekat Cukir hingga sekarang. Hanya saja, Tarekat Cukir tidak bisa menyampaikannya dalam bentuk maklumat yang bersifat perintah. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik Negara Indonesia, pasca Reformasi yang mengusung kebebasan menyuarakan aspirasi, sehingga tidak memungkinkan intervensi secara jelas masalah pilihan politik yang menjadi hak individu jama’ah tarekat. Temuan ini agak sedikit berbeda dengan temuan Nur Syam (2005) yang cenderung tegas menyatakan bahwa para pendiri Tarekat Cukir mewajibkan jama’ah Tarekat Cukir memilih

PPP. Ini berarti bahwa perubahan praktik ini lahir dari pengaruh kondisi struktur obyektif yang ada.

Pengaruh kebebasan di Orde Reformasi juga berdampak pada perubahan di internal Tarekat Cukir, misalnya terkait Kiai pengisi pengajian (penceramah). Meskipun hingga pada masa-masa awal tahun 2005, Tarekat Cukir masih menggunakan pengisi dari tokoh PPP, yakni Kiai Maimoen Zubair (Gus Fuad, 15-10-2016). Namun, setelah itu Tarekat Cukir lebih terbuka, dengan memanfaatkan penceramah dari luar PPP, misalnya dari pengurus PKB, yaitu Kiai Marzuki Mustamar. Hanya saja, yang menjadi catatan adalah penceramah dari luar PPP tersebut sudah menjadi pengikut tarekat dan materi yang disampaikan cenderung *nuwek'i* (nuturi dengan bijak), tidak butuh penceramah yang penggemarnya banyak namun materi ceramahnya banyak bercandanya, sehingga memungkinkan berakibat pada hilangnya inti pesan ceramah. Lebih dari itu, saat ini Tarekat Cukir tidak lagi melihat latar belakang partainya, dan tidak perlu membawa politik di acara resmi ketarekatan. (Kiai Maftuh, 11-07-2018)

Namun demikian, hal yang perlu ditegaskan kembali bahwa dalam kepengurusan Taarekat Cukir didominasi oleh orang-orang yang aktif di PPP (lihat bab sebelumnya). Setidaknya terdapat 81,58% dari keseluruhan jumlah 38 personil pengurus. Dari PKB ada 7,89 % atau 8%. Sementara itu, ada sejumlah 4 orang yang netral, termasuk satu di antaranya merupakan akademisi (10,53 atau 10%). Oleh karena itu, tidaklah mengagetkan jika orientasi pilihan politik Tarekat Cukir terhadap PPP begitu mencolok. Hal tersebut diperkuat dengan adanya perubahan Tarekat Cukir, dari perkumpulan atau *jam'iyah* menjadi yayaan, yang dipelopori pula oleh orang-orang PPP. Tampak terlihat dari susunan pendiri Yayasan Jam'iyah Tarekat Cukir 2016. Hal ini juga diakui oleh Gus JS yang merupakan pengurus penting DPC PPP Jombang, dan keterangan Kiai Maftuh juga turut memperkuatnya.

**Tabel 8. Susunan Organ Yayasan  
Kepengurusan Inti Yayasan “Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh  
Al-Mu’tabaroh Qadiriyyah Wan Naqsyabandiyyah An-  
Nahdliyyah” Cukir Jombang Nomor AHU-0017834.AH.01.04.  
Tahun 2016**

| No. | Nama               | Organ Yayasan | Jabatan    |
|-----|--------------------|---------------|------------|
| 01. | Ahmad Sholihuddin  | Pembina       | Ketua      |
| 02. | Sundusin           | Pembina       | Anggota    |
| 03. | Supriaji           | Pembina       | Anggota    |
| 04. | M. Maftuh Makki H. | Pengurus      | Ketua      |
| 05. | Nuryanto           | Pengurus      | Sekretaris |
| 06. | Sutadi Effendi H.  | Pengurus      | Bendahara  |
| 07. | Kasmuri H/ Choiri  | Pengawas      | Ketua      |
| 08. | HM. Anwar          | Pengawas      | Anggota    |
| 09. | Sulaiman           | Pengawas      | Anggota    |

*\*Nama-nama di atas semuanya merupakan pengurus PPP (Ket. Gus JS sebagai pengurus DPC PPP Jombang)*

Kentalnya aroma PPP di tubuh Tarekat Cukir memang tidak lepas dari pengaruh kuat para pendirinya dan dilestarikan hingga kini. Kiai Maftuh sebagai mursyid dan para jama’ah Tarekat Cukir telah sama-sama meyakini kebenaran tentang keharusan seorang murid taat dan patuh kepada guru mursyidnya, selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Hal itu telah menuntun mereka pada pembentukan tindakan atau praktik memilih PPP, yang dipandang sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan terhadap para pendahulu mereka yang telah tiada. Hal itu dipegang kuat oleh kelompok Tarekat Cukir hingga saat ini. Antara Tarekat Tarekat Cukir dengan PPP, menurut Hafidh Ma’shoem (09-02-2018), dan Kiai Maftuh, terdapat hubungan spiritual, secara ruh, atau “*partner ruhiyah*”. Oleh karena itu, hubungan tersebut harus dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap mursyid dan sebagai upaya mempertahankan hubungan ruhiyah tersebut, dan tentu saja dengan catatan selama PPP masih berideologi Islam. Jika pada saatnya nanti ditemukan adanya kekurangan atau kesalahan di dalam partai tersebut, maka tidak perlu dengan cara meninggalkannya, tetapi justru harus masuk ke dalam dengan cara memperbaiki dan membenahinya (Kiai AA, 11-07-2018).

Sejarah panjang relasi antara Tarekat Cukir dengan PPP telah menjadi sebuah habitus bahwa pengurus Tarekat Cukir banyak yang merangkap jabatan di organisasi politik PPP. Kiai AA, secara pengalaman pribadi menyebutkan bahwa ia telah aktif terlebih dahulu di PPP, kemudian masuk tarekat dan setelah itu diangkat menjadi pengurus, meskipun di tingkat *Ghusniyah* (Kiai AA, 11-07-2018). Itulah mengapa, hubungan emosional antara PPP dengan Tarekat Cukir terus berlanjut dan semakin kuat hingga sekarang. Pandangan Kiai AA tampaknya mewakili pandangan beberapa jama'ah yang peneliti temui, bahwa pesan tersebut dipandang sebagai wasiat yang harus dijalankan.

Namun demikian, dualisme jabatan sebagaimana di atas, rupanya telah menimbulkan persoalan baru, utamanya bagi jama'ah tarekat yang juga aktif di partai politik. Seperti yang diungkapkan Kiai AA, aktifis PPP dan pengurus *ghusniyah*:

“Kate ngritik, tp kok mursyid. Kate gak dikritik, tp beliau aktif no PPP” (Terj: Mau saya kritik, tapi kok statusnya mursyid. Mau tidak mengritiknya, faktanya dia aktif di PPP)”. (11-07-2018)

Kebingungan ini terkait erat dengan tata adab murid terhadap mursyid yang dipandang sebagai sebuah kebenaran tanpa perlu dipertanyakan, dan wajib dilaksanakan di kalangan para jama'ah. Menyalahinya merupakan sesuatu yang nista. Di satu sisi, ia ingin menyampaikan kritiknya kepada si mursyid yang kapasitasnya sebagai politisi, karena memang sama-sama di PPP nya. Tetapi di sisi lain, sebagai seorang jama'ah, ia merasa canggung karena dianggap tidak beradab jika menyampaikan kritiknya karena ia merupakan guru yang menuntunnya. Praktik diamnya Kiai AA ini menunjukkan kepatuhannya terhadap mursyid, dan merupakan praktik dari hasil internalisasinya dengan tata adab ketarekatan yang direproduksi oleh pihak otoritas Tarekat Cukir. Kiai AA dan teman-temannya menginginkan adanya perubahan, yaitu pemisahan antara status mursyid dan sebagai politisi PPP. Dengan kata lain, seorang mursyid seharusnya murni sebagai mursyid dan tidak terlibat politik praktis. Hal ini dimaksudkan untuk menyelamatkan posisinya sebagai mursyid. Tetapi bagaimanapun juga, sepertinya agak sulit mengubah tradisi yang sudah berjalan sekian lama di dalam tubuh

Tarekat Cukir, dan sudah menjadi habitus bahwa ketika seseorang statusnya sebagai mursyid di Tarrekat Cukir, maka ia sekaligus akan aktif di jajaran politisi PPP.

PPP yang memiliki kepentingan politik elektoral lima tahunan cenderung berupaya mempertahankan hubungan ini. Upaya dominasi terus dilakukan, melalui pelestarian isu hubungan historis antara kedua kelompok tersebut. Gus JS (07-07-2018) menyatakan:

“PPP tidak mewarnai secara langsung, tetapi mewarnai Tarekat Cukir secara ruh. Karena hal itu sudah dibangun oleh para pendahulunya. Kita tidak pernah intervensi. Kita tidak pernah mengarahkan. Kita hanya lebih karena ke sejarah itu”.

Meskipun demikian, faktanya PPP tidak hanya mewarnai secara ruh, tetapi juga mewarnai secara fisik sebagaimana yang tampak di kepengurusan Tarekat Cukir dan kepengurusan Yayasannya. PPP sendiri sebenarnya juga tidak mau, seandainya Tarekat Cukir lepas begitu saja dari dominasi simbolik PPP tersebut. Dominasi simbolik merupakan bentuk kekerasan simbolik atau kekerasan yang tak terlihat oleh mata. Jadi, sebenarnya PPP mempengaruhi Tarekat Cukir tanpa dirasakan atau dilihat oleh Tarekat Cukir sebagai kekerasan. Tarekat Cukir pun tidak merasa sebagai korban kekerasan. Bahkan sebaliknya, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah terjadi. Seperti apa yang dikatakan salah seorang jama'ah bahwa anjuran untuk memilih PPP oleh tokoh-tokoh terdahulu, seperti Kiai Adlan Aly, Kiai Makki Maksud dan lainnya sebagai bentuk perjuangan Islam yang harus dijalankan (Sunari, 15-10-2018). Sebagian di antara mereka hari ini masih mempercayai pesan tersebut, bahkan mereka menerima begitu saja sebagaimana mestinya, bahwa apa yang dikatakan mursyid tarekat sekaligus politisi PPP tersebut dianggap sebagai benar. Karena diucapkan oleh tokoh yang secara teologis dipandang sebagai orang dekat dengan Tuhan.

Meskipun PPP begitu kuat mendominasi, akan tetapi ditemukan fakta tentang adanya upaya-upaya perubahan yang dilakukan oleh Kiai Maftuh. Misalnya Kiai Maftuh mencoba menampilkan dirinya secara berbeda dengan generasi sebelumnya, terkait pilihan politik. Kondisi lingkungan yang ada tampaknya sangat berpengaruh terhadap tindakan Kiai Maftuh dalam

menentukan langkah politiknya menjadi bagian dari PKB yang notabene partai rival PPP. Keduanya sama-sama berebut pendukung dengan basis utamanya dari kalangan warga NU. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa awal-awal munculnya Orde Reformasi yang bercirikan kebebasan, partai-partai baru tumbuh bagaikan rumput yang tersiram air hujan, setelah sekian lama mengalami kekeringan. Dari kalangan orang-orang NU sendiri, setidaknya tercatat beberapa partai yang berdiri, di antaranya, PKB, PKNU, dan PKU. Ketika itu, Abdurrahman Wahid membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditujukan untuk mewadahi aspirasi warga NU. Praktis suara warga NU menjadi terpecah; aspirasi yang dulu banyak diarahkan ke PPP, mau tidak mau harus berbagi suara dengan PKB.

“Sejak awal berdirinya, kaum tarekat di sini selalu mengarahkan pilihan politiknya ke PPP. Lalu, pada saat masa awal berdirinya PKB yang didirikan oleh Gus Dur, para jamaah sempat goyah, karena sebagian jama’ahnya menjatuhkan dukungan politiknya ke PKB. Itulah mengapa pada saat itu, PPP memiliki pesaing baru yang terbilang berat setelah Golkar”. (Gus Fuad, 15-10-2016)

Tetapi kontrol dari PPP begitu kuat. Kiai Makki, ayah kandung Kiai Maftuh, di kemudian hari mengetahui bahwa putranya masuk dalam jajaran kepengurusan PKB. Entah apa yang terjadi, tetapi yang jelas di kemudian hari, Kiai Maftuh mengundurkan diri dari PKB dan lebih memilih menjadi pengurus PPP. Kiai Makki sendiri merupakan salah satu pengurus PPP yang militan dan salah satu tokoh di balik berdirinya Tarekat Cukir. Militansi Kiai Makki, penceramah yang mengisi pengajian dalam acara rutin “Senenan” Tarekat Cukir harus orang-orang terpilih dan terpercaya bahwa ia orang yang pro PPP. Pernah suatu ketika, Kiai Makki menanyai salah seorang penceramah pasca coblosan Pemilu, sekedar memastikan bahwa ia memilih PPP atau partai yang lain. Hal ini nantinya akan berakibat fatal jika ia jujur bahwa yang dipilihnya ternyata bukan PPP. Demikian ketatnya usaha Kiai Makki untuk selalu menghubungkan Tarekat Cukir dengan PPP, sampai-sampai hak jama’ah dalam Pemilu yang bersifat LUBER pun (Langsung Umum Bebas dan Rahasia) bisa diintervensi. Hal itu terjadi pada

saat kepengurusan Tarekat Cukir dipegang oleh Kiai Makki, dan pengaruhnya bisa dirasakan hingga era putranya, yaitu Kiai Maftuh.

Setidaknya, ada beberapa alasan mengapa PPP tidak mau melepasnya. *Pertama*, melanggengkan sejarah, bahwa Tarekat Cukir sejak dulunya berelasi dengan PPP. *Kedua*, PPP menempatkan ulama di atas dari kepengurusan yang eksekutif, karena ulama dipandang sebagai warisan para nabi. Bahkan seandainya Kiai Maftuh tidak lagi aktif di PPP, relasi tersebut harus tetap dilanjutkan (Gus JS, 07-07-2018):

“Seandainya Gus Tuh (Kiai Maftuh) dikeluarkan dari PPP, dan hanya menjadi mursyid saja, maka PPP tetap membangun relasi dengan Tarekat Cukir”.

Sebaliknya, Tarekat Cukir sebenarnya juga menginginkan untuk mewarnai PPP. Kiai Maftuh memiliki tujuan agar Tarekat Cukir bisa “mentarekatkan” orang-orang PPP. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak di antara orang-orang PPP yang menjadi bagian dari kepengurusan Tarekat Cukir, satu di antaranya adalah Kiai AA yang merupakan pengurus PPP Jombang dan kemudian menjadi bagian dari kepengurusan Tarekat Cukir, meskipun setingkat kecamatan (Kiai AA, 11-07-2018). Apalagi, umumnya yang menjadi pengurus, adalah orang yang berstatus kiai pula di kalangan masyarakatnya, sehingga dengan segala modalnya ketika berelasi dengan masyarakat, ia mampu tampil mempengaruhi mereka. Dengan demikian, telah terjadi dua kelompok yang masing-masing memiliki keinginan mendominasi. Di satu sisi, PPP tetap ingin mewarnai Tarekat Cukir meskipun secara ruh. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit simpatisan PPP di kemudian hari berbaiat di Tarekat Cukir. Kiai Maftuh (11-07-2018) mengatakan:

“...Kalo thoriqot itu tidak ada hubungannya dengan partai, sampai sekarang tidak ada. Cuma ketepatan mulai Mbah Yai Adlan sampai sekarang yang mendominasi thoriqoh di Cukir itu orang PPP semua. Ndak ada hubungan dengan partai. Dan dari kami pun memberi kebebasan. Cuma jangan sampai thoriqohnya dibawa ke partai. Partainya saja yang dibawa ke thoriqoh. Jadi, partainya dibawa ke thoriqoh jangan sampai thoriqohnya dibawa ke partai. Nah, kepingin kami lek (kalau) partainya mau dibawa ke thoriqoh biar ada filternya. Saya sendiri orang politisi mas...”.

Dengan kata lain, bahwa dominasi orang-orang PPP di kepengurusan Tarekat Cukir, sekaligus menunjukkan bentuk dominasi Tarekat Cukir karena mampu mempengaruhi mereka di bawah naungan kekuasaan Tarekat Cukir. Kasus ini memperkuat teori bahwa dominasi itu tidaklah bersifat konstan, tetapi ia bersifat dinamis.

Tampak di lapangan, dominasi PPP tidak hanya terlihat pada kepengurusan Tarekat Cukir, tetapi juga tampak pada level dewan perwakilan rakyat tingkat daerah. Dalam hal ini, orang-orang PPP Non Tarekat banyak mendominasi di legislatif Jombang. Sebagaimana tersebar informasi bahwa calon anggota legislatif dari fraksi PPP saat ini didominasi oleh kelompok “Wahhabi”. Sebutan “Wahhabi” sendiri merujuk pada sindiran bagi keluarga keturuanan Kiai Wahab Chasbullah (pendiri NU) yang banyak mengajukan diri sebagai calon legislatif (caleg), setelah sebelumnya Mundjidah memenangkan Pilbup Jombang 2018.

Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada masa sebelumnya, yakni masa Orde Baru. Pada masa itu, orang-orang PPP mendominasi dalam kepengurusan Tarekat Cukir juga di legislatif. Misalnya, Kiai Syansuri Badawi anggota DPR dari faksi PPP, Kiai Adlan Aly menjadi anggota DPR 1987-1992 dari fraksi PPP, Kiai Makki Ma'shoem anggota DPRD Jombang dari fraksi PPP. Pasca datangnya reformasi, justeru tidak tampak pengurus Tarekat Cukir yang tampil menjabat sebagai anggota legislatif dari fraksi PPP, tepatnya pasca Kiai Makki Ma'shoem. Setidaknya, hanya ada satu nama yang pernah tercatat sebagai anggota legislative pada tahun 1999, hanya saja ia mengalami kegagalan pada masa-masa berikutnya. Ia adalah Nuryanto pejabat sekretaris Tarekat Cukir yang wafat pada pertengahan tahun 2018 karena kecelakaan mobil di Tol Wilangan Saradan-Nganjuk.

Nuryanto, ia merupakan saudara ipar dari Kiai Maftuh. Menurutny, terpilihnya Nuryanto sebagai salah satu anggota legislatif dari fraksi PPP Jombang lebih karena faktor keberuntungan. Maksudnya, ia diuntungkan oleh sistem Pemilu yang memprioritaskan nomor urut. Lima tahun telah berlalu, Nuryanto tidak lagi duduk di legislatif sebagai wakil rakyat. Kedudukannya kembali seperti semula: yaitu sekretaris di Tarekat



Cukir dan sebagai salah satu fungsionaris di PPP Jombang. Pada proses Pemilu berikutnya, ia mengajukan yang kedua kalinya sebagai calon anggota legislatif. Hanya saja, untuk kali ini sistem pemilu berubah, yakni tidak lagi berdasarkan nomor urut, tetapi model pemilihan langsung yang lebih menonjolkan individunya. Secara pribadi, Nuryanto tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat, baik masyarakat biasa maupun masyarakat di internal Tarekat Cukir. Ia lebih dikenal tanda tangannya daripada pribadi orangnya. Dengan modal sosial yang minim, dan modal ekonomi yang tidak memadai, Nuryanto tidak mampu memainkan strateginya untuk memperoleh dominasi suara dalam pemilihan legislatif. Akhirnya ia kalah dalam perebutan kursi legislatif tersebut (Kiai Maftuh, 11-07-2018). Hal ini berarti, sebenarnya perolehan posisi Nuryanto di internal Tarekat Cukir lebih karena unsur nepotisme. Artinya, dilihat dari habitus dan modalnya, lebih dominan modal sosialnya. Oleh karena itu wajar manakala timbul kekecewaan sebagian jama'ah, satu di antaranya Kiai LB (08-07-2018).

Politik merupakan medan pertempuran dan ladang perebutan posisi bagi kalangan PPP Tarekat dan PPP Non Tarekat. Meskipun kedua kelompok tersebut tidak menyadari tentang hal itu. Antarindividu atau antarkelompok tersebut diandaikan saling memperebutkan posisi legislative Jombang. Karena ketidaksadaran itu kondisi seperti ini, Kiai Maftuh menolak jika dikatakan telah terjadi persaingan. Kiai Maftuh juga menolak jika dikatakan bahwa minat dari petinggi Tarekat Cukir terhadap posisi legislatif melemah. Padahal, dalam komunitas tarekat, sosok figur kharismatik adalah hal yang sangat penting. Kharisma merupakan salah satu modal simbolik individu dalam pergulatan dengan individu lainnya. Sebenarnya Kiai Maftuh bisa saja menggunakan modal simboliknya untuk bertarung pada Pemilihan Legislatif 2019. Setidaknya, ia bisa memanfaatkan kharisma dirinya dan ayahnya, yaitu Kiai Makki Ma'shoem yang terkenal militansinya sebagai politisi PPP dan pernah menjabat sebagai anggota dewan di DPRD kabupaten Jombang. Akan tetapi, modal simbolik saja tidak cukup, juga perlu dilihat besar-kecilnya modal tersebut dan kemampuan atau kemauan dalam mendayagunakannya dalam medan politik.

Dalam hal ini, Kiai Maftuh lebih memilih berfokus pada kualitas spiritual di internal tarekat:

“Sekarang gini mas, masalahnya eranya sudah beda. Dari kami-kami ini sibuk dengan perkembangan tarekatnya sendiri. Jadi, dari kami, Mbah Yai Mad, nanti kalau terjun ke politik, apalagi sampai menjadi anggota DPR, terus nanti bagaimana perkembangan tarekatnya? Kami mendahulukan urusan Allah, bukan urusan dunia. Hanya saja kami-kami ini tetep berada di belakang PPP”. (Kiai Maftuh, 11-07-2018)

Dengan kata lain, menjadi anggota legislatif bukanlah hal yang primer untuk diperjuangkan, tetapi ada hal lain yang perlu ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan, yaitu soal spiritual. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah jika yang menguasai legislatif dari fraksi PPP terdiri dari orang-orang Non Tarekat. Bagi Kiai Maftuh, tidak ada persaingan dalam memperebutkan kursi legislatif. Hal yang sama juga dikatakan Gus JS, bahwa tidak ada persaingan antara kedua kelompok tersebut. Karena aturan partai saat ini membebaskan para kader dan bahkan di luar kader dipersilahkan untuk mencalonkan dirinya untuk maju menjadi calon anggota legislatif melalui fraksi PPP. Menurutnya, justeru dari kalangan kader sendiri banyak yang tidak berani maju (Gus JS, 24-03-2018).

Kompetisi di medan politik begitu terbuka. Oleh karena itu, sesiapa yang siap secara habitus dan modal, baik modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik maupun modal sosial, dipersilahkan maju untuk mencalonkan diri sebagai legislator. Dengan modal tersebut ia akan memainkan strateginya agar mampu menguasai atau mendominasi posisi tersebut. Nyatanya, yang berani tampil bertarung justeru mereka yang Non Tarekat. Orang-orang tarekat sendiri tampak enggan untuk maju bersaing. Barangkali mereka lemah dalam beberapa modalnya. Apalagi uang adalah “raja”, dalam artian bahwa dalam pertarungan ini, modal ekonomi bisa dikatakan sangat menentukan.

Di sisi lain, Kiai Maftuh tampak merasa lebih nyaman pada posisinya saat ini, yakni sebagai Kiai yang tidak duduk di legislatif. Hal ini bukan berarti kelompoknya sedikit melemah atau menurun. Bahkan, ia menolak jika dikatakan lemah dalam bidang perpolitikan. Menurutnya, justeru posisinya sebagai Kiai Tarekat dibutuhkan beberapa partai yang memiliki kepentingan:

“... Justeru sebenarnya, kami ini menjadi rebutan dari partai PKB dan Demokrat. Bahkan ada yang mengantar ke sini dari salah satu partai tertentu dengan membawa uang 1 miliar, tapi saya tidak mau. Kalau saya terima ya untuk apa...”.  
(Kiai Maftuh, 11-07-2018)

Kemudian Kiai Maftuh memperkuat argumennya, bahwa ia memang tidak perlu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Karena bisa jadi, madlarnya lebih besar daripada manfaatnya:

“...Kami ini (pengurus) di PPP Cabang (Jombang), dan pengurus PPP Wilayah (Jatim). Itu saja saya sering tabrakan (pendapat) sama kiai-kiai...” (11-07-2018)

Artinya, dominasi PPP Non Tarekat di legislatif bukan karena ada upaya-upaya penyingkiran secara sengaja. Pandangan Kiai Maftuh tersebut, juga sejalan dengan pandangan Gus JS (24-03-2018):

“Tidak ada saingan. Lebih karena obyektif. Kompetitif saja. Orang-orang yang mau berkompetisi dipersilahkan. Sekarang itu yang penting punya jejaring. Partai itu hanya kendaraan. Kita sudah membuka lebar bagi siapapun untuk mendaftar; orang dari luar, dari internal partai. Internal partai saja banyak yang tidak berani”.

Dengan kata lain, persaingan yang terjadi antara PPP Tarekat dan PPP Non Tarekat lebih bersifat alami, dan di luar kesadaran mereka, atau juga disebut “persaingan dalam diam”.

Dari uraian di atas, bisa dipahami bahwa setidaknya ada dua faktor utama mengapa petinggi Tarekat Cukir tidak ada yang mengajukan diri sebagai calon legislatif belakangan ini.

Faktor internal. *Pertama*, mereka ingin mengutamakan urusan akhirat, dan lebih fokus meningkatkan kualitas spiritual jama'ahnya, sehingga mencukupkan diri menjadi pengurus partai yang dianggapnya sudah berat. *Kedua*, melemahnya modal yang dimiliki, terutama modal ekonomi, sehingga dalam pertarungan dengan orang-orang PPP Non Tarekat mereka lebih memilih balik fokus ke dalam organisasi ketarekatan. *Ketiga*, kualitas sumber daya manusianya (SDM) mursyid (Kiai Mad), yang lebih tajam naluri kespiritualannya daripada naluri keberpolitikannya, sehingga pilihannya fokus pada hal-hal yang bersifat spiritual. Kiai Makki (badal mursyid) sendiri merasa lebih tepat duduk sebagai orang yang “didatangi” oleh para politisi untuk dimintai dukungan daripada

kemana-mana mencari dukungan. Hal demikian dipandang sebagai suatu dominasi atas para calon anggota dewan (caleg) yang mendatangnya.

Faktor eksternal. Adanya persaingan yang semakin terbuka, bersamaan dengan kebijakan partai yang membuka lebar bagi semua orang, bahkan bagi yang bukan dari kader PPP untuk mendaftar sebagai caleg. Dengan hal ini, bagi siapa yang siap secara modal, maka dialah yang siap maju menjadi caleg, dan hal inilah yang ditampilkan oleh orang-orang PPP Non Tarekat saat ini.

### **5.2.3. Resistensi dan Konflik**

Dominasi PPP yang begitu lama sebagai dijelaskan di atas, semakin menunjukkan bahwa Tarekat Cukir merupakan kelompok keagamaan yang telah terdominasi atau terhegemoni sejak dari pikirannya. Ia sebuah kelompok yang tumbuh berkembang di bawah bayang-bayang politik PPP. Dominasi tersebut rupanya dirasakan cukup sempit oleh Tarekat Cukir, seakan-akan tidak ada ruang gerak bebas baginya, karena kuatnya kontrol dari pihak PPP. Kondisi semacam ini disadari oleh Kiai Maftuh, misalnya ia merasa bahwa jama'ah Tarekat Cukir hanya dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral pihak PPP, sementara Tarekat Cukir tidak memperoleh apa-apa, terutama terkait bantuan (Kiai Maftuh, 11-07-2018). Pada ujungnya, kondisi tersebut melahirkan resistensi dan perlawanan dari pihak Tarekat Cukir. Kesempatan melakukan perlawanan tepatnya pada Pilbup Jombang 2018. Dalam hal ini, Kiai Maftuh mendukung Nyono; bupati Jombang sebagai kandidat *incumbent*. Padahal secara status, Kiai Maftuh masih tercatat sebagai pengurus DPC PPP Jombang, dan pihak PPP sendiri memiliki kader yang diusung dalam pertarungan pemilihan kepala daerah tersebut. Pada akhirnya, hal ini melahirkan konflik baru antara Kiai Maftuh sebagai *mudîr* Tarekat Cukir dengan pihak PPP.

Pertarungan wacana untuk mempertahankan kekuasaan, antara pihak Tarekat Cukir dengan PPP telah memasuki babak baru. Wacana yang dilemparkan pihak Tarekat Cukir tentang tidak bolehnya wanita dipilih sebagai pemimpin rupanya telah membuat PPP berupaya membalikkan wacana tersebut. Sementara pihak PPP melalui Gus JS mengatakan bahwa alasan Kiai Maftuh mendukung

pemimpin yang bias gender tersebut memiliki titik kelemahan. *Pertama*, jika Kiai Maftuh tidak setuju dengan kepemimpinan wanita, maka seharusnya ia menolaknya sejak jauh sebelumnya, yaitu saat Mundjidah menjadi kandidat wabup Jombang 2013 yang bergandengan dengan Nyono. Kasus OTT yang menimpa Nyono, meniscayakan naiknya Mundjidah sebagai bupati. Gus JS menyatakan:

“Kalau alasan perempuan, kenapa sejak awal, tahun 2013 ia mendukung. Realitasnya yang punya massa riil itu Bu Mun. Secara logika hukum, jika Bupati berhalangan lama, maka yang naik pasti wakil bupati yang perempuan itu. Itu kan hanya retorika belaka”. (07-07-2018)

Gus JS menambahkan bahwa penolakan Kiai Maftuh dalam mendukung Mundjidah, lebih disebabkan karena alasan utang budi terhadap Nyono yang telah terbangun sejak masa-masa sebelumnya.

“Kiai Maftuh tidak mau mendukung, sebab ia sudah terlanjur punya utang budi terhadap Pak Nyono”. (07-07-2018)

Pandangan Gus JS di atas diperkuat dengan pandangan seniorinya di PPP Jombang bahwa alasan gender merupakan alasan yang tidak *logic* dan mengada-ada (Hafidh, 09-02-2018). Kiai Maftuh dipandang sendirian dalam menentukan pilihan politiknya. Itulah mengapa pihak PPP mengaku tidak ambil pusing dengan pilihan tersebut.

“Tidak ada yang mendukung langkah Gus Tuh (Kiai Maftuh)...”

“...Keberadaannya di PPP tidak signifikan. Dibiarkan pun tidak berpengaruh. Ia tidak mempunyai massa. Untuk menggiring memilih Pak Nyono itu dia tidak punya kekuatan...” (Gus JS, 07-07-2018)

Kiai Maftuh sendiri enggan beterus terang tentang siapa atau kelompok mana saja yang mendukung pilihan politiknya tersebut. Tetapi dilihat dari isi bicara beberapa narasumber, tampaknya Kiai Ikhsan; sekretaris dan beberapa pengurus inti Tarekat Cukir lainnya, mendukung pandangan Kiai Maftuh.

Gus JS memprediksi bahwa secara perhitungan modal, Nyono yang didukung Kiai Maftuh masih jauh di bawah Mundjidah; baik dilihat dari jenis modal ekonomi, modal sosial dan modal politik. Secara modal ekonomi saja, Mundjidah jauh lebih kaya

([http://m.beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/319355/kekayaan\\_mundjidah\\_melesat\\_nyono\\_justu\\_turun.html](http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/319355/kekayaan_mundjidah_melesat_nyono_justu_turun.html)). Gus JS (07-07-2018) menyatakan:

“Secara modal (sosial), Pak Nyono itu banyak pendukungnya. Dengan catatan Bu Mundjidah tidak maju dalam Cabup. Tetapi kalau Bu Mun maju, Pak Nyono pasti kalah”.

“...Secara organisatoris ke-NU-an, Bu Mundjidah ia sudah teruji; sejak dari Badan Otonomi NU Fatayat, IPPNU dan Muslimat”.

Bagi Tarekat Cukir (Kiai Maftuh, 11-07-2018), persoalan Pilbup itu bukanlah persoalan memilih partai. Kondisinya sudah berbeda antara masa pemerintahan Orde Baru dengan pasca Reformasi. Pilbup adalah tentang memilih figur pemimpin yang bukan milik partai lagi, sebab ia dicalonkan oleh koalisi partai:

“...memilih bupati itu memilih figur, bukan memilih partai. Bupati itu bukan milik partai lagi, tetapi ia milik bersama. Kalau partai, kami tetap PPP...”

Memilih eksekutif dan legislatif adalah dua hal yang berbeda. Itulah mengapa, bagi Tarekat Cukir, PPP merupakan pilihan partai politiknya. Sementara Nyono Suharli merupakan sasaran pilihan bupati. Namun demikian, secara praktik, hal tersebut berdampak cukup serius, yaitu terjadinya konflik antara Tarekat Cukir dengan PPP, karena adanya penolakan kandidat bupati usungan PPP oleh Tarekat Cukir. Hal ini membuat PPP merasa “dikhianati” (Kiai LB, 08-07-2018). Dengan bahasa yang lebih halus, Gus JS (07-07-2018) menyatakan bahwa langkah Kiai Maftuh yang mendukung calon dari kader Golkar, dipandang sebagai bukan sebuah “perlawanan”, tetapi lebih karena tidak memahami terhadap mekanisme organisasi PPP. Karenanya hal tersebut dianggap telah keluar dari kesepakatan partai.

Mengetahui Kiai Maftuh mendukung Nyono, pihak PPP (07-07-2018) merasa bahwa Kiai Maftuh tidak bisa mendisiplinkan dirinya dalam mematuhi mekanisme jalannya organisasi. PPP menyusun strategi yang kemudian dimainkannya dengan cara melemparkan dua wacana; 1) melengserkan Kiai Maftuh dari Kemursyidan; 2) mencoretnya dari Kepengurusan DPC PPP Jombang. Barangkali praksis sosial yang dilakukan Kiai Maftuh

telah membuat kecewa kalangan PPP, sehingga memicu adanya sebuah perencanaan pelengseran Kiai Maftuh. Hanya saja, rencana itu selalu mengalami kegagalan (Gus JS, 07-07-2018):

“Akhirnya teman-teman PPP yang di tingkat cabang dan anak cabang berusaha untuk menggoyang kepemimpinan Gus Tuh (Kiai Maftuh) di tarekat, tapi selalu gagal...”

Strategi untuk melengserkan Kiai Maftuh di Tarekat Cukir terus diupayakan melalui pengurus tarekat yang juga aktif di PPP. Penggoyangan dimainkan dengan cara mengusulkan agar segera diadakannya reformasi atau dalam istilah yang digunakan dalam Tarekat Cukir disebut sebagai “periodik” lima tahunan. Faktanya, memang sudah lama Tarekat Cukir belum mengadakan periodik, dan yang terjadi hanyalah tambal sulam kepengurusan jika ada yang berhalangan. Sementara posisi ketua harian tetap dibawah kendali Kiai Maftuh. Bahkan suatu ketika Kiai Maftuh juga terlibat menanggapi wacana pelengserannya, sebagaimana ditirukan oleh Gus JS mengatakan:

“Wes nggoleko pengacara sampe sundul langit, gak iso awakmu ndongkel kepengurusanku (di tarekat)”. Terjemah: “sudahlah...silahkan cari pengacara hingga setinggi langit, kamu tidak akan bisa melengserkan kepengurusanku (di tarekat)”. (07-07-2018)

Berangkat dari kalimat tersebut, Gus JS yang juga seorang advokat, melacak susunan kepengurusan Tarekat Cukir termasuk mengumpulkan dokumen berupa foto copy SK Kemenkumham. Dari pelacakannya ia menemukan bahwa status Kiai Maftuh sebagai *mudîr*, sementara yang berkuasa dalam sebuah yayasan itu adalah *rais* yang ditempati Kiai Mad. Artinya, di dalam tubuh organisasi Tarekat Cukir, yang berkuasa adalah Kiai Mad yang statusnya sebagai pembina, dan bukan Kiai Maftuh yang statusnya sebagai ketua. Hal ini berarti bahwa posisi Kiai Maftuh masih berkemungkinan bisa digeser melalui kekuasaan Kiai Mad. Tetapi peneliti melihat, bahwa Kiai Mad sendiri bukanlah tipologi pemimpin yang suka mencopot dan mengangkat jabatan para pengurusnya. Meskipun demikian, dalam kasus ini, Gus JS belum melakukan tindakan lebih jauh.

Isu utama yang menggelinding di kalangan kaum Tarekat Cukir adalah segera diadakannya periodik, yaitu reformasi

kepengurusan. Desakan itu, selain karena memang sudah sesuai waktunya, namun juga bertepatan dengan tahun politik, sehingga, desakan periodik dimaknai sebagai agenda politis. Apalagi dalam kesempatan ini, Kiai Maftuh mendukung calon dari kader Golkar. Tetapi rencana periodik tersebut selalu mundur, seiring kecelakaan Kiai Maftuh dan rombongan di Tol Wilangan yang menewaskan Nuryanto, yaitu sekretaris Tarekat Cukir. Kemudian, periodik direncanakan akan diadakan setelah Kiai Maftuh sembuh dari sakitnya akibat kecelakaan itu. Setelah sembuh, ternyata mundur lagi, direncanakan setelah pilbup Jombang, tetapi hingga kini periodik itu belum juga dilaksanakan.

Ada sebuah panafsiran dari sebagian kalangan pengurus Tarekat Cukir yang juga aktif di PPP, bahwa tertundanya periodik itu karena adanya kekhawatiran dari pihak Kiai Maftuh akan diganti (Gus H, 06-01-2019):

“Usulan segera diadakan periodik itu sebenarnya bukan untuk mengganti Kiai Maftuh, siapapun senior yang memimpin tidak masalah. Yang penting ada perbaikan internal organisasi. Tetapi hal ini dipahami Kiai Maftuh sebagai upaya untuk menggantinya. Hingga saat ini, sudah sekitar 10 tahunan belum ada periodik...”

Kiai Ikhsan, yang cenderung sepikiran dengan Kiai Maftuh pernah mengatakan dalam sebuah rapat bahwa organisasi tarekat dengan organisasi politik (PPP) itu berbeda. Rapat tersebut dilakukan di kediaman salah seorang fungsionaris PPP dan oposan pengurus Tarekat Cukir, tetapi sayangnya Kiai Ikhsan lupa kapan rapat itu dilaksanakan. Di dalam rapat itu ada usulan segera dilaksanakannya periodik. Tetapi menurutnya, organisasi tarekat itu sistemnya dari atas ke bawah (*up to down*), bukan dari bawah ke atas sebagaimana halnya organisasi politik. Tampaknya, hal inilah yang membuat usulan diadakannya periodik termentahkan. Karena pihak atasan Tarekat Cukir belum menghendaki pelaksanaannya. Jam'iyah tarekat adalah milik mursyid, oleh karena itu apapun terkait katarekatan tergantung kepada si mursyid. Sementara adanya kepengurusan tarekat hanyalah bersifat membantu (Kiai Ikhsan, 29-02-2019). Tetapi Kiai Maftuh, ketika peneliti hubungi secara terpisah mengatakan bahwa periodik itu harus dan tetap akan



diadakan nantinya, dan ia tidak merasa keberatan. Hanya saja, ia tidak menyebutkan secara jelas tentang kapan kepastian waktunya (10-02-2019).

Upaya menggoyang Kiai Maftuh, tidak hanya terjadi pada posisinya sebagai mursyid, tetapi posisinya sebagai pengurus PPP juga ada wacana dilengserkan. Wacana semacam ini bertujuan untuk mendiskreditkan Kiai Maftuh sebagai strategi dalam sebuah pertarungan. Gus JS mencoba bermain strategi yang lebih halus untuk melumpuhkan langkah Kiai Maftuh (12-06-2018), yaitu dengan mendayagunakan modal budayanya (politik), melalui wacana pencoretan Kiai Maftuh dari kepengurusan PPP. Tentang hal ini, politisi senior PPP yang juga tercatat sebagai pengurus Tarekat Cukir, yaitu Hafidh Ma'shoem menyatakan bahwa Kiai Maftuh tidak konsisten dengan statusnya sebagai pengurus PPP. Sebab, mestinya Kiai Maftuh mendukung Mundjidah yang diusung oleh PPP. Tidak mendukungnya Kiai Maftuh terhadap Mundjidah karena alasan perempuan, bagi Hafidh, merupakan alasan yang tidak *logic* dan cenderung mengada-ada:

“...Maftuh itu Ketua Dewan Majelis Pertimbangan (PPP) Cabang Jombang, tapi oleh Bu Mun sudah tidak diaktifkan. Kenapa? Karena ya itu, karena mbelani Golkar itu...konsekuensinya kalau Bu Mun mencalonkan ya harus mbela Bu Mun...karena alasan perempuan...itu mengada-ada...” (Hafidh, 09-02-2018)

Apa yang dikatakan Hafidh, sepertinya berbeda dengan keterangan Gus JS (07-07-2018) bahwa tidak diaktifkannya Kiai Maftuh masih berupa usulan dan belum ditindaklanjuti:

“...Ada usulan untuk dikeluarkan dari PPP. Tetapi kita belum *follow up*...”

Barangkali kedua keterangan di atas sama-sama benar adanya. Sebab, saat peneliti menjumpai Kiai Maftuh (11-07-2018), ia mengakui bahwa dirinya memang sempat dicoret namanya dari kepengurusan DPC PPP Jombang. Akan tetapi, belakangan ini, yakni pasca Pilbup Jombang 2018 namanya tercantum lagi. Kiai Maftuh tidak menjelaskan secara detail, mengapa pasca pencoretannya dari PPP, dan di kemudian hari ia dimasukkan kembali ke dalam jajaran kepengurusan. Padahal menurutnya, dicoret maupun tidak dicoret baginya adalah sama saja. Ia meyaikini

bahwa Tarekat Cukir melalui ketokohnya masih dibutuhkan oleh para politisi, apalagi yang membutuhkan adalah dari kalangan PPP yang memang memiliki ikatan emosional historis.

Benar, di kemudian hari ada beberapa politisi PPP yang akan mendaftarkan diri sebagai caleg, mendatangi Kiai Maftuh di rumahnya. Bahkan para caleg itu di antaranya dari keluarga besar Mundjidah (Bani Wahab) yang dikenal mendominasi pada level caleg, baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa Kiai Maftuh dengan modal sosial, simbolik, dan modal spiritualnya masih memiliki daya tawar dan keberadaannya di PPP masih diperhitungkan (Kiai Maftuh, 12-12-2018). Oleh karena itu, dimasukkannya kembali Kiai Maftuh ke dalam jajaran kepengurusan DPC PPP Jombang, bisa jadi karena sebagian politisi PPP tersebut masih memiliki kepentingan elektoral dengan kelompok Tarekat Cukir, apalagi saat itu masih akan menghadapi adanya Pileg bersamaan dengan Pilpres. Menurut Kiai Maftuh, hal yang menjadi pertimbangan pihak politisi terhadap Tarekat Cukir adalah karena Tarekat Cukir memiliki jumlah masa yang relatif banyak, dan patuh-patuh (Kiai Maftuh, 12-12-2018).

Konflik antara Tarekat Cukir melalui Kiai Maftuh dengan PPP di atas, menunjukkan konflik musiman yang hanya terjadi sekali dalam lima tahun, karena adanya perbedaan aspirasi dalam pilbup 2018. Buktinya, pasca Pilbup selesai segalanya berjalan normal seperti tidak pernah terjadi konflik. Ini berarti bahwa wacana pemecatan Kiai Maftuh dari PPP dan isu pemberhentiannya dari kepengurusan Tarekat Cukir merupakan gertakan yang menyudutkan dan sebagai bentuk strategi untuk melemahkan posisi Kiai Maftuh. Hal demikian dilakukan agar arus dukungan terhadap langkah politis dalam pilbup Kiai Maftuh tidak berdampak secara massif. Sebaliknya, Kiai Maftuh berusaha membalikkannya dengan bersikap tenang dan bertahan. Ia sudah memperhitungkan bahwa posisinya sebagai mursyid di jam'iyah tarekat terbilang cukup kuat. Sebab, secara ketarekatan semua mengetahui bahwa jam'iyah tarekat adalah milik mursyid, sehingga jama'ah apalagi orang di luar jama'ah tidak bisa mengintervensi untuk melengserkan posisinya dari pimpinan jam'iyah. Di samping itu, secara sosial keberadaannya masih dibutuhkan oleh PPP dan bahkan oleh partai

lain. Dengan perhitungan demikian, Kiai Maftuh bertahan pada posisinya sebagai mursyid yang mendukung Nyono Suharli, sekaligus menolak Mundjidah meskipun berbeda pandangan dengan umumnya para pengurus PPP.

#### **5.2.4. Menunggu Pemicu untuk Mendominasi Tarekat Cukir dalam Kampanye Pilbup Jombang 2018**

Sebelum membahas tentang penggembosan, peneliti merasa perlu memaparkan kronologinya. Sebab, praksis sosial penggembosan terhadap kaum tarekat dalam pilbup Jombang 2018 merupakan rentetan dari peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Seperti diketahui bahwa konflik di kalangan kaum tarekat telah menjadi tradisi, dan tampak telanjang seperti tanpa busana sebagaimana tradisi konflik yang ada di tubuh NU (Soon, 2008). Dalam sebuah perbincangan dengan Kiai M (identitas minta dirahasiakan) (02-07-2018), ia mengatakan tentang indikasi adanya ketegangan yang terjadi di internal Tarekat Cukir:

“...blas, gak ono keturunane Mbah Dellan, tidak ada satupun keturunane Mbah Dellan sing dadi pengurus Toriqot Cukir”.  
Terjemah: “...sama sekali, tidak ada keturunan dari Kiai Adlan, tidak ada satupun keturunannya Kiai Adlan yang menjadi pengurus Tarekat Cukir”.

Peneliti memaknai pernyataan tersebut sebagai sebuah indikasi adanya proses “penyingkiran” dari Tarekat Cukir, atau sebaliknya hal itu terjadi secara alamiah karena pihak keturunannya tidak ada yang berminat melanjutkan perjuangan ketarekatan. Hanya saja, Kiai M (02-07-2018) melanjutkan pernyataannya yang memperkuat dugaan adanya konflik internal:

“Bapak karo anak podo ae iku, senengane mecatan”.  
Terjemahannya; “Bapak dan anak itu sama saja, sukanya memecat”.

Dari ungkapan di atas, peneliti menelusuri dan kemudian memperoleh informasi bahwa yang dimaksud “bapak dan anak” adalah Kiai Makki sebagai bapak dan Kiai Maftuh sebagai anaknya. Berangkat dari pernyataan tersebut, timbul pertanyaan, siapa yang dipecat dan karena alasan apa? Adanya kasus pecat-memecat menunjukkan bahwa di dalam tubuh organisasi Tarekat Cukir ada pertarungan dalam politik kekuasaan sebagai bagian dari proses

politik yang dinamis. Di dalamnya ada perebutan pengaruh untuk saling menjatuhkan, proses mendominasi dan didominasi, di satu sisi ada kekuasaan dan di sisi lain ada perlawanan. Untuk memperebutkan dan memperoleh atau mempertahankan posisi dominasi, bisa saja terjadi melalui kekerasan, termasuk kekerasan simbolik, yakni, kekerasan yang dilakukan tidak secara fisik, tetapi biasa digunakan untuk menyerang habitus individu lain.

Kekerasan simbolik tampaknya terjadi di internal Tarekat Cukir. Mursyid yang memiliki otoritas tertinggi di kelembagaan tarekat, bisa saja menggunakan tata-aturan hubungan murid-mursyid, sebagai alat pembungkam terhadap murid yang melakukan protes ataupun kritik. Adab murid terhadap mursyid menggambarkan kekuatan simbolik kelas mursyid yang dominan terhadap kelas pengurus, penceramah yang terdominasi, dan kelas murid atau jama'ah yang paling terdominasi. Hubungan mursyid dan murid adalah *top down*, di mana murid harus tunduk pasrah dengan apa yang dilakukan oleh si mursyid terhadapnya, termasuk memecatnya.

Penelusuran sampai pada sebuah nama, yaitu Kiai LB (identitas minta dirahasiakan) sebagai pihak yang mengalami kekerasan simbolik dalam bentuk pemecatan. Ia merupakan salah satu pengurus Tarekat Cukir dan diberikan jadwal untuk mengisi pengajian pada acara-acara ketarekatan Cukir. Ia juga biasa mengisi ceramah dengan basis pengaruh di kalangan majelis-majelis taklim di wilayah Jombang khususnya. Gaya bahasanya terang-terangan, apa adanya atau biasa disebut "*blak-blak'an*". Ilmu hikmah, suwuk (*ruqyah*) dan mistis lainnya juga dimilikinya, utamanya untuk para konsumen atau murid yang tertarik pada hal-hal tersebut (Kiai LB, 08-07-2018).

Pada hari Ahad 8 Juli 2018 waktu sore hari sekitar pukul 16.45, peneliti berkunjung ke rumahnya di Dempok kecamatan Diwek. Kedatangan peneliti dimaksudkan untuk mengkonfirmasi tentang kasus pemecatannya dari kepengurusan Tarekat Cukir. Dalam perbincangan itu, di antara point yang dijelaskannya adalah bahwa pada tanggal 14 Maret 2011, Kiai LB secara resmi menerima surat pemberhentian dari aktifitas di Tarekat Cukir. Surat tersebut ditandatangani oleh Kiai Ahmad Sholihuddin sebagai rais, Kiai

Maftuh Makki sebagai mudir, dan beberapa nama saksi lainnya yang tercantum di bawahnya. Peneliti melihat dua lembar surat pemberhentian tersebut. Satu lembar surat diperkuat dengan satu lembar surat lainnya, yang intinya berisi pesan tentang “pengistirahatan sementara” Kiai LB dari kepengurusan dan segala kegiatan pengajian Tarekat Cukir. Menurut Kiai Ikhsan, istilah “mengistirahatkan sementara” tersebut bisa diartikan sebagai pemberhentian hingga waktu yang tidak ditentukan (28-01-2019). Dengan kata lain, Kiai LB telah dipecat.

Surat tersebut secara teknologi sudah baik, karena sudah memakai alat ketik komputer yang dicetak melalui printer. Hanya saja, tidak ada satupun dari kedua lembar surat tersebut yang berstempel resmi sebagai bentuk legitimasi, sehingga tampak janggal secara teknis. Lebih dari itu, secara materi juga janggal; yakni tidak disebutkan pelanggarannya, sebagaimana dijelaskan Kiai LB (08-07-2018):

“...Surat pemberhentian saya pelajari. Saya pelajari, jik semangat-semangate organisasi. AD/ ART saya perbanyak. Tepatnya tanggal 14 Maret 2011. Tanggal surat tersebut. Itu diperkuat dengan kecamatan. “Padahal saya itu pengurus kabupaten. Nggak bener kan?”

Kiai LB melanjutkan langkah-langkah memperbanyak buku AD/ ART untuk dipelajari, dan didiskusikan dalam rangka strategi mempertahankan diri. Ketika kasus tersebut didiskusikan dengan orang-orang PPP Jombang, mereka cenderung apatis. Menurut Kiai AA (11-07-2018), apatisnya PPP Jombang itu karena mereka melihat bahwa kasus pemecatan tersebut merupakan urusan rumah tangga internal Tarekat Cukir, bukan urusan PPP. Memang secara organisasi PPP tidak memiliki hubungan koordinatif dengan Tarekat Cukir, meskipun Tarekat Cukir sendiri kepengurusannya banyak diduduki oleh orang-orang PPP. Kiai LB sendiri juga memprotes terhadap para saksi yang begitu saja menuruti mursyid ketika disuruh terlibat dalam pemecatan yang tak jelas alasannya. Para saksi sendiri secara jujur mengakui keterlibatannya karena faktor kewajiban murid menuruti perintah mursyid. Padahal menurut Kiai LB (08-07-2018), para saksi tersebut sebenarnya telah terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah SWT, karena mengikuti perintah

pemimpin zalim. Kiai LB pun tidak menemukan pelanggaran dalam dirinya berdasarkan apa yang tercantum di dalam AD/ART.

Meskipun ditemukan kejanggalan sedemikian rupa, tetapi fungsi surat tersebut tetap berjalan seperti surat legal adanya. Tampaknya surat hanyalah bentuk formalitas sebagai sarana komunikasi tanpa mempertimbangkan keresmiannya. Surat telah menjadi alat untuk menekan Kiai LB dan menyingkirkannya dari kepengurusan. Ia tidak dipakai lagi di Tarekat Cukir, dan iapun keluar dari organisasi itu. Modal simbolik yang dimiliki Kiai Mad dan Kiai Maftuh sebagai mursyid dan badal mursyid sudah cukup untuk “mengamankan” Kiai LB dari kepengurusan Tarekat Cukir. Untuk kasus ini, tampak dominasi Kiai Mad dan Kiai Maftuh masih terlalu kuat ketika berelasi dengan Kiai LB. Kekerasan simbolik benar-benar terjadi dan menimpa Kiai LB.

Pemecatan Kiai LB kini telah menjadi bagian dari penggalan sejarah dalam hidupnya. Hal itu bagi Kiai LB merupakan tindakan inkonstitusional yang mengecewakan dan menyakitkan. Meskipun ia menemukan banyak kelemahan pada surat tersebut, tetapi posisinya sebagai pihak terdominasi mengharuskannya untuk memilih tunduk pada isi surat itu. Suatu ketika, Kiai LB mendengar sendiri ucapan Kiai Mad atas penyesalannya karena keterlibatannya dalam pembubuhan tanda tangan dalam surat itu. Pengakuan Kiai Mad ini semakin memperkuat dugaan Kiai LB bahwa ia memang tidak bersalah dan memberhentikannya dari kepengurusan merupakan keputusan yang tergesa-gesa. Kiai Mad dipandang sebagai penguasa tarekat yang diperalat oleh Kiai Maftuh. Apalagi Kiai LB memahami betul bahwa Kiai Mad tidak memahami lika-liku perpolitikan, dan ia tahu bahwa yang sering terlibat dalam perpolitikan adalah Kiai Maftuh.

Bagi Kiai Ikhsan (28-01-2019), alasan pemecatan tidak perlu dicantumkan secara jelas, karena alasan nilai kepantasan sebagai pengikut tarekat. Hanya saja, Kiai Ikhsan menyayangkan gaya bicara ceramah Kiai LB yang cenderung kasar dan kritis terhadap Kiai Tarekat Cukir. Kiai AA (11-07-2018) juga mengonfirmasi tentang hal ini, yakni tentang gaya bicara Kiai LB yang cenderung kasar dan terbuka (ceplac-celpos). Kiai LB sendiri mengakui gayanya ini (08-07-2018). Hanya saja, menurut penilaian subyektif

Kiai LB (08-07-2018), pemecatan dirinya dari Tarekat Cukir karena beberapa hal, yaitu 1) adanya sentimen pribadi karena Kiai Maftuh khawatir jama'ahnya berkurang, 2) adanya gugatan dari Kiai LB terkait kepemimpinan Kiai Maftuh sebagai Badal Mursyid, yang menurutnya menyalahi aturan ketarekatan, dan oleh karena itu pengangkatannya dianggap tidak sah.

Ada proses lanjutan konflik ini, utamanya tentang kepemimpinan Kiai Maftuh yang dipandang kontroversial. Tetapi menurut hemat peneliti, hal ini tidak perlu dibahas dalam disertasi ini. Yang jelas Kiai LB sebagai pihak yang terdominasi di Tarekat Cukir, dan ia melakukan resistensi di arena yang lain. Antara Kiai Maftuh yang mursyid dengan Kiai LB yang murid memiliki ranah pertempuran yang sama; yaitu agama/ tarekat dan politik. Secara senioritas Kiai LB lebih dahulu aktif di Tarekat Cukir dan berbaiat langsung kepada Kiai Adlan Aly. Sementara Kiai Maftuh berbaiat di kemudian hari kepada ayahnya sendiri; Kiai Makki Ma'shoem. Kiai Maftuh sebagai mursyid sekaligus ketua pengurus (*mudir*); bagian dari penguasa yang mendominasi, Kiai LB sebagai guru penceramah yang terdominasi, sementara itu jama'ah merupakan kelas yang paling terdominasi. Kiai LB sendiri dipandang tidak berhak untuk menyampaikan pertanyaan atas apa yang dilakukan Kiai Maftuh sebagai mursyid.

Perbandingan antara keduanya bisa dilihat sebagai berikut:

**Tabel 9.**

**Sumber Modal dan Kekuasaan Kiai Maftuh dan Kiai LB**

| Indikator             | Pihak yang Berelasi  |   |
|-----------------------|--|---|
|                       | Kiai Maftuh Makki  | Kiai LB   |
| <b>Peran</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mursyid TC</li> <li>✓ Aktif di PPP</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mantan Pengurus Tarekat Cukir</li> <li>✓ PPP aktif</li> <li>✓ Penceramah</li> </ul>                              |
| <b>Basis Pengaruh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keagamaan/ kaum tarekat</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keagamaan/ kalangan warga NU, sebagian kalangan santri PP. Tebuireng</li> </ul>                                  |
| <b>Arena</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Haul, Senenan, kegiatan ketarekatan</li> <li>✓ Politik dalam Pilbup Jombang 2018</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Majelis Ta'lim Muslimat NU/ Tarekat, Majelis Taklim Lain</li> <li>✓ Politik dalam Pilbup Jombang 2018</li> </ul> |
| <b>Habitus</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Orientasi hidup: ibadah</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Orientasi hidup: ibadah</li> </ul>   |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Visi Hidup: bermanfaat, dan pragmatis</li> <li>✓ Misi: mengajak kepada kebenaran</li> <li>✓ Gaya Hidup: Sederhana</li> <li>✓ Gaya Bahasa: terbuka, kritis, tanpa tedeng aling-aling</li> <li>✓ Ranah Gerakan: Kultural keagamaan dan politik</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Visi Hidup: bermanfaat dan pragmatis</li> <li>✓ Misi: mengajak kepada kebenaran</li> <li>✓ Gaya Hidup: Sederhana</li> <li>✓ Gaya Bahasa: Terbuka, kritis, tanpa tedeng aling-aling.</li> <li>✓ Ranah Gerakan: Kultural keagamaan dan politik</li> </ul>                                      |
| <b>Kapital</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ekonomi: aset yayasan dan pesantren, tanah, rumah, mobil, travel haji dan umroh.</li> <li>✓ Sosial: jaringan antar kiai dan kelompok tarekat</li> <li>✓ Budaya: penguasaan literatur keislaman</li> <li>✓ Simbolik: mursyid membaiat, pengasuh pesantren</li> <li>✓ Spiritual: ahli ilmu hikmah, mistik-supranatural</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ekonomi: aset yayasan, rumah, tanah.</li> <li>✓ Sosial: jaringan antar kiai dan majelis ta'lim Muslimat NU</li> <li>✓ Budaya: penguasaan literatur keislaman</li> <li>✓ Simbolik: mursyid tidak membaiat, penceramah.</li> <li>✓ Spiritual: ahli ilmu hikmah, mistik-supranatural</li> </ul> |

Pada saatnya, tahun 2018 menjelang pilbup Jombang, Kiai LB mendapatkan momentumnya untuk melawan dominasi Kiai Maftuh yang dianggapnya sebagai bentuk penindasan. Ia berusaha untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah pada waktu pemecatan itu. Kiai LB (08-07-2018) menyatakan:

“...Saya buktikan menjadi Jurkam untuk Bu Mundjidah, Gus Tuh (Kiai Maftuh) untuk Pak Nyono. Menang aku. Aku menjadi Tim Suksesnya. Pertama kali masuk KPU saya yang ngawal kok. Orang-orang sekabupaten, anak cabang Muslimat (NU) saya yang membai'at (ikrar tim sukses) aku. Roto-roto Muslimat itu orang tarekat. Orang-orang Ngusikan, Plandaan. (Daerah) Mojowarno Bu Mun menang telak. Padahal di situ pendukungnya Pak Nyono. Ketua Muslimat (NU) Mojowarno gak cocok dengan Bu Mun. Saya garap lewat pengajian-pengajian...”

Kiai LB masih merasa sebagai pihak korban yang terdominasi, merancang kiat-kiat dan memainkan strategi. Kiai LB sadar betul, bahwa keberadaan kaum perempuan pengikut Tarekat Cukir



menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan politisi di Jombang. Apalagi, diketahui bahwa loyalitas atau solidaritas “kaum emak-emak” (perempuan) tidak bisa diremehkan. Sebagaimana yang diakui Kiai LB (Kiai LB, 08-07-2018) dalam kampanyenya untuk pemenangan Mundjidah menuju kursi eksekutif di Jombang, ia memainkan isu modal simbolik yang dimiliki Mundjidah, yaitu kebesaran nasab Mundjidah sebagai keturunan KH. Wahab Chasbullah, pendiri ormas NU. Kiai LB berargumen bahwa pilihannya menjadi juru kampanye untuk Mundjidah; bukan karena Mundjidahnya, tetapi karena ayahnya, yaitu KH. Wahab Hasbullah pendiri NU. Hal ini disosialisasikan melalui pengajian-pengajian yang diadakan oleh Muslimat NU (Badan Otonom NU), yang umumnya terdiri dari kaum wanita tarekat.

Gus JS (07-07-2018) sendiri tidak menafikan adanya peran yang besar kaum perempuan dalam mendulang suara untuk kepentingan politik electoral tersebut. Bahkan ia berani bertaruh bahwa mereka lebih loyal ke PPP daripada mengikuti langkah Kiai Maftuh yang mengawal dan mendukung calon dari kader Golkar, yaitu Nyono Suharli. Tampaknya, pihak PPP memanfaatkan peluang suara kaum wanita untuk kepentingan politik elektoral.

Kiai LB menjadi tim sukses Mundjidah yang merupakan kader dan diusung PPP. Kiai LB sendiri tampil sebagai orang PPP sekaligus penceramah agama. Sementara Kiai Maftuh mengawal dan mendukung Nyono Suharli yang notabene kader Golkar. Pertempuran dalam ranah politik dukung-mendukung tak terhindarkan. Melalui majelis-majelis taklim yang lebih didominasi oleh kaum perempuan dari kalangan Muslimat NU (sebuah badan otonom di bawah naungan ormas NU) yang mayoritas juga merupakan jama'ah tarekat, Kiai LB menyampaikan pesan-pesan politiknya yang intinya mengarahkan jama'ah untuk menjatuhkan pilihan ke cabup Mundjidah (08-07-2018). Kiai LB tampaknya memiliki jaringan sosial yang lebih dominan di kalangan akar rumput dibandingkan Kiai Maftuh. Selain itu, kalangan tarekat utamanya Muslimat NU, banyak yang berbaiat kepada Kiai Mad yang tidak begitu tertarik terhadap urusan politik, apalagi berperan aktif dalam politik praktis, sehingga tidak dikhawatirkan

keterputusan hubungan murid-guru mursyid seperti yang dimaksud Kiai Maftuh.

Pilbup Jombang akhirnya dimenangkan Mundjidah. Menurut hasil rekapitulasi KPU Jombang 2018 bahwa pasangan calon nomor urut 01 yaitu Mundjidah Wahab-Sumrambah mendapatkan suara 308.536. Adapun pasangan calon nomor urut 02, yakni Nyono Suharli Wihandoko-Subaidi Muchktar memperoleh suara 219.388. Sementara pasangan nomor urut 03 Syafiin-Choirul Anam memperoleh 110.893 suara. Pada pilbup tersebut total jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah 977.676. Adapun suara tidak sah berjumlah 638.817 suara, sementara jumlah suara yang tidak sah mencapai 50.294 suara.

Demikianlah, dalam ranah ketarekatan, Kiai Maftuh tampil lebih unggul mendominasi Kiai LB. Sementara dalam ranah politik dukung mendukung kandidat bupati pada pilbup Jombang 2018 kemenangan Mundjidah oleh Kiai LB dimaknai sebagai kemenangannya. Hal ini sekaligus menunjukkan posisi Kiai LB sebagai *muballigh* dan politisi yang semakin kuat di kalangan masyarakat tarekat akar rumput. Dan bahwa posisi dominan bagi individu atau kelompok bersifat dinamis.

Dari uraian di atas bisa dipahami bahwa Habitus yang menuntun tindakan dan modal yang dimiliki oleh Tarekat Cukir dan PPP untuk didayagunakan pada gilirannya diekspresikan di arena tarekat dan politik. Pada arena tarekat, PPP cenderung mendominasi, terutama tampak jelas pada kepengurusan Tarekat Cukir sejumlah 81,58% dari 38 orang merupakan orang aktif di PPP. Sementara di arena politik, PPP Non Tarekat mendominasi di level legislatif.

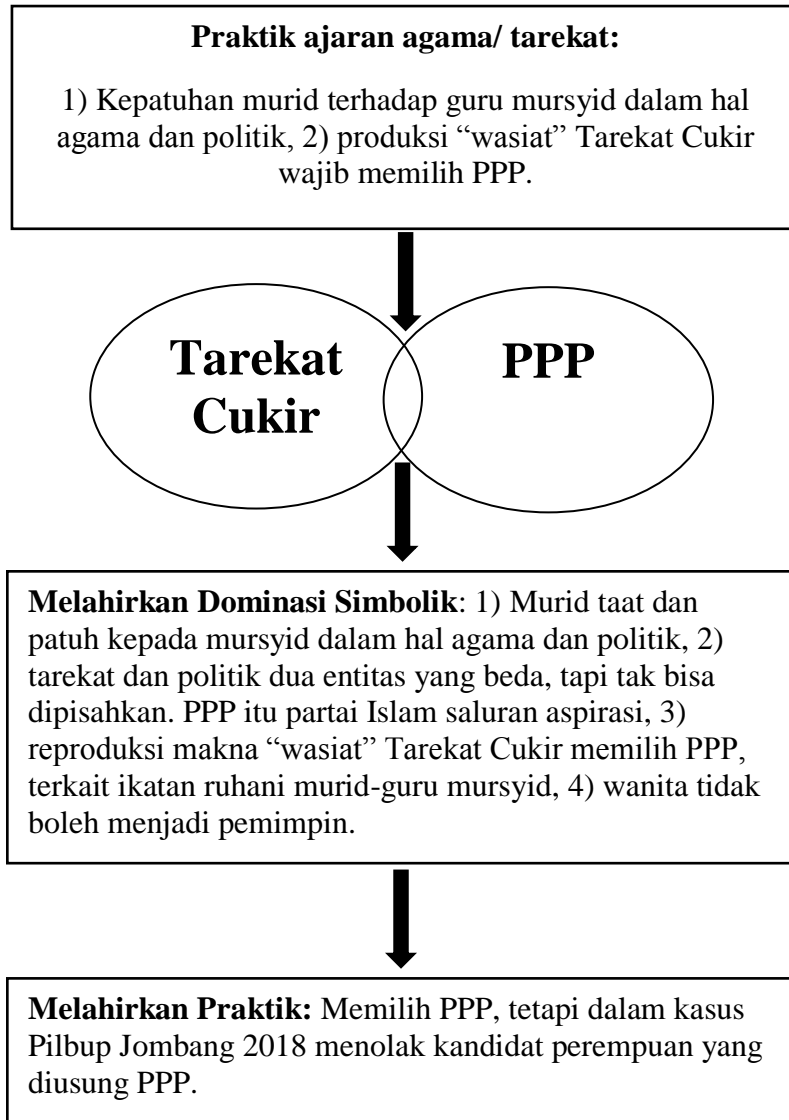
Praktik mendukung dan memilih PPP yang telah menjadi habitus bagi Tarekat Cukir, sebenarnya melewati satu proses yang namanya dominasi simbolik. Tarekat Cukir, sadar atau tidak sadar, dihegemoni melalui kebenaran yang diyakininya bahwa murid wajib mengikuti guru mursyid dalam urusan agama dan politik. Juga kebenaran bahwa berbeda pilihan politik dari mursyid bisa berakibat pada terputusnya hubungan ruhani antara keduanya. Memilih PPP sebagai upaya mempertahankan hubungan ruhani dengan mursyid merupakan hal yang normal dilakukan. Tetapi dominasi PPP atas

Tarekat Cukir, dalam kondisi tertentu dirasakan terlalu sempit, sehingga menimbulkan resistensi dari pihak Tarekat Cukir. Misalnya, PPP mengusung kandidat bupati Jombang 2018 dari kader wanita. Maka, hal ini bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya, yaitu tidak boleh memilih wanita sebagai pemimpin. Selain itu, kebenaran yang diyakininya dari para pendiri Tarekat Cukir adalah tentang memilih partai haruslah yang berasaskan Islam yang mewujudkan dalam PPP.

Adanya proses mendominasi dan didominasi menunjukkan adanya dialektika antara agen dan struktur. Tindakan-tindakan yang dilakukan para individu dengan berbagai kepentingannya masing-masing dilihat sebagai manusia aktif dalam menentukan tindakannya dalam kaitannya dengan struktur, walaupun tidak sepenuhnya bebas. PPP merupakan agen yang mempengaruhi/mendominasi struktur Tarekat Cukir. Demikian juga Tarekat Cukir merupakan agen yang mempengaruhi PPP. Hal ini tampak pada susunan kepengurusan kedua belah pihak. Kiai Maftuh yang menolak kandidat bupati usungan PPP dan menimbulkan konflik, merupakan agen bagi struktur PPP. Kiai Maftuh telah menciptakan perbedaan di sebuah komunitas sosial yang relatif seragam.

Pada pola relasi yang terjadi antara Tarekat Cukir dan PPP membentuk pola relasi *simbiosis parasitism*, karena Tarekat Cukir modal sosialnya telah dimanfaatkan dan menguntungkan pihak PPP, sementara Tarekat Cukir tidak memperoleh modal apapun dari PPP sebagai bentuk transformasi.

### **Bagan 10. Relasi Antara Tarekat Cukir dengan PPP**



#### **5.2.1. Simpulan**

Dalam relasinya dengan PPP, Tarekat Cukir menggunakan modal sosial, budaya, simbolik, dan mistis spiritualnya. Modal sosial ditandai dengan jama'ahnya yang banyak dan cenderung

patuh, khususnya jama'ah wanitanya yang dikenal sangat solid. Hal ini membuat Tarekat Cukir memiliki daya tawar tersendiri di mata PPP, apalagi saat-saat menjelang Pemilu/ Pilbup Jombang 2018. Modal sosial tersebut dibarengi dengan modal simbolik. Melalui kekiayaannya, Kiai Maftuh didatangi sekelompok dari orang-orang PPP yang maju sebagai calon dalam Pileg 2019. Sekaligus menunjukkan bahwa Tarekat Cukir memiliki modal simbolik yang begitu kuat. Modal simbolik juga digunakan Tarekat Cukir ketika ada wacana pelengseran Kiai Maftuh oleh pihak PPP karena perbedaan pandangan terkait kandidat yang diusung, dan berakhir dengan kegagalan.

Modal politik digunakan oleh PPP ketika pihak Tarekat Cukir, yang ditandai dengan dominasi PPP di kepengurusan Tarekat Cukir. Juga tampak pada kasus Pilbup Jombang 2018, yang mana Kiai Maftuh berbeda pandangan terkait kandidat bupati, dengan menolak kandidat yang diusung PPP. Secara politis, PPP memanfaatkan Kiai LB yang dipecat dari kepengurusan Tarekat Cukir, menjadi Jurkam kandidat Mundjidah melawan pengaruh Kiai Maftuh yang mendukung Nyono Suharli. Kiai LB melakukan penggemosan di basis kelompok Tarekat Cukir melalui ceramah. Strategi PPP dalam mendayagunakan modal politiknya cukup berhasil, yang ditandai dengan kemenangan cabup yang diusungnya. Dalam melakukan praktik mendukung PPP, Tarekat Cukir mengikuti pandangan bahwa agama dan politik merupakan dua entitas yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Tujuannya adalah untuk menjalankan ajaran agama dalam rangka taat kepada Allah SWT. Praktik tersebut telah berlangsung begitu lama yang selanjutnya membentuk sebuah habitus. Kehadiran habitus Tarekat Cukir mendukung PPP terbentuk dari proses sosialisasi secara simbolik dengan jama'ah tarekat, yakni dari a) mursyid yang juga merupakan pengurus/ politisi PPP; 2) para pengurus Tarekat Cukir yang didominasi orang-orang yang juga aktif di PPP, mereka menjadi *icon* bagi kalangan jama'ah, sehingga pilihan politiknya cenderung diikuti. Relasi antara mursyid – murid yang membentuk pola *contract*, dan relasi sesama ikhwan sangat berpengaruh terhadap terciptanya habitus dukungan Tarekat Cukir terhadap PPP.

Kehadiran habitus Tarekat Cukir mendukung PPP seperti sesuatu yang tidak ditanyakan lagi, dan kehadirannya tidak mesti selalu disadari. Hal ini karena secara internal pihak tarekat sendiri memang ada keinginan untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Sekaligus, secara lingkungan eksternal, PPP memberikan pengaruh yang kuat terhadap habitus tersebut. Masyarakat non tarekat pun memberikan label kepada Tarekat Cukir sebagai Tarekat PPP, turut serta memberikan tekanan kepada Tarekat Cukir. Dua faktor internal dan eksternal tersebut turut mempengaruhi habitus yang ada saat ini. Habitus mendukung PPP jika didukung oleh berbagai modal yang dimiliki Tarekat Cukir dan diekspresikan dalam arena tarekat dan politik sebagai tempat beroperasinya, maka akan menghasilkan praktik sosial berupa dukungan Tarekat Cukir terhadap PPP.

Tarekat Cukir menginternalisasi habitus mendukung PPP dari generasi pendahulunya, yang terbentuk melalui proses sosialisasi simbolik di kalangan jama'ah Tarekat Cukir. Jika habitus mendukung PPP sudah terinternalisasi ke dalam diri pelaku jama'ah tarekat saat ini, kemudian timbul ketertarikan terhadap PPP dan terhadap para mursyid yang juga merupakan politisi PPP, maka selanjutnya mereka akan mengeksternalisasikan habitus tersebut ke dalam tindakan nyata, yaitu praksis sosial mendukung PPP.

Praktik sosial Tarekat Cukir mendukung PPP sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hubungan ruhani antara murid dengan guru mursyidnya. Sebab, guru mursyid yang secara politik merupakan pendukung dan pengurus PPP, juga harus diikuti oleh murid. Implikasinya, jika murid bertentangan dengan guru mursyid, termasuk dalam hal urusan pilihan politik, maka dikhawatirkan hubungan ruhani antara kedua belah pihak menjadi terputus. Selain itu, dukungan terhadap PPP juga sebagai sarana menyalurkan suara politik untuk kepentingan Islam. Sebab, PPP merupakan partai yang berasaskan Islam. Pada pola relasi yang terjadi antara Tarekat Cukir dan PPP membentuk pola relasi *simbiosis parasitism*, karena Tarekat Cukir modal sosialnya telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral pihak PPP, sementara Tarekat Cukir tidak memperoleh modal apapun dari PPP sebagai bentuk transformasi.

Kendati demikian, dalam kasus Pilbup Jombang 2018, Tarekat Cukir menolak dukungan terhadap kandidat bupati wanita yang diusung PPP, meskipun ia adalah kader dari partai tersebut. Tarekat Cukir berpandangan bahwa tidak boleh memilih wanita menjadi pemimpin/ kepala daerah berdasarkan makna hadis “tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan”. Hal ini juga didukung kuat oleh tradisi lingkungan internal tarekat yang cenderung paternalistik. Dari proses internalisasi ini, kemudian terekspresikan dalam bentuk sikap penolakan terhadap kandidat pemimpin wanita yang merupakan kader dan diusung oleh PPP.

### **5.3. Adanya Relasi antara Antara Tarekat Cukir dengan Bupati**

Proses selanjutnya adalah adanya relasi antara Tarekat Cukir dengan Bupati Jombang; Nyono Suharli, yang kemudian melahirkan praktik sosial dalam bentuk dukungan Tarekat Cukir terhadap Bupati Nyono sebagai kandidat *incumbent* pada Pilbup Jombang 2018. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dukungan ini dibarengi dengan penolakan kandidat bupati Mundjidah yang diusung PPP. Proses relasi ini melibatkan habitus dan modal yang dimiliki oleh masing-masing pihak, yang diekspresikan di arena tarekat dan politik, khususnya pada Pilbup Jombang 2018. Pada proses dialektika antara kedua belah pihak membuktikan adanya pihak yang mendominasi dan didominasi.

#### **5.3.1. Habitus dan Modal**

Untuk memperoleh informasi tentang Nyono, peneliti di antaranya mengandalkan ajudannya, karena Nyono masih sibuk mempertanggungjawabkan kasusnya; lanjutan dari rentetan peristiwa OTT KPK yang dialaminya. Adalah Munir, ia merupakan ajudan Nyono, warga desa Banjarsari kecamatan Perak kabupaten Jombang, yang ikut tertangkap saat OTT KPK di Jawa Tengah saat itu. Ia sedikit menggambarkan tentang Nyono:

“...Kebetulan Pak Nyono itu memulai karirnya dari Kepala Desa. Beliau menjadi Kepala Desa Spanyol Kecamatan Gudo selama 25 tahun. Setelah beliau menjadi Kepala Desa 25 tahun, beliau juga rajin ke majlis-majlis ta’lim, ikut-ikut

thoriqot. Kebetulan beliau juga santrinya Kiai Maftuh Makki. Jadi, ketika menjadi Kepala Desa itu, beliau sering ke pengajian-pengajian, kemudian setelah itu beliau mencalonkan diri sebagai bupati. Menurut saya, program beliau itu pro rakyat. Semua majelis-majelis ta'lim itu mendapat bantuan, sehingga semua kebutuhan majelis ta'lim itu, Pak Bupati selalu menyokong. Inshaallah kiai-kiai itu dekat..." (19-02-2019)

Dari keterangan di atas, paling tidak, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. *Pertama*, Nyono memiliki habitus silaturahmi ke berbagai majelis taklim, terlibat aktif di tarekat, dan mendekat dengan para kiai. *Kedua*, Nyono memiliki modal sosial-politik melalui kekuasaannya, dan juga modal ekonomi. *Ketiga*, Nyono memiliki habitus memberi bantuan ke berbagai majelis taklim. *Keempat*, Nyono memiliki ikatan emosional hubungan Kiai-Santri dengan Kiai Maftuh.

Meskipun memiliki hubungan santri-kiai, tetapi Nyono sendiri secara tarekat, tidak berbaiat di bawah kuasa Tarekat Cukir. Tetapi ia berbaiat di bawah naungan Tarekat *Shiddiqiyah* Ploso Jombang dan bagian dari keluarga besar tarekat pimpinan Kiai Muchtar mu'thi tersebut. (Anam, 06-06-2018). Kiai Maftuh (10-02-2019) sendiri mengatakan bahwa Nyono tidak berbaiat di bawah naungan Tarekat Cukir. Munir (19-02-2019) turut memperkuat bahwa Nyono memang bagian dari keluarga besar Tarekat *Shiddiqiyah* Ploso Jombang. Bahkan, secara habitus, sudah menjadi kebiasaan Nyono dalam setiap bulan tanggal 15, ia selalu menyempatkan diri datang ke Pusat Pasulukan Tarekat *Shiddiqiyah* di Ploso Jombang untuk menghadiri acara rutinan bulanan.

Hanya saja, memang ada hubungan spesial antara Nyono dengan Kiai Maftuh. Dalam hal ini Munir (19-02-2019) mengatakan:

"Hubungan dengan Kiai Maftuh jauh sejak sebelum mencalonkan diri sebagai bupati. Keluarga Pak Nyono kebetulan sering sowan (bertamu) ke kiai Maftuh. Dari situ timbul silaturahmi ke Kiai Maftuh, minta petunjuk..."

Berawal dari silaturahmi yang berkelanjutan akhirnya membentuk habitus bagi Nyono. Habitus silaturahmi ke Kiai Maftuh sudah terpolakan di dalam diri Nyono, sehingga kalau tidak



silaturrahim terasa tidak etis. Kiai Maftuh sendiri memiliki habitus menerima kedatangan masyarakat, guna mengadakan persoalan kehidupan yang sedang dihadapi, dan Kiai Maftuh pun biasanya mereaksinya dengan memberikan solusi, termasuk persoalan yang dihadapi Nyono. Dalam proses relasi tersebut terjadi proses dialektika yang berjalan: Kiai Maftuh mempengaruhi Nyono, dan sebaliknya Nyono mempengaruhi Kiai Maftuh.

Proses pengaruh-mempengaruhi terkait erat dengan keterlibatan modal yang dimiliki masing-masing pihak, sebagaimana peneliti tampilkan di bawah ini:

**Tabel 11. Sumber-Sumber Modal Kekuasaan Kiai Maftuh**

| Jenis Modal             | Bentuk  |
|-------------------------|---|
| <b>Ekonomi</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aset yayasan pesantren</li> <li>✓ Mobil operasional</li> <li>✓ Travel haji dan umroh</li> <li>✓ Uang <i>bisyaroh</i> (amplop), sedekah dan infaq</li> </ul>  |
| <b>Simbolik</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Badal mursyid/ Mudir di Tarekat Cukir</li> <li>✓ Pengurus DPC PPP Jombang</li> <li>✓ Pengurus DPW PPP Jatim</li> <li>✓ Pengasuh sekaligus mursyid di yayasan pesantrennya</li> <li>✓ Penasehat spiritual bagi banyak orang termasuk Nyono Suharli.</li> <li>✓ Putra politisi PPP militan dan putra dari orang yang terlibat pendirian Tarekat Cukir</li> </ul> |
| <b>Budaya</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penguasaan literatur klasik keagamaan</li> </ul>   |
| <b>Sosial</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jaringan sosial melalui jama'ah tarekat dan politik</li> </ul>   |
| <b>Mistis Spiritual</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memiliki ilmu hikmah/ spiritual, ruqyah (Jawa: suwuk), olah batin.</li> </ul>  |

*Sumber: Kiai Maftuh, diolah saat wawancara dan pengamatan selama penelitian*

**Tabel 12. Sumber-Sumber Modal Kekuasaan Negara/ Bupati**

| Jenis Modal    | Bentuk  |
|----------------|---|
| <b>Ekonomi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uang operasional jabatan sekitar 30 jt/ bulan</li> <li>✓ Uang pribadi Rp. 16,9 M dan 106.784</li> <li>✓ Mobil dinas/ operasional</li> <li>✓ Gedung pemerintah</li> </ul> |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Simbolik</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kepala desa desa Spanyol kecamatan Gudo 1987-2007.</li> <li>✓ Mantan wakil DPRD Jombang 2009-2013.</li> <li>✓ Pejabat di perusahaan PT. CNU,</li> <li>✓ Bupati 2013-2018</li> <li>✓ Ketua Golkar Jombang</li> <li>✓ Salah satu pengurus Tarekat <i>Shiddiqiyah</i></li> </ul>  |
| <b>Budaya</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ilmu 3 S (Sedekah, Santun, Silaturrahim) dari Tarekat <i>Shiddiqiyah</i></li> <li>✓ Praktik doktrin 3 S (Sedekah, Santun, Silaturrahim) dari Tarekat <i>Shiddiqiyah</i></li> <li>✓ Jum'atan di Masjid Agung Jombang dan setiap bulannya memberikan sedekah kepada para tukang becak</li> <li>✓ Memberangkatkan umrah untuk para kiai dan tokoh muslim di Jombang</li> <li>✓ Alumni S1</li> </ul> |
| <b>Sosial</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jaringan APTRI</li> <li>✓ Jaringan kepala desa se-Jombang</li> <li>✓ Jaringan Pondok Pesantren Kecil dan Menengah</li> <li>✓ Jaringan Petani Tebu Rakyat PG. Tjoekir</li> <li>✓ Jaringan Golkar</li> <li>✓ Jaringan NU/ GP. Ansor Jombang</li> <li>✓ Jaringan KNPI Jombang</li> </ul>  |

Sumber: Munir, mantan ajudan Nyono Suharli 29-02-2019

Dalam proses relasi antara kedua belah pihak, Nyono lebih sering membutuhkan modal mistis spiritual yang dimiliki Kiai Maftuh. Misalnya, Kiai Maftuh membantu dengan melakukan ritual *tabarrukan* (mengambil tambahnya kebaikan) di Makam Jabalkad Jawa Tengah (Gus JS, 07-07-2018) pada saat intensif-intensifnya Kiai Maftuh mendukung Nyono. Dalam proses perjalanannya Kiai Maftuh mengalami kecelakaan di Tol Wilangan bulan Ramadhan 2018 yang menewaskan satu orang. Tetapi Kiai Maftuh dalam kondisi selamat.

Kiai Maftuh menceritakan bahwa kecelakaan itu sebenarnya merupakan akibat dari “iriman santet”. Peneliti sendiri meragukan klaim itu. Meskipun sebenarnya peneliti sendiri tidak menolak pengakuan bahwa Kiai Tarekat itu pasti mengerti tentang dunia mistis, apalagi sekedar masalah santet atau sihir. Tetapi, ilmu seperti itu tidak penting dan bukan titik fokus yang dituju oleh kaum tarekat, karena termasuk kategori ilmu yang rendah. Kiai Maftuh

menjelaskan bahwa pada saat luka dan jahitan di wajahnya belum sembuh, ada orang Lamongan yang datang memohon maaf, dan mengaku bahwa dialah yang telah menyantet Kiai Maftuh yang berakibat pada peristiwa kecelakaan itu. Pada saat Kiai Maftuh memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membalasnya, justeru Kiai Maftuh memaafkannya. Tetapi dari pemaafan itulah, kemudian orang tersebut menyatakan diri berbaiat dan berguru kepada Kiai Maftuh. Keterangan ini memperkuat dugaan peneliti bahwa Kiai Maftuh memiliki modal kemampuan spritual mistis yang cukup kuat, hingga mampu menundukkan si pelaku. Atau bisa jadi, keterangan tersebut dalam kacamata orang awam akan menduganya sekedar menaikkan citranya sebagai orang hebat dalam urusan mistis.

Misal lainnya dalam kasus pencalonannya sebagai kandidat bupati Jombang 2013-2018, Kiai Maftuh terlibat aktif dalam merancang dan memilihkan pasangan Nyono. Pasca Bupati Jombang Suyanto demisioner, Kiai Maftuh (10-02-2019) menyarankan Nyono agar bergandengan dengan Mundjidah, dan saran tersebut dijalankan:

“...kulo wira-wiri ke pihak Bu Mundjidah dan pihak Pak Nyono, supados gandengan”. Terj: “...Saya ke sana kemari ke pihak Bu Mundjidah dan pihak Pak Nyono, agar berpasangan”.

Jadi, Kiai Maftuh merupakan salah satu otak di balik berpasangannya Nyono-Mundjidah pada Pilbup Jombang 2013. Pada saat itu, saran Kiai Maftuh dijalankan dan memperoleh kemenangan.

Kiai Ikhsan (07-02-2019) memperkuat citra kemampuan Kiai Maftuh dalam merancang dan memainkan strategi politik dalam Pilbup Jombang. Menurutnya, Kiai Maftuh merupakan penasihat spiritualnya Nyono jauh sebelum Nyono menjadi bupati 2013-2018. Pada masa periode sebelum sebelumnya, Nyono pernah mencalonkan diri sebagai bupati Jombang, tetapi kalah unggul dalam perolehan suara. Padahal saat itu, Kiai Maftuh menyarankan Nyono agar menggandeng Mundjidah sebagai wakil bupati. Hanya saja, saat itu, pihak Mundjidah “dikacau” oleh pihak lawan politiknya. Bentuk pengacauan tersebut adalah dengan berbagai

upaya meyakinkan bahwa pihak Mundjidah layak mencalonkan diri sebagai bupati. Menurut Kiai Ikhsan, pengacau tersebut adalah timnya Suyanto, yang di kemudian hari memenangi pertarungan dalam memperebutkan posisi nomor satu di kabupaten Jombang. Pengacauan berhasil, dan Nyono dan Mundjidah pun sama-sama maju mendaftarkan diri sebagai kandidat bupati Jombang. Hal yang diperolehnya adalah sama-sama kalah, karena suara masyarakat terpecah dan lebih banyak tersedot untuk Suyanto.

Demikian juga pada kasus Pilbub Jombang 2018, Kiai Maftuh juga menjadi guru spiritual Nyono dalam proses pencalonannya sebagai kandidat *incumbent* (Munir, 19-02-2019):

“...Kemarin sebelum mencalonkan sebagai bupati juga sowan (silaturrahim minta solusi) ke Kiai Maftuh...”

Dalam proses silaturrahim tersebut, Nyono mempengaruhi Kiai Maftuh agar mendukung pencalonannya sebagai kandidat *incumbent* pada Pilbub Jombang 2018. Kiai Maftuh pun mereaksinya dengan memberikan dukungan, dan tentu saja tidak lagi berpasangan dengan Mundjidah, karena hubungan keduanya saat itu sudah terbilang retak/ tidak harmonis.

Habitus silaturrahim yang dimiliki Nyono kepada Kiai Maftuh bukan dengan tangan kosong. Tetapi untuk mencapai tujuan silaturrahim tersebut, Nyono mendayagunakan modalnya untuk mempengaruhi Kiai Maftuh. Modal yang tampak mencolok digunakannya adalah modal ekonomi sebagaimana yang tampak pada pemberian berbagai bantuan kepada Tarekat Cukir. Misalnya, terop untuk *Ghusniyah* kecamatan Diwek (Kiai Ikhsan, 29-01-2019). Selain itu, Kiai Maftuh (11-07-2018) mengakui pernah menerima dua unit mobil dari Nyono:

“...Jadi Thoriqoh ini punya mobil dua, yang satu di (desa) Brangkal: Yai mad, yang satu di sini untuk saya. Wonten label e. Jadi mursyid dua ini punya mobil sendiri-sendiri...”

Mobil itu bukan milik pribadi, tetapi untuk operasional organisasi:

“...Bukan, untuk Jami’yah operasional...” (11-07-2018)

Tarekat Cukir juga memperoleh bantuan dana ziarah ke makam para wali (Hafidh, 09-02-2018). Secara pribadi, Kiai Maftuh menerima bantuan pengaspalan jalan menuju pesantren yang dipimpinya, di Tegalsari Mojowarno (Munir, 19-02-2019). Hanya saja, hal yang menjadi kontroversi dan menjadi sorotan di kalangan

internal Tarekat Cukir dan PPP adalah 1) bantuan mobil operasional, 2) dana ziarah makam wali.

*Pertama*, tentang sumbangan mobil operasional. Dalam hal ini, pemberian mobil tidak diakui oleh Kiai Mad (30-06-2018) selaku Mursyid dan Rais Tarekat Cukir:

“...Mobil niku sanes gadhahane jama’ah, niku gadhahane Pak Nyono. Gadhahane jama’ah niku mobil ingkang elek niku. Kulo dereng nate numpak, kulo nggih mboten hadir saat penyerahan”. Terj: “mobil itu bukan milik jama’ah, itu miliknya Pak Nyono. Milik jama’ah itu mobil yang jelek itu. Saya sendiri belum pernah naik mobil tersebut. Saya juga tidak hadir saat penyerahan mobil tersebut”.

Tentang keberadaan mobil yang berada di Brangkal, sejauh penyelidikan peneliti, tidak ada di rumahnya. Kiai Mad justeru seringkali pergi bersama sopirnya menggunakan mobil Kijang Old. Peneliti tidak berani menanyakan ke Kiai Mad perihal pemberian itu. Hanya saja, suatu ketika Kiai M (08-07-2018) menceritakan bahwa Kiai Mad telah “dikerjai” oleh seorang politisi X (peneliti tidak sebutkan namanya), bahwa ternyata mobil tersebut tidak lama berada di Brangkal, dan keburu diambil oleh orang semacam *Debt Collector*. Politisi tersebut bukanlah dari kalangan Tarekat Cukir dan bukan pula dari kalangan PPP. Tampaknya, itulah mengapa Kiai Mad pernah menjelaskan bahwa ia belum pernah menyentuh, apalagi mengendarai mobil pemberian tersebut. Cerita dari Kiai M ini, sekaligus menaikkan citra *zuhud* dan ‘*iffah* Kiai Mad di mata masyarakat, sekaligus menunjukkan ketajaman mata batin Kiai Mad sebagai modal spiritual dalam berelasi dengan pihak lain.

Sementara mobil yang satunya, kemudian mengalami kecelakaan yang menewaskan Nuryanto; sekretaris Tarekat Cukir di Tol Wilangan akhir Bulan Ramadhan 2018. Kiai Mad tidak ikut dalam rombongan itu. Bahkan saat proses penyerahan 2 mobil itu, sebenarnya Kiai Mad tidak berada di lokasi, karena menghadiri undangan pada sebuah acara di desa Pojok Klitik; sebuah wilayah pedesaan di pinggiran yang berbukit (Kiai Mad, 18-09-2018).

*Kedua*, tentang bantuan dana ziarah makam wali. Bupati Nyono mengeluarkan anggaran ziarah makam wali untuk rombongan Tarekat Cukir. Ziarah ini diberangkatkan dari pendopo kabupaten Jombang saat Nyono menjadi bupati, padahal sebelum-

sebelumnya ziarah diberangkatkan dari Pusat Tarekat Cukir. Dalam hal ini Hafidh Ma'shoem (09-02-2018) melihatnya sebagai praktik politik:

“...apalagi, kemudian Jama'ah Thoriqoh itu harus diberangkatkan ke Walisongo lewat Pendopo. Itu kan sudah politik to. Sampean bayangkan. Kiai Maftuh membawa beberapa bis yang dulu berangkatnya dari Cukir, kok ketika Pak Nyono jadi bupati, kok diberangkatkan dari pendopo, ada apa ini? Kan sudah tidak murni to toriqot itu...?”

Bagi Hafidh, Kiai Maftuh terlalu jauh melibatkan tarekat ke dalam pusaran politik kekuasaan, dan hal ini dipandang sudah tidak benar. Bahkan Hafidh meragukan ketarekatannya. Kiai Maftuh dipandang telah banyak terpengaruh oleh politik praktis. Dalam kasus ziarah ini, sebenarnya Kiai Mad menerima amplop berisi sejumlah uang dari panitia, tetapi tidak dikonsumsinya dan keluarganya, karena ia meragukan kebersihannya/ kehalalannya:

“Iki duwek oopo sing digawe...” Terj: “Ini uang aaapa yang dipakai” (Kiai Mad, 20-06-2018)

Dengan demikian, Habitus Kiai sebagai seorang mursyid tarekat telah bercampur dengan habitusnya sebagai seorang politisi. Sementara Kiai Mad yang cenderung juga terseret arus politik yang dibaw Kiai Maftuh, meskipun dalam beberapa kasus Kiai Mad, tidak begitu menguasai medan politik.

### **5.3.2. Dinamika Dominasi Simbolik**

Pemberian demi pemberian telah diterima oleh Kiai Maftuh. Meskipun pemberian tersebut, barangkali merupakan akumulasi dari relasi antarpersonal yang terjadi sebelumnya. Misalnya, sebelum tahun 2013, Kiai Maftuh memasang Nyono dengan Mundjidah, tetapi gagal berpasangan. Kemudian pada masa berikutnya, Kiai Maftuh memasang ulang pasangan tersebut, dan berhasil memperoleh kemenangan. Dominasi Kiai Maftuh melalui keterlibatannya menjadi penghubung dan pelobi antara pihak Nyono dan pihak Mundjidah, tampak menonjol. Perolehan kemenangan Nyono, membuatnya merasa penting untuk membalas jasa-jasanya. Kemudian, selama menjadi bupati, Nyono banyak memberi bantuan kepada Kiai Maftuh selaku pribadi maupun sebagai Ketua Pelaksana Tarekat Cukir. Relasi yang dirasakan saling menguntungkan ini,

cenderung akan dipertahankan, utamanya pada momen Pilbup sebagaimana periode sebelumnya.

Selama Nyono menjadi bupati, banyak bantuan yang diberikannya ke Tarekat Cukir. Menurut Gus JS (07-07-2018), berbagai bantuan dari Nyono membuat Kiai Maftuh merasa berhutang budi. Hal ini berarti bahwa Kiai Maftuh telah terdominasi secara simbolik oleh pihak Nyono, melalui strategi yang dimainkannya. Pada akhirnya, pengaruh ini mengantarkan Kiai Maftuh pada sebuah dukungan terhadap Nyono sebagai kandidat *incumbent* pada Pilbup Jombang 2018.

Dukungan Kiai Maftuh (10-02-2019) terhadap Nyono Suharli diklaimnya sebagai kepentingan/ urusan pribadi, bukan melalui atau mewakili kelompok Tarekat Cukir, juga tidak atas nama lembaganya sendiri. Akan tetapi bagi Kiai LB (08-07-2018), hal tersebut sebenarnya telah menyeret ke level yang lebih besar, yaitu level kelompok Tarekat Cukir. Karena, meskipun mengaku sebagai urusan pribadi, tetapi masyarakatlah yang menilai semuanya. Kiai Maftuh (10-02-2019) mengatakan bahwa dukungannya bukan karena partai Golkar di mana Nyono bernaung di bawahnya, tetapi lebih karena figur dan kepribadiannya:

“...Pilkada itu bukan milik partai. Kita mendukung pak Nyono itu karena melihat figur. Tapi saya tetep PPP. Jangan salah paham lho. Kami bukan lewat tarekat, (tapi dari) saya pribadi. Saya mendukung Pak Nyono bukan karena partai (Golkar), tapi karena figur...”

Sebagaimana diketahui bahwa Kiai Maftuh sebenarnya masih tercatat sebagai pengurus PPP Jombang. Kiai Maftuh membedakan antara kasus memilih partai dan memilih kepala daerah. Itulah mengapa, secara pilihan partai, ia tetap loyal kepada PPP, tetapi dalam kasus pemilihan kepala daerah ia memiliki pertimbangan tersendiri.

Dalam kasus pilbup Jombang 2018, Tarekat Cukir memberi kebebasan, tidak memaksa para murid untuk mengikuti pilihan politik gurunya. Itulah mengapa di antara para jama'ah terdapat perbedaan dukungan terhadap kandidat bupati tertentu. Kiai Ikhsan (28-01-2019), Kiai Sundusin, Kiai Sutadi merupakan contoh tiga orang yang mendukung cabup Nyono Suharli. Mereka mencitrakan

Nyono sebagai orang yang dermawan, program-programnya bagus, yang salah satu di antaranya adalah pemberian fasilitas berupa mobil ambulance untuk setiap desa. Juga memberangkatkan umrah ke banyak orang dari kalangan kiai atau imam masjid: hal yang tidak dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Kiai Ikhsan mengatakan (28-01-2019):

“...durung tau ono, Bupati Jombang sing nyoto tau nguwehi mobil ambulan tiap deso. Yo nggur Pak Nyono...”  
Terjemahnya: “...belum pernah ada, Bupati Jombang yang secara nyata pernah memberi mobil ambulan untuk setiap desa. Ya hanya Pak Nyono...”

Bagi Kiai Maftuh, Nyono memang layak didukung karena memiliki karakter dan kepribadian yang egaliter, mau mendekat dengan para ulama dibanding dengan bupati sebelumnya (Suyanto) yang tidak pernah datang ketika diundang menghadiri acara yang diadakan Tarekat Cukir (11-07-2018). Kasmuri (14-07-2018) juga memperkuat penilaian ini bahwa relasi antara Bupati Jombang dengan pihak Tarekat Cukir terjalin dengan baik dan tampak cair sejak kepemimpinan Nyono Suharli yang berpasangan dengan Mundjidah periode 2013-2018.

Kiai Maftuh (11-07-2018) memperbandingkan figur Nyono dengan Bupati Suyanto yang sebenarnya masih keponakannya sendiri. Hanya saja, dalam membangun relasi dengan Tarekat Cukir kurang terjalin dengan baik. Setiap diundang pada acara-acara ketarekatan, ia tidak pernah hadir. Hal ini bagi Kiai Maftuh, karena Suyanto termasuk kelompok abangan. Jadi, ada semacam jarak yang sulit terhubung antara Tarekat Cukir yang santri dengan Suyanto sebagai bupati yang abangan. Kondisi semacam ini semakin memperkuat teorinya Clifford Geertz tentang struktur masyarakat Jawa yang terdiri dari masyarakat abangan, santri, dan priyayi.

Kedekatan Kiai Maftuh dengan bupati Nyono, tidak hanya didorong oleh persoalan jasa-jasa Nyono (modal ekonomi) yang diberikan kepada Tarekat Cukir, tetapi juga ikatan emosional antara guru-murid yang menghubungkannya, dan telah berlangsung lama. Oleh karena itu, Nyono pun dalam acara-acara resmi Tarekat Cukir diberi panggung oleh Kiai Maftuh untuk menyampaikan sambutan,



utamanya terkait dengan keinginannya maju lagi sebagai kandidat bupati Jombang.

Tarekat Cukir sebagai sebuah lembaga besar, seringkali mengadakan acara-acara rutinitas. Mengundang bupati pada acara-acara tersebut merupakan hasil dari dialektika antara tarekat Cukir sebagai agen dan Bupati sebagai struktur. Undangan dalam acara-acara ritual Tarekat Cukir, baik acara “haul” maupun “sewelasan” agaknya tampak sebagai sesuatu yang normal. Apalagi mengundang bupati merupakan tradisi baru yang mulai dipertahankan sejak era reformasi (Kasmuri, 14-07-2018). Kiai Maftuh mengadakan acara haul Kiai Makki Ma’shoem, pada tanggal 17 Mei 2017. Turut hadir dalam acara itu, bupati Nyono Suharli dan Ketua DPRD Jombang Joko Priyono. Saat memberikan sambutan di atas panggung, Nyono memanggil Priyono untuk naik ke panggung berdiri mendampinginya. Ia hanya berdiri, dan tidak ada bicara atau sambutan. Sebenarnya dalam acara tersebut, calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf juga diundang, tetapi peneliti tidak melihatnya hadir.

Dalam sambutannya selama kurang lebih 15 menit itu, Bupati Nyono mengaku diri sebagai murid Kiai Maftuh Makki yang selalu taat dan menuruti apa yang dikatakannya. Pengakuan diri Nyono sebagai seorang murid Kiai Maftuh, di hadapan para murid tarekat lainnya, telah memberikan dampak psikologis rasa saling memiliki, senasib, seperguruan dan seperjuangan. Kemudian Nyono menyampaikan di tengah sambutannya tentang rencana pencalonan dirinya pada Pilbup Jombang 2018 yang akan datang. Ia mengatakan bahwa para murid harus taat kepada guru agar selamat dunia akhirat. Beberapa jama’ah di sekitar peneliti terlihat manggut-manggut sebagai tanda membenaran. Para jama’ah tampaknya juga memahami adanya hubungan Kiai Maftuh dengan Nyono merupakan hubungan guru-murid. Bahkan dalam hal ini, Kasmuri (14-07-2018) sempat meyakini bahwa Nyono telah berbaiat di bawah kemursyidan Kiai Maftuh.

Kehadiran Nyono di tengah-tengah kelompok Tarekat Cukir tidak hanya pada acara “haul” yang dilaksanakan setahun sekali saja, tetapi juga menghadiri dalam acara “sewelasan” yang diadakan sebulan sekali, meskipun kehadirannya tidak secara terus menerus.

Menurut Kiai Maftuh, Nyono selalu menghormati dengan menghadiri acara “sewelasan” jika memang diharapkan kehadirannya melalui undangan. Kiai Maftuh pernah mengatakan jika ia menginginkan mengawal dan mendukung calon bupati atau gubernur tertentu, maka calon tersebut cukup duduk di sampingnya. Menurutny, jama’ah sudah mengetahui maksud dan tujuan diundangnya calon tersebut. Ini bisa diartikan agar para jama’ah mendukung calon yang didukung Kiai Maftuh, meskipun ia sendiri tidak pernah menyuruh mereka. Para jama’ah umumnya juga tahu, bahwa di dalam buku “*manâqib syaikh ‘abd al-qâdir al-jîlanî*” dinyatakan “*wa al-mukhâfatu sabab al-firâq*” artinya berbeda dari guru, bisa menjadi sebab terputusnya hubungan guru-murid. Lebih lanjut Kiai Maftuh menjelaskan bahwa makna guru lebih bersifat khusus; artinya hubungan guru-murid merupakan hubungan antara mursyid di mana murid tersebut berbaiat di hadapannya. Sementara kata mursyid lebih menunjukkan makna yang bersifat umum (Kiai Maftuh, 28-01-2019).

Berbagai strategi untuk mendukung Nyono dalam rangka pemenangannya dilakukan oleh Kiai Maftuh, termasuk melalui cara mistis atau ritual tertentu. Sampai pada sekitar 10 hari akhir bulan Ramadhan saat itu, rombongan Kiai Maftuh yang berjumlah delapan orang melakukan ziarah di Jabalkad Jawa Tengah. Menurut Gus JS (07-07-2018), hal tersebut dilakukan dengan harapan sejarah akan terulang kembali seperti kemenangan Nyono pada periode 2013-2018, dengan harapan Nyono juga akan memenangkan dalam kontestasi pilihan Bupati untuk kabupaten Jombang periode 2018. Namun na’as, mobil yang ditumpangi rombongan itu mengalami kecelakaan di Tol Wilangan yang mengakibatkan satu orang meninggal, yaitu Nuryanto; sekretaris Tarekat Cukir, fungsionaris PPP, yang juga merupakan ipar dari Kiai Maftuh.

Bagi Gus JS (07-07-2018), pada periode itu seandainya Nyono tidak dipasangkan dengan Mundjidah, hasilnya bisa sangat jauh dari kemungkinan terpilih menjadi bupati. Sebab, basis massa pendukung yang sebenarnya adalah dimiliki Mundjidah. Analisa Gus JS tersebut, barangkali ada benarnya, sebab pada periode sebelumnya, yaitu ketika Nyono dan Mundjidah sama-sama menjadi kandidat, keduanya kalah dan dimenangkan oleh Suyanto.

Kemenangan Nyono periode 2013-2018 sangat berpengaruh terhadap kuatnya bangunan relasi dengan Tarekat Cukir. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai bantuan diberikan Nyono kepada Kiai Maftuh, baik secara pribadi (jalan aspal menuju pesantrennya) maupun secara organisasi, semisal dua unit mobil untuk operasional organisasi Tarekat Cukir. Bantuan berupa sarung tahunan sebagai *bisyarah* untuk para pengurus juga dihadiahkan. Hal ini dirasakan bisa meringankan beban kepemimpinan Kiai Maftuh dalam “menghidupi” bawahannya dan memudahkan dalam memutar roda organisasi, mengingat sumber ekonomi Tarekat Cukir hanyalah sumbangan dan mengandalkan kotak amal (Kiai Ikhsan, 28-01-2019).

Citra negatif akhirnya dilemparkan oleh pihak lawan politik ke pihak Kiai Maftuh, sebagai upaya memojokkan dan mendiskreditkan agar para pemilih tidak mengikuti jejaknya. Dukungan Kiai Maftuh terhadap Nyono diklaimkan sebagai dukungan berdasarkan karena “*bondo*”; yakni karena pemberian. Hanya saja, Kiai Maftuh memilih strategi bertahan pada pilihan politiknya, dan tidak mempedulikan pihak-pihak yang melontarkan stereotip tersebut. Kiai Maftuh meyakini langkah politiknya sebagai benar, dan oleh karena itu ia tetap melanjutkannya. Pada akhirnya, Bupati Nyono yang merupakan kader Golkar tampil egaliter, dan penderma dan mampu merebut hati (mendominasi) beberapa pengurus Tarekat Cukir termasuk Kiai Maftuh. Sebaliknya, Wakil Bupati Mundjidah, yang mencalonkan diri sebagai Bupati, telah gagal mendapatkan dukungan dari Kiai Maftuh dan beberapa bawahannya, meskipun sebenarnya sama-sama dari PPP.

Kedekatan tersebut tampaknya berpengaruh terhadap hubungan Tarekat Cukir dengan PPP yang dulunya cenderung fanatis. Berbagai upaya kontrol yang dilakukan Bupati Nyono kepada kelompok Tarekat Cukir melalui berbagai bantuan, rupanya mulai menggeser persepsi sebagian masyarakat bahwa Tarekat Cukir yang dulunya disebut sebagai Tarekat PPP, sekarang telah berubah menjadi Tarekat Golkar. Seperti apa yang diungkapkan Kiai M (02-07-2018):

“...Thoriqot Cukir iku Thoriqot Politik, biyen PPP, saiki malih Golkar...” Terjemahannya: “Tarekat Cukir itu Tarekat

Politik, dulunya (Tarekat) PPP, sekarang berubah menjadi (tarekat) Golkar”.

Ada pandangan yang berkembang terhadap Tarekat Cukir, bahwa ia telah mengalami pergeseran. Kiai Maftuh sebagai salah satu petinggi Tarekat Cukir telah terpengaruh dan bergeser orientasi. Dominasi simbolik Nyono tidak menimbulkan resistensi atau anti kekuasaan dari pihak Tarekat Cukir. Semua dianggap berjalan sebagaimana sesuatu yang normal dijalankan. Dari pihak Nyono sendiri, baik sengaja atau tidak sengaja, kontrol melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukannya telah mengubah pandangan masyarakat, dari Tarekat Cukir yang dulunya kental dengan PPPnya menjadi tarekat yang lebih terbuka, termasuk menerima Nyono sebagai bupati Jombang dari kader Golkar. Dengan kata lain, sadar atau tidak, kedekatan Bupati Nyono dengan Tarekat Cukir tersebut telah melunturkan fanatisme Tarekat Cukir terhadap PPP. Berbagai sumbangan berupa materi dan dukungan moral dari Nyono merupakan strategi dalam mengikis habitus Tarekat Cukir yang selama ini sangat dekat dengan PPP. Tarekat Cukir bermain secara pragmatis. Baginya, relasi dengan PPP secara materi tidak menguntungkan, dan hanya menguntungkan secara ruhiyah, yakni relasi murid-mursyid.

Sebenarnya, pergeseran tersebut tidak lepas dari pengaruh struktur obyektif pada level yang lebih besar, yaitu adanya kebijakan Orde Reformasi yang lebih terbuka. Akibatnya, tercapai sebuah pandangan di kalangan jama'ah Tarekat Cukir (Gus H, 06-05-2019) bahwa antara PPP dengan partai lainnya sama saja, karena tidak seperti pada masa-masa sebelumnya (Orde Baru), di mana umat Islam begitu tertekan. Kemenangan kandidat tertentu, bukan berarti kemenangan umat Islam:

“...Sekarang, berlaku apa yang namanya koalisi. Jadi, jika calonnya menang, maka tidak bisa dikatakan sebagai kemenangan umat Islam. Sebab di dalamnya terdapat juga partai nasionalis...”

Untuk mendukung Nyono, Kiai Maftuh juga memainkan strateginya dengan melemparkan isu gender. Isu gender ini sangat penting untuk diwacanakan, mengingat lawan terberat dalam Pilbup tersebut adalah Mundjidah yang secara modal dalam berelasi

terbilang cukup kuat, baik modal ekonomi (terkaya di antara kandidat lainnya), modal sosial melalui forum-forum perempuan NU Muslimat dan modal simbolik karena ia masih keturunan langsung dari pendiri NU KH. Wahab Chasbullah. Isu gender yang digelindingkan ditujukan untuk mempengaruhi jama'ah tarekat dan pihak lain, sebagai strategi untuk memperlemah posisi lawan politik dari kandidat yang didukungnya. Tentang isu ini, beberapa jama'ah (15-10-2018) berpandangan bahwa mereka mendukung kandidat laki-laki, bukan dari jenis kelamin perempuan. Bagi mereka, kalah dan menang itu adalah resiko urusan belakangan. Jika pilihan mereka yang laki-laki itu kalah, maka yang terpenting bagi mereka sudah berusaha memenuhi ajaran agama, yaitu tidak memilih kandidat pemimpin perempuan.

Kiai Mad, pernah mengingatkan Kiai Maftuh dalam mendukung Nyono. Kiai Mad, meskipun memiliki citra sosok yang “*utun*”; tidak bisa naik (mengoperasikan) sepeda motor apalagi menyetir mobil, dan juga tidak mengurus perpolitikan. Ia mengetahui banyak hal tentang agama dalam hubungannya dengan Tuhan, hal mistis, dan lebih memilih banyak diam terkait dengan bidang politik. Namun demikian, bukan berarti ia tidak memiliki sikap politik terhadap penguasa. Kehati-hatian Kiai Mad begitu tampak pada sikapnya terhadap penguasa, sebagaimana sikap Syekh Abdul Qadir al-Jilani yang menjaga jarak terhadap penguasa seperti yang tergambar dalam buku “*manâqib*”.

Kiai Mad mengkritik secara halus Kiai Maftuh (30-06-2018) yang begitu dekat dengan penguasa/ Nyono, saat Kiai Maftuh berkunjung ke rumahnya:

“...Wong Jowo iku kan ngeten: “Wong dielem iku sok kelem”. Terjemah: “...(Pitutor) orang Jawa itu kan begini: “Orang dipuji itu, (suatu saat justeru) akan tenggelam”.

Kritik inilah yang di kemudian hari membayangi peristiwa-peristiwa berikutnya. Di antara peristiwa yang mengejutkan adalah terjadinya kecelakaan di tol Wilangan Saradan-Nganjuk sebagaimana disebutkan di atas, yang merenggut nyawa salah satu pengurus Tarekat Cukir dan merusakkan mobil bertuliskan “Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah Cukir” yang merupakan sumbangan dari Nyono Suharli. Selain itu, yang tidak kalah

mengejutkan lagi adalah tertangkapnya Nyono secara Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di Solo beberapa waktu lalu. Munir, ajudan Nyono juga ikut tertangkap saat itu, dan ditahan selama 24 jam (Munir, 19-02-2019).

Sebagai *rais*, posisi Kiai Mad lebih tinggi di atas Kiai Maftuh sebagai *mudîr*. Melalui modal simboliknya, Kiai Mad memberikan nasehat kepada Kiai Maftuh beserta rombongannya, agar tidak terlibat politik terlalu jauh, dan tidak perlu memuji kandidat yang didukungnya. Bagi Kiai Mad, mengawal dan mendukung terhadap Nyono sebagai calon bupati mendatang, yang dilakukan Kiai Maftuh sudah tidak wajar. Mengingatkan bawahan adalah sebuah kewajiban bagi seorang mursyid. Tindakan memuji oleh seorang manusia kepada manusia lainnya seringkali justru melenakan dan menjerumuskan. Karena pujian bisa saja menimbulkan fitnah bagi yang dipuji. Hanya saja, Kiai Maftuh dan rombongan diam dan tidak membantahnya. Namun, diam bisa bermakna ganda, bisa tunduk atau sebagai bentuk resistensi karena secara struktur organisasi tarekat posisinya lebih rendah dan terdominasi.

Tampaknya, citra baik yang dibangun untuk figur Nyono menjadi merosot karena adanya kasus tertangkapnya Nyono oleh KPK. Hal demikian membuat sekaligus merusak habitus kandidat tersebut. Upaya Kiai Maftuh membangun citra dan kepercayaan di kalangan jama'ah Tarekat Cukir untuk mendukung Nyono, seakan runtuh dalam semalam dengan adanya kasus tersebut. Padahal Kiai Maftuh, sejak sebelum Nyono menjadi kandidat Bupati Jombang 2018, telah berusaha mengontrol jama'ah Tarekat Cukir agar nantinya dukungan diarahkan ke kandidat Nyono, baik melalui acara "Senenan", "sewelasan" maupun "haul" dengan menghadirkannya sebagai pembicara. Namun sayangnya, upaya menghegemoni pikiran jama'ah tarekat agar mendukung Nyono tidak didukung kuat oleh habitus kandidat tersebut. Kiai Maftuh (10-02-2019) pernah mengungkapkan tentang angka kemenangan Mundjidah yang terbilang tipis, dan ia mengandaikan bahwa jika Nyono tidak sedang bermasalah dengan KPK, maka ia berani memastikan kemenangan kandidat yang didukungnya tersebut:

"...umpami mboten kencing kasus, bisa dipastikan P. Nyono menang. Niku menanage Munjidah menang tipis kok..."

Kiai Maftuh (10-02-2019) menjelaskan bahwa beredarnya berita tentang tertangkapnya Nyono tersebut, telah membuat para pendukungnya banyak yang mencabut diri dari dukungannya, atau golput. Namun demikian, Kiai Maftuh dan beberapa elit Tarekat Cukir, di antaranya Kiai Ikhsan (07-02-2019) tetap percaya bahwa Nyono tidak bersalah, sehingga dalam pencalonannya layak untuk tetap didukung. Baginya, menang dan kalah tidaklah terkait dengan ketaatan terhadap ajaran agama.

Dari uraian di atas, Kiai Maftuh secara jelas memiliki hubungan dekat dengan bupati Jombang. Kedekatan ini karena adanya hubungan emosional antara guru-murid yang telah terbangun sebelumnya. Jadi, relasi ini tidak terjadi setelah Nyono menjadi bupati. Kedekatan hubungan ini tampak mencolok bila dibandingkan dengan para bupati sebelumnya. Ini berbeda dengan kasus Syekh Abdul Qadir al-Jilani (dalam kitab *manâqib*) yang menjaga jarak dengan penguasa, karena kedekatannya tidak didahului oleh ikatan emosional hubungan guru-murid. Setelah si penguasa tersebut “ditelanjangi” oleh Syekh di depannya melalui dua buah apel; yang satu dipegang Syekh dan dibelah beroma harum, sementara yang satunya dipegang penguasa dan dibelah beraroma busuk, penuh dengan ulat, sebagai petunjuk kezaliman si penguasa tersebut. Pasca hal itu, si penguasa bertaubat dan berbaiat di hadapan Syekh. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus Nyono yang justru dalam perjalanannya sebagai penguasa harus berakhir di penjara.

Mestinya, Kiai Maftuh mampu menuntun Nyono agar tidak sampai terjerumus ke dalam kasus suap, yang menyebabkannya tertangkap KPK. Jangan sampai berbagai bantuan yang diberikan Nyono kepadanya, menjadikannya lalai dari memperingatkannya tentang hal-hal yang dilarang oleh agama. Tetapi sayangnya, Kiai Maftuh bukanlah guru mursyid dari Nyono. Kiai Maftuh hanyalah sebagai guru penasehat spiritual, utamanya dalam hal ini terkait dengan prediksi langkah-langkah politik sebaiknya diambil oleh Nyono. Justru sebenarnya yang memiliki hubungan yang lebih kuat secara langsung, hubungan mursyid-guru murid adalah Kiai Muchtar Mu'thi; mursyid Tarekat *Shiddiqiyah* (Munir, 19-02-2109)

yang dulu sempat menjadi pendukung utama Golkar di masa Orde Baru (A'dam: 2008).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam sebuah relasi, untuk mempengaruhi pihak lain, satu pihak yang dominan cenderung menggunakan modal enokominya. Misalnya, dalam kasus hubungan antara Tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* Rejoso dengan Orde Baru (Sukamto, 1999; Sujuthi, 2001). Dalam kasus ini, pihak Golkar yang didukung kuat Orde Baru menggunakan modal ekonominya (selain modal simbolik dan sosial) dengan memberi banyak bantuan kepada kelompok tarekat tersebut. Kampus Universitas Darul Ulum Jombang merupakan salah satu jasa pemberian itu. Dengan hal itu, Tarekat Rejoso selalu mendukung pemerintahan yang dipimpin Soeharto itu. Hal yang hampir sama terjadi pada Tarekat Cukir, setelah berbagai bantuan diterimanya dari Nyono, akhirnya Tarekat Cukir mendukung Nyono sebagai kandidat bupati *incumbent* Jombang 2018. Tetapi agaknya, terdapat sedikit perbedaan, bahwa Nyono didukung Kiai Maftuh tidak hanya setelah menjadi bupati, tetapi jauh sebelum menjadi bupati, Nyono sudah didorong, dikawal dan didukung oleh Kiai Maftuh untuk maju menjadi bupati Jombang, meskipun di masa awal menerima kekalahan.

Dilihat dari kacamata patron klient, (Scot, 1972: 91-113) pola hubungan guru-murid antara Kiai Maftuh dengan Nyono memosisikan pihak Kiai Maftuh sebagai patron karena kedudukannya lebih tinggi secara spiritual. Kiai Maftuh menggunakan pengaruh dan berbagai modalnya untuk melindungi dan memperjuangkan muridnya (Nyono) sebagai client yang tentu kedudukannya lebih rendah. Pada gilirannya nanti, Nyono (client) membalas dengan jasa-jasanya termasuk bantuan ekonomi kepada Kiai Maftuh (patron). Sebaliknya, di sisi lain, Nyono secara politik kekuasaan kedudukannya sebagai Bupati Jombang lebih tinggi (patron) dibanding dengan Kiai Maftuh sebagai bagian dari masyarakat sipil (client). Nyono sebagai patron memberikan banyak bantuan kepada Kiai Maftuh/ Tarekat Cukir, sebagai balasannya Tarekat Cukir mendukung Nyono sebagai kandidat *incumbent* Jombang 2018.



Penelitian Sujuthi (2001: 96) tentang Tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* di Jombang, yang meliputi Tarekat Rejoso, Tarekat Kedinding Lor, dan Tarekat Cukir menunjukkan perilaku politik yang berbeda. Hanya saja, penelitiannya dibatasinya pada sikap politik terhadap pemerintah Orde Baru. Namun demikian perlu dikemukakan dalam tulisan ini. *Pertama*, Tarekat Rejoso perilaku politiknya bersifat adaptif-kompromis. Indikasinya, tarekat ini mengakomodir kebijakan politik pemerintah dengan cara bergabung dengan partai Golkar, mendapatkan bantuan dari pemerintah, membantu menjalankan program-program pemerintah di bidang pendidikan, dan memperoleh jatah kursi DPRD/ DPR RI. Hanya saja, temuan Sujuthi ini tidak menjadi fokus penelitian disertasi ini. Namun penting untuk dicatat, bahwa kesimpulan Sujuthi tersebut sudah tidak ditemukan lagi pada saat ini, karena Tarekat Rejoso secara jelas sudah tidak mau lagi terlibat aktif dalam politik praktis. Tarekat Rejoso lebih cenderung fokus ke internal organisasi. Bahkan, tidak aktif lagi di JATMI yang dulu mereka aktif di dalamnya (Kiai Dimyathi, 02-03-2018).

*Kedua*, tarekat Kedinding Lor perilaku politiknya bersifat netral dan kooperatif. Indikasinya adalah kesediaan menerima bantuan dan bekerja sama dengan pemerintah di satu sisi, dan di saat yang lain tidak menunjukkan secara eksplisit arah dukungan politiknya; tidak ke Golkar tidak pula ke PPP. Demikian juga, peneliti tidak berfokus pada Tarekat Kedinding Lor yang lokasinya di Surabaya. Tarekat ini merupakan sebaran dari Tarekat Rejoso Jombang. Namun demikian, sikap Tarekat Kedinding Lor tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik negara yang berkembang. Tampaknya, sikap tersebut ditunjukkannya karena pengaruh dari Tarekat Rejoso yang bergabung dengan Golkar dan terlalu dekat dengan pemerintah, di satu sisi. Sementara di sisi lain, Tarekat Cukir yang merupakan pecahan dari Tarekat Rejoso, menunjukkan sikap sebaliknya dari Tarekat Rejoso, sebagaimana poin ketiga di bawah ini. Tarekat Kedinding Lor tampaknya ingin menunjukkan praksis sosial di antara keduanya.

*Ketiga*, tarekat Cukir perilaku politiknya bersifat antagonis. Indikasi itu tampak pada penolakannya terhadap Golkarisasi, dan lebih memilih bergabung dengan PPP. Selain itu mewajibkan warga

muslim menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai Islam atau yang berasaskan Islam, mengkritik perilaku Gus Dur yang dekat dengan pemerintah, dan berpandangan bahwa kiai yang bersedia menerima bantuan dari pemerintah itu tidaklah untuk Islam, tetapi untuk dirinya sendiri. Demikian juga penelitian Nur Syam (2005) memperkuat penelitian Sujuthi bahwa sikap Tarekat Cukir terhadap pemerintah Orde Baru cenderung antagonis, dan mewajibkan jama'ahnya memilih PPP. Sikap antagonis menunjukkan adanya proses dominasi yang menyempit, sehingga pihak terdominasi bisa merasakannya sebagai tekanan yang kemudian melahirkan perlawanan dan resistensi dari pihak Tarekat Cukir, dan diekspresikannya dengan sikap antagonis. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara Tarekat Cukir dengan Pemerintah Orde Baru memiliki hubungan yang tidak menguntungkan (*simbiosis parasitism*), utamanya bagi Tarekat Cukir.

Hanya saja, hasil temuan Sujuthi tersebut cenderung direvisi oleh temuan penelitian ini, karena pihak Tarekat Cukir meskipun sebagai pihak terdominasi oleh Bupati Jombang, tetapi tidak dirasakannya sebagai penindasan, sehingga tidak menimbulkan resistensi. Justeru yang terjadi sikap *adaptif-kompromis* sebagaimana sikap tarekat Rejoso terhadap pemerintah Orde Baru saat itu. Hanya saja, indikasi yang kuat menunjukkan bahwa Tarekat Cukir banyak menerima bantuan dari Nyono selama menjadi Bupati Jombang. Selain itu, Tarekat Cukir memperkuat Bupati Jombang dengan mendukungnya sebagai kandidat bupati *incumbent* pada Pilbup Jombang 2018.

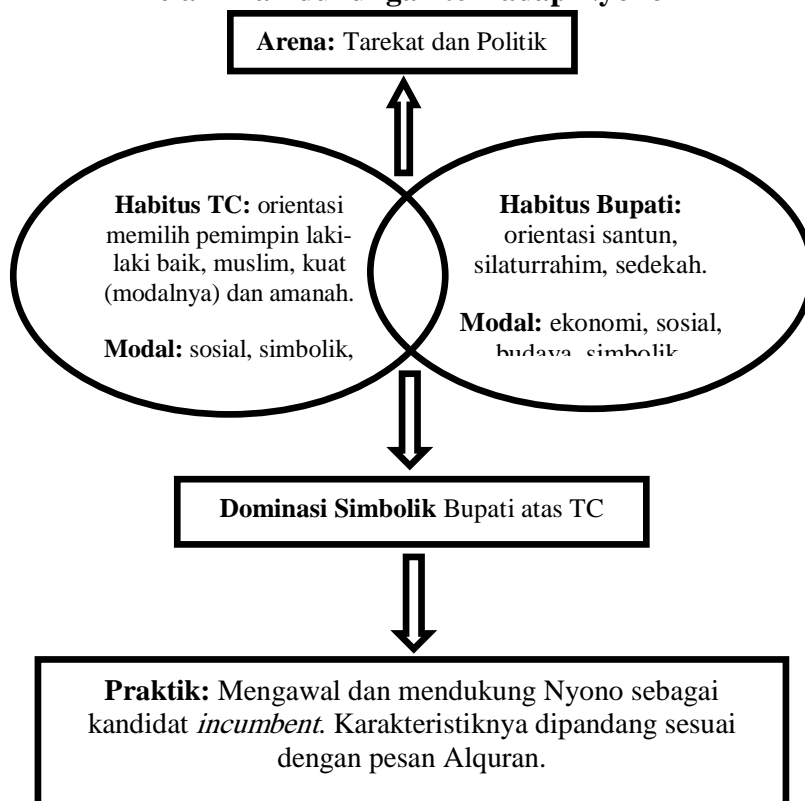
Penelitian Dudung menunjukkan hasil yang hampir sama, yaitu sikap antagonis ditunjukkan oleh kaum tarekat di wilayah Priangan karena ada tekanan yang begitu kuat dari pemerintah penjajah (Dudung, 2008).

Sementara praktik yang cenderung memperkuat relasi, lahir dari proses relasi yang dirasakan saling menguntungkan. Misalnya, Tarekat *Shiddiqiyah* Ploso Jombang yang menjadi pendukung pemerintah Orde Baru pada Pemilu 1977, setelah itu banyak lulusan Madrasah dan Universitas yang segera diangkat menjadi guru agama negeri, setelah masuk menjadi anggota tarekat Shiddiqiyah (Dhofier, 2011: 221). Selain itu juga Tarekat Rejoso (Sujuthi, 2001;

Bruinessen, 2015) memperoleh bantuan berbagai materi termasuk berdirinya kampus Undar Jombang. Demikian juga Tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* di Kudus (Mu'min, 2014) yang banyak menerima bantuan dari pemerintah di satu sisi dan mendukung pemerintah dan Golkar di sisi lain.

Tapi, sebenarnya beberapa hasil penelitian di atas justru memperkuat teori yang dikembangkan oleh Bourdieu bahwa dominasi yang sangat sempit akan melahirkan resistensi. Sebaliknya, dominasi yang longgar, cenderung tidak dirasakannya sebagai bentuk penindasan, sehingga tidak menimbulkan perlawanan. Temuan-temuan di atas sekaligus memperkuat teori yang dikembangkan oleh Bourdieu (1990: 45, 55) bahwa praksis sosial terjadi karena adanya proses internalisasi ekterior dan eksternalisasi interior. Artinya, agen dan struktur terlibat saling mempengaruhi.

**Gambar 13.**  
**Relasi Tarekat Cukir (TC) dengan Bupati Nyono yang melahirkan dukungan terhadap Nyono**



### 5.3.3. Simpulan

Dalam berelasi dengan bupati, Tarekat Cukir menggunakan modal sosialnya (jaringan massa) dalam rangka kepentingan politik elektoral bupati. Di saat yang sama, bupati memiliki modal ekonomi. Modal sosial yang dimiliki Tarekat Cukir melalui Kiai Maftuh kemudian ditukarkan, diantaranya dengan modal ekonomi yang dimiliki bupati berupa barang. Selain itu, Kiai Maftuh juga menggunakan modal mistic-spiritualnya dalam berelasi dengan Nyono. Di satu saat, Tarekat Cukir melalui Kiai Maftuh mendominasi Nyono, karena dalam beberapa langkah politiknya Nyono mengikuti petunjuk dari Kiai Maftuh. Sementara di saat yang lain, Nyono sebagai bupati tampil mendominasi karena memberikan bantuan modal ekonominya kepada Tarekat Cukir, sehingga mampu menyeret Tarekat Cukir lebih jauh ke ranah politi praktis, misalnya pemberangkatan ziarah walisongo dari pendopo kabupaten, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Secara teoritis, empat jenis modal yang ditawarkan Bourdieu, yakni modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik ditemukan di lapangan penggunaannya. Hanya saja, ada satu modal yang belum ditawarkan Bourdieu, yaitu modal mistic-spiritual yang didayagunakan Kiai Maftuh ketika berelasi dengan Nyono.

Dominasi Bupati Nyono atas Tarekat Cukir dilakukan melalui beberapa strategi 1) menjalin silaturahmi sebagai upaya membangun jaringan sosial dan mempertahankan yang sudah ada (modal sosial), 2) bersikap santun sebagai upaya untuk meningkatkan citra dan memperkuat modal simbolik, 3) dengan modal ekonominya, Nyono memberikan sedekah dan bantuan, baik moril maupun materiil kepada orang lain sebagai upaya menolak cobaan secara teologis, sekaligus sebagai upaya menarik hati pihak lain secara sosial politis.

Strategi ini tampaknya cukup berhasil, sehingga pihak Tarekat Cukir sebaliknya memberikan umpan balik dengan memberikan dukungannya kepada Nyono melalui beberapa strategi: 1) mengundang Nyono dalam acara-acara yang diadakan Tarekat Cukir: senenan, sewelasan, dan haul sebagai simbol bahwa Kiai Maftuh mendukung Nyono. Hal ini nantinya diharapkan berdampak

pada pilihan politik para jama'ah Tarekat Cukir pada pilbup 2018; 2) upaya dukungan juga dilakukan melalui ritual mistis dengan berziarah di Jabalkat Jawa Tengah; 3) upaya dukungan dilakukan melalui wacana isu gender berkaitan dengan tidak bolehnya wanita menjadi pemimpin dan keutamaan laki-laki sebagai pemimpin.

Strategi Nyono melalui berbagai jasa-jasanya telah membuat Kiai Maftuh berutang budi, yang mendorong Kiai Maftuh untuk selalu mendukungnya dalam memimpin pemerintahan di Jombang. Sebaliknya, Nyono menggantungkan nasehat-nasehat spritualnya kepada Kiai Maftuh. Kedua belah pihak saling membutuhkan; pihak Tarekat Cukir membutuhkan modal yang dimiliki Nyono, dan begitu juga sebaliknya. Pada akhirnya, kondisi demikian memungkinkan pertukaran modal antara kedua aktor dilakukan, sebagaimana yang terjadi. Pada arena politik, dominasi Nyono terhadap Tarekat Cukir termasuk dominasi yang longgar, yang tidak dirasakannya sebagai bentuk kekerasan/ penindasan, sehingga tidak menimbulkan perlawanan/ resistensi dari pihak Tareka Cukir. Hal ini karena kedua belah pihak dalam berelasi sama-sama merasa diuntungkan (*symbiosis mutualism*). Sebuah relasi yang cenderung saling menguntungkan dari kedua belah pihak, masing-masing pihak cenderung akan mempertahankannya.

Tetapi proses dominasi tersebut tidak berlaku secara konstan. Memang dalam arena politik, Bupati Nyono cenderung mendominasi, tetapi di arena spiritual, Tarekat Cukir melalui Kiai Maftuh cenderung tampil dominan, terutama terkait dengan nasihat politik dan batin yang diberikan Kiai Maftuh terhadap bupati Nyono. Secara struktur keguruan spiritual, Nyono yang bupati tersebut merupakan murid yang harus tunduk dan patuh terhadap gurunya, yaitu Kiai Maftuh yang merupakan mursyid Tarekat Cukir.